



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSES PELEMBAGAAN SEKOLAH ALTERNATIF
(STUDI KASUS PKBM YAYASAN BINA INSAN MANDIRI (YABIM))**

TESIS

Meixxi Eni Soma Tamba
0906590074

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSES PELEMBAGAAN SEKOLAH ALTERNATIF
(STUDI KASUS PKBM YAYASAN BINA INSAN MANDIRI (YABIM))**

TESIS

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar M. Kes. Sos.

Meixxi Eni Soma Tamba
0906590074

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PEMBANGUNAN SOSIAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Meixxi Eni Soma Tamba

NPM : 0906590074

Tanda Tangan :





Tanggal : 25 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Meikxi Eni Soma Tamba
NPM : 0906590074
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Kekhususan : Pembangunan Sosial
Judul : Proses Pelembagaan Sekolah Alternatif (Studi Kasus
PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) Sebagai
Wujud Dari *Civil Society*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Agung Pramono, MA ()
Penguji : Rissalwan Habdy Lubis, S.Sos, M.Si ()
Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D ()
Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Studi Kelembagaan Pada Sekolah Alternatif PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri, Upaya Mewujudkan *Civil Society*”. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PKBM yang lain di Depok agar di dalam proses penyelenggaraan dapat terlembaga dengan baik dan berkualitas sehingga dapat eksis dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dan juga memberi masukan kepada Pemerintah Daerah agar berperan aktif sehingga di dalam perjalanan penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan sosial diberi kemudahan dan akses bagi warga yang tidak mampu agar dapat berdaya.

Beberapa pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah di Program Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, maupun dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Agung Pramono PW, MA, selaku pembimbing tesis yang dengan bimbingan, motivasi serta kepercayaannya, mengarahkan dan memberikan masukan yang terbaik dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Dra. Fentiny Nugroho MA, Ph.D selaku ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial yang selalu memotivasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
3. Ibu Dra. Fitriyah, M.Si selaku Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Dengan perhatian dan kesabarannya senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami mahasiswa selama kuliah hingga penyelesaian penulisan tesis.
4. Seluruh Staf Pengajar di Konsentrasi Pembangunan Sosial. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat lebih bagi masa depan penulis dan sekiranya dapat dibagi ke masyarakat dan menjadi penerang kepada orang lain.

5. Ucapan terima kasih lebih kepada staf-staf di sekretariat Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial (Mba Valent, Mas Cece dan Mas Tinton) yang telah banyak membantu semua mahasiswa dan memberi kemudahan dalam setiap permasalahan di masa-masa perkuliahan.
6. Bapak Nur Rohim Sebagai Ketua Yayasan Bina Insan Mandiri, Kak Mustami, Kak Beni, Wildan, Alfis yang banyak membantu dalam penyelesaian penulisan ini.
7. Pak Yamin selaku Ketua TKBM Ats-tsiqah yang banyak meluangkan waktunya untuk wawancara dan pengumpulan data, Pak Deni (Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial) yang juga meluangkan waktunya, Pak Nizom (Staf Pelaksana Pendidikan Non Formal) yang membantu melengkapi dalam data yang diperlukan serta waktu yang diluangkan untuk wawancara.
8. Terkhusus bagi Orang tua tercinta yang memberi dukungan moral dan materi sehingga di dalam penyelesaian penulisan tesis semakin terpacu.
9. Untuk Teman-teman yang tidak muat di tulis satu-persatu, teman seangkatan di Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial yang banyak memberi dukungan dan teman-teman dari Kementerian Sosial yang juga banyak membantu dalam menyemangati penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga hasil dari penelitian yang tertuang dalam tesis ini menjadi bermanfaat bagi pembaca.

Depok, 20 Juni 2012

Penulis,

(Meixxi Eni Soma Tamba)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meixxi Eni Soma Tamba
NPM : 0906590074
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
STUDI PELEMBAGAAN SEKOLAH ALTERNATIF “Studi Kasus PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 11 Juli 2012

Yang menyatakan

(Meixxi Eni Soma Tamba)

ABSTRAK

Nama : Meixxi Eni Soma Tamba
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Proses Pelembagaan Sekolah Alternatif (Studi Kasus PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM))

Tesis ini membahas tentang proses pelembagaan sekolah alternatif (studi kasus PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM)). Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan proses pelembagaan yang terjadi pada PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri serta peran Pemerintah Kota Depok sebagai penyelenggara kegiatan di PKBM. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan alur sejarah (*timeline*). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah alternatif hendaknya terlembaga dengan baik dengan melalui empat tahap pelembagaan yaitu tahap dikenal, tahap diakui, tahap dihargai, tahap ditaati, dan akhirnya menjadi perilaku bersama. Dan proses pelembagaan itu telah dilewati oleh PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri dengan baik dan melalui proses yang lama.

Kata Kunci: Proses Pelembagaan, *Civil Society*, Peran Pemerintah.

ABSTRACT

Name : Meixxi Eni Soma Tamba
Study Program: Postgraduate Program of Social Welfare
Title : Institutional Process Alternative School (Case Study At PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM))

This thesis is discussing of Institutional study to alternative school in order to crystallize a civil society. The purpose is to describe an institutional process that occurred in PKBM a Bina Insan Mandiri Foundation so as Depok city government as organizer of this activity at PKBM. The applied method is descriptive qualitative with a timeline history. Result of this research is representing a PKBM YABIM illustrates that in the operation of alternative schools should be properly institutionalized through the four stages of the institutionalization of the known phases, stages are recognized, respected stage, stage followed, and will eventually become common behavior. And the institutionalization process has been bypassed by Yayasan Bina Insan Mandiri PKBM well and through a long process.

Keyword : Institutional Process, Civil Society, Government Role.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Pendekatan Penelitian	13
1.5.2 Jenis Penelitian	14
1.5.3 Teknik Pemilihan Informan	14
1.5.4 Unit Analisis	17
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data	17
1.5.6 Teknik Analisis Data	18
1.6 Hambatan Penelitian	19
1.7 Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan	19

1.8	Sistematika Penulisan.....	20
BAB 2 KAJIAN LITERATUR		22
2.1	Pembangunan.....	22
2.1.1	Pembangunan Dalam Konteks Kesejahteraan	25
2.2.1	Perspektif Institusional Dan Campur Tangan Negara	27
2.2	Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.3	Pengertian Pendidikan	34
2.3.1	Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat	34
2.3.2	Pendekatan Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	35
2.4	Pengertian Lembaga	39
2.4.1	Perbedaan Lembaga/Kelembagaan Dengan Organisasi	40
2.4.2	Lembaga Pendidikan Masyarakat	45
2.4.3	Sekolah Alternatif	46
2.4.4	Lembaga Sosial	50
2.4.5	Syarat Kelembagaan.....	52
2.4.6	Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial	53
2.4.7	Pelebagaan/Institusional	53
2.4.8	Pelebagaan Lembaga.....	56
2.4.9	Model Pengembangan Lembaga	56
2.4.10	Pengembangan Kelembagaan	61
2.5	Civil Society	63
2.5.1	Pengertian Civil Society	63
2.5.2	Civil Society Dan Kelembagaan Masyarakat	66
2.6	Sejarah Berdirinya PKBM YABIM.....	70
BAB 3 GAMBARAN UMUM PKBM YABIM.....		81
3.1	Gambaran Umum.....	81
3.1.1	Letak PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri	81
3.1.2	Profil YABIM	82

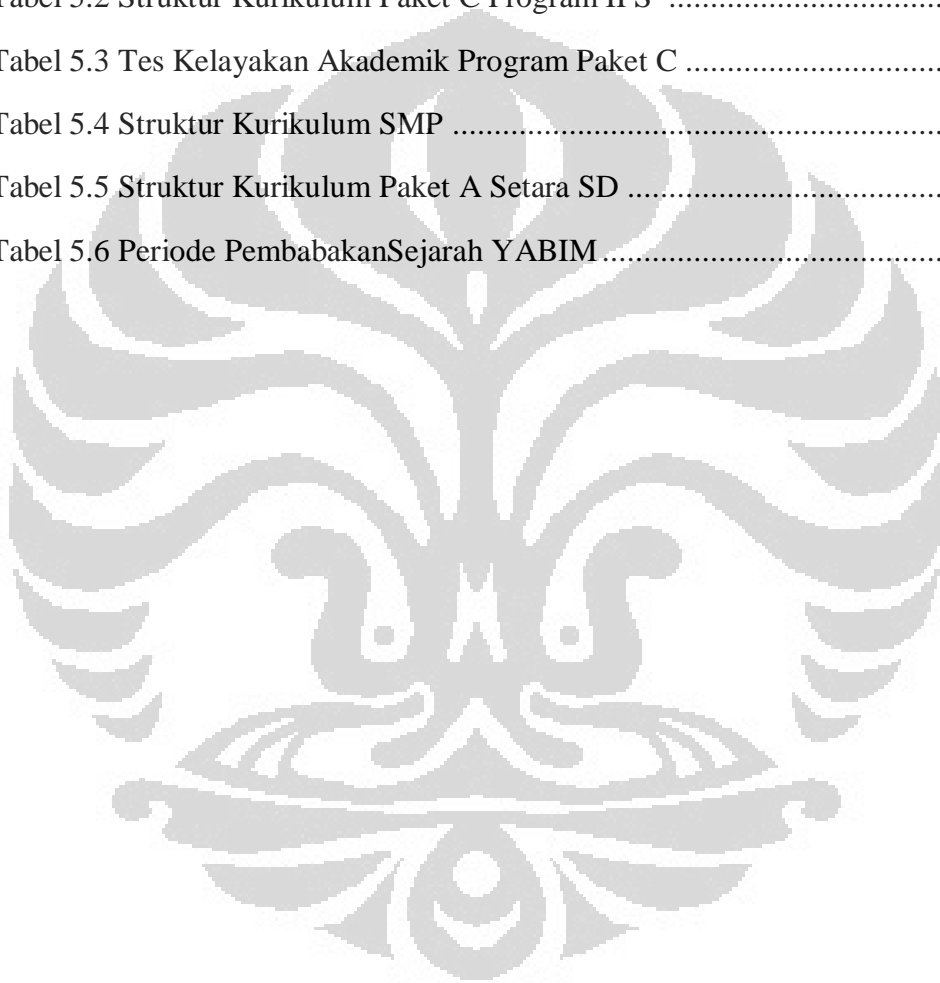
3.1.3 Susunan Pengurus	83
3.2 Program PKBM	84
3.2.1 PAUD	84
3.2.2 Sekolah Dasar Persamaan Paket A.....	85
3.2.3 Kejar Paket B Setara SMP	85
3.2.4 Kejar Paket C Setara SMA	85
3.2.5 SMP/SMU Terbuka.....	86
3.2.6 Kelas Bisnis	86
3.2.7 Kelas Seni	86
3.3 Program Tambahan	87
3.4 Capaian Hasil Dan Pengembangan	87
3.5 Pengembangan Sarana Dan Prasarana	88
3.6 Prestasi Dan Mitra Kerja	89
3.7 PKBM YABIM Sebagai Suatu Lembaga.....	90
3.8 PKBM YABIM Sebagai Suatu Organisasi	92
BAB 4 DINAMIKA PELEMBAGAAN	96
4.1 Proses Pelembagaan Yayasan Bina Insan Mandiri.....	96
4.1.1 Proses Pelembagaan Tahap Dikenal	96
4.1.2 Proses Pelembagaan Tahap Diakui	101
4.1.3 Proses Pelembagaan Tahap Dihargai	104
4.1.4 Proses Pelembagaan Tahap Ditaati	105
4.1.5 Proses Pelembagaan Tahap Menjadi Perilaku Bersama.....	108
4.2 Peran Pemerintah Daerah Penyelenggaraan PKBM Yabim.....	112
BAB 5 ANALISIS DINAMIKA PENGEMBANGAN	
KELEMBAGAAN	117
5.1 Awal Ide Berdiri (1994-1999)	117
5.2 Pengenalan Kepada Masyarakat(2000-2003).....	120
5.3 Periode Merintis(2003-2004)	122
5.4 Periode Pengakuan Secara Eksternal(2005-2006)	125

5.5	Perluasan Ruang Belajar (2007-2009)	133
5.6	Eksis Di Tengah-tengah Masyarakat(2010-Sekarang)	134
5.7	Pengembangan Kelembagaan PKBM YABIM	138
5.8	Universum Pengembangan Kelembagaan	139
5.9	Proses Formalisasi PKBM YABIM.....	143
5.10	Civil Society Dalam Kelembagaan PKBM YABIM	146
BAB 6 PENUTUP		149
6.1	Kesimpulan.....	149
6.2	Saran	152
DAFTAR PUSTAKA		154



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Kerangka Informan	16
Tabel 3.1 Data Perkembangan Siswa Sementara PKBM YABIM.....	90
Tabel 4.1 Proses Pelembagaan YABIM	115
Tabel 5.1 Struktur Kurikulum Paket C Program IPA.....	130
Tabel 5.2 Struktur Kurikulum Paket C Program IPS	131
Tabel 5.3 Tes Kelayakan Akademik Program Paket C	132
Tabel 5.4 Struktur Kurikulum SMP	132
Tabel 5.5 Struktur Kurikulum Paket A Setara SD	133
Tabel 5.6 Periode PembabakanSejarah YABIM.....	135

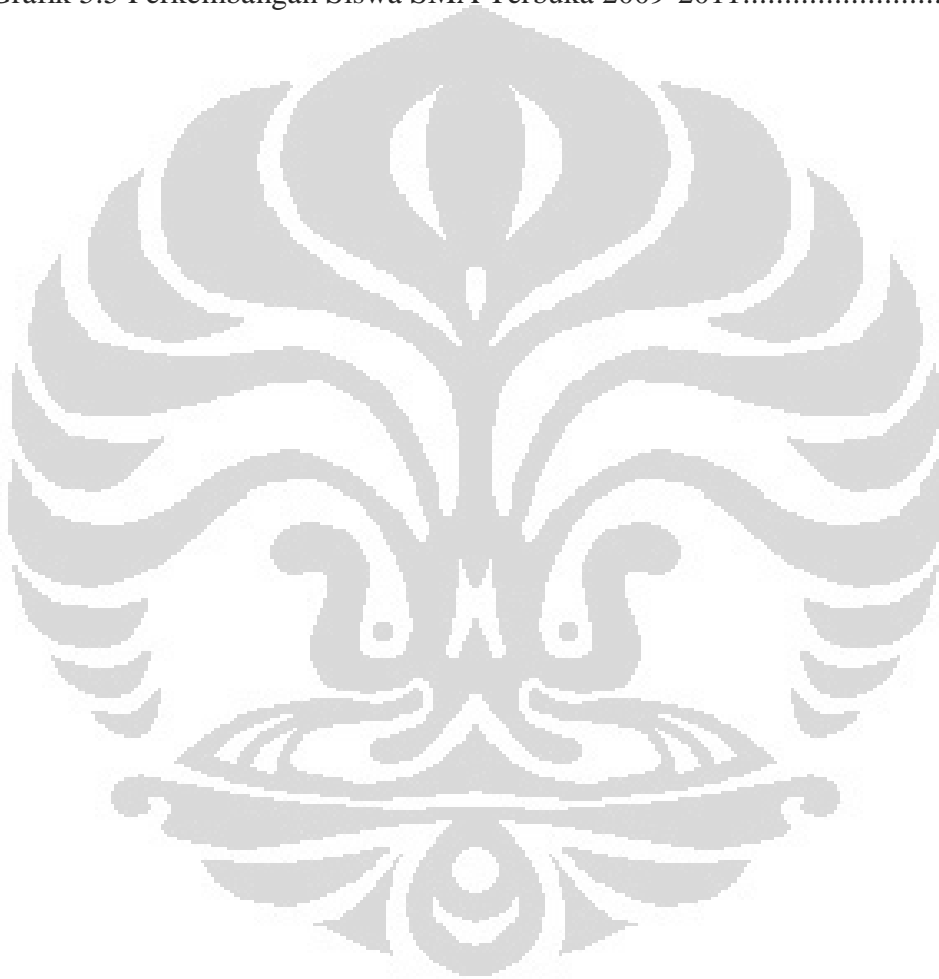


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Anak Jalanan Berhak Atas Masa Depan PKBM Yayasn Bina Insan mandiri	11
Gambar 2.1 Kelembagaan Dan Organisasi	44
Gamabr 2.2 Proses Pelembagaan	54
Gamabar 2.3 Universum Pengembangan Kelembagaan.....	57
Gambar 2.4 Skema Deskriptif Hubungan Antara Norma Dan Perilaku Sebagai Basis Kelembagaan Dengan Struktur Peran Supra- Struktur Organisasi Formal	62
Gambar 2.5 Lokasi Strategis Sekolah MASTER	70
Gambar 2.6 Stasiun Depok Baru	72
Gambar 2.7 Kondisi Di Belakang Sekolah MASTER Samping Terminal ..	72
Gambar 2.8 Wawancara Dengan Pak MAR	73
Gambar 2.9 Alur Pikir Penelitian	79
Gamabar 3.1 Denah Lokasi PKBM YABIM	82
Gambar 3.2 Peserta Didik Dan Para Tutor	83
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Yayasan Bina Insan Mandiri	93
Gambar 3.4 Perangkat Koordinator dan Relawan YABIM	95
Gamabar 4.1 Penjangkauan Anak Jalanan	97
Gambar 4.2 Tahap Dikenal Lewat Media Cetak	98
Gamabar 4.3 Wawancara Dengan Ibu SM.....	99
Gambar 4.4 Suasana Ketika Hari kemerdekaan	99
Gambar 4.5 Plangkat Di Samping Kelas Panggung	105
Gambar 4.6 Pendekatan YABIM kepada Warga Binaan.....	107
Gambar 5.1 Peserta Didik ketika Belajar Di Teras Masjid.....	120
Gambar 5.2 Kondisi Teras Masjid Yang Disekat Agar Terpisah Dari Kelas Yang Lain	121
Gambar 5.3 Proses Belajar-Mengajar Di Tahun 2003.....	123

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Perkembangan Peserta UNPK Paket A 2006-2011	127
Grafik 5.2 Perkembangan Peserta UNPK Paket B 2006-2011	128
Grafik 5.3 Perkembangan Peserta UNPK Paket C 2006-2011	128
Grafik 5.4 Perkembangan Peserta DKHUN SMP Terbuka 2008-2011.....	129
Grafik 5.5 Perkembangan Siswa SMA Terbuka 2009-2011.....	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana kita pahami bersama, pendidikan di masa sekarang ini merupakan kebutuhan yang teramat penting. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan manusia. “Kebutuhan dasar ini sejatinya harus terpenuhi dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya, karena hakikatnya pendidikan adalah sebuah instrumen yang paling efektif untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan” (Freire, 2000: 21). Setidaknya semangat seperti inilah yang dapat ditangkap dan menjadi acuan sekelompok komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar terminal Depok Baru untuk berjuang mengentaskan kaum yang termarginal. Untuk mencapainya tentu saja tidak semudah itu, pendidikan makin mahal dan makin tidak mampu dienyam bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pendidikan yang *notabene*-nya merupakan kewajiban yang harus diemban negara sesuai dengan amanat yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa salah satu tugas pokok Negara adalah “... mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (Mahkamah Konstitusi, 2005).

Untuk mencapai program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUD 1945, maka melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah mengalokasikan dana khusus pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan bahwa “Dana Pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Tidak disangkal lagi bahwa masalah alokasi anggaran pendidikan telah menjadi masalah yang cukup pelik di Indonesia. Secara relatif hal ini sangat terkait dengan persentase anggaran pendidikan kita yang sangat rendah dibandingkan dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu diperkirakan sekitar 1,27 persen rata-rata per tahun antara tahun 1990-1995, sementara Thailand tercatat sebesar 3,80 persen, Vietnam 2,32 persen, dan Malaysia sebesar 4,87 persen. Hal tersebut sangat berkorelasi dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia (Indeks Pembangunan Manusia = IPM) yang saat ini berada di peringkat 114, bandingkan dengan Malaysia yang berada di peringkat 61 (lihat UNDP/ UNESCO, 2008). Karena itulah, kemudian yang dilihat adalah alokasi anggaran pendidikan sebagai rasio dari total pengeluaran, dimana Malaysia telah mengalokasikan 20-25 persen pengeluaran ke sektor pendidikan, sementara Indonesia pada tahun anggaran 1999/2000 hanya sekitar enam persen, setelah tahun sebelumnya mencapai tujuh persen (Koster, 2004: 4). Karenanya, tidak mengherankan apabila Suryadi memetakan sebagai berikut: “Sekitar 80% hingga 90% sekolah masih pada tahap praformal yang artinya sekolah beroperasi di bawah standar nasional. Sekolah pada tahap formal adalah sekolah yang memiliki guru dan buku yang cukup. Pada kenyataannya, tidak

sampai 20% sekolah yang berada pada tahap formal dan transisional.” (Harian Waspada, 10 Mei 2005).

Diakui atau tidak, selama ini jumlah siswa yang terancam putus sekolah akan terus meningkat, khususnya siswa pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun. “Bank Dunia dalam laporannya mensinyalir bahwa dampak dari krisis ekonomi yang tidak kunjung usai bagi dunia pendidikan adalah anjloknya Angka Partisipasi Sekolah (APS), terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin serta merosotnya kualitas sekolah yang sebelum krisis sebetulnya sangat memprihatinkan” (Basrowi, 2006: 4). Sekalipun kita sepakat, siswa miskin perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan program pemberian subsidi pendidikan, tetapi untuk menentukan siapa siswa yang tergolong miskin tentunya membutuhkan parameter atau kriteria yang benar-benar jelas, agar dapat diperoleh data kelompok sasaran yang benar-benar akurat.

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nuansa “privatisasi” atau upaya pergeseran tanggung jawab pemerintah kepada swasta dan masyarakat secara perlahan-lahan terlihat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan, terutama pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun secara gratis dan bermutu, sudah terlihat dalam legalitas pendidikan. Peran serta masyarakat ini diantaranya didasari oleh kondisi semakin mahal biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, keterlibatan masyarakat ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa “*Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan*”, dan Pasal 12 ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang merasa prihatin dan turut bertanggung jawab atas fenomena sosial di Kota Depok terhadap permasalahan pendidikan, dimana ada banyak masyarakat Kota Depok yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal maka PKBM YABIM mulai berperan aktif untuk

memfasilitasi hal tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas. PKBM YABIM saat ini menampung sekitar 1.147 siswa, 425 orang diantaranya merupakan anak jalanan yang selain pendidikan mereka (anak jalanan), PKBM YABIM juga memenuhi kehidupan mereka seperti pangan, sandang dan papan mereka.

Seperti yang diketahui bahwa fenomena sesungguhnya anak jalanan merupakan peran dan tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Hal ini didasarkan pada misi Kementerian Sosial yaitu Indonesia Bebas anak Jalanan bahwa pada tahun 2014. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang merupakan program dari Kementerian Sosial ini, sampai pada tahun 2010 untuk anak jalanan baru menyentuh 5.119 anak atau 2,25 persen dari jumlah anak jalanan sebanyak 230.000 anak berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2009.

Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, memaparkan bahwa Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) menggunakan APBN sebesar Rp 3,4 miliar dengan melibatkan 36 rumah singgah dan 83 satuan bhakti pekerja sosial. Ditambah dengan dana dekonsentrasi sebesar Rp 5,1 miliar yang melibatkan 53 rumah singgah dan 63 pekerja sosial di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Depok, PKBM Yabim sebagai rumah singgah yang terpilih untuk Program Kesejahteraan Anak dan sekitar 91 anak yang mendapat santunan sebesar 1,8 juta pertahun. Sementara jumlah anak binaan PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) sekitar 425 anak jalanan jadi masih ada lebih dari 300 anak yang tidak mendapat santunan dari pemerintah dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) (Sunandar, 2012: 1).

Berdasar data tersebut di atas maka penyelenggaraan pendidikan yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan peran yang sudah ada secara lebih terarah dan terencana. Kepedulian masyarakat terhadap persoalan pendidikan diharapkan menjadi sangat tinggi dan mampu berperan aktif sesuai dengan tata laksana yang benar. PKBM YABIM telah hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sekolah gratis yang dapat merangkul masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat mengakses pendidikan terkhususnya bagi anak-anak jalanan yang kualitas pendidikannya tidak kalah jauh dengan sekolah

terbuka negeri lainnya. Ini sangatlah menarik untuk diteliti, bagaimana proses pelebagaan sekolah alternatif ini yang merupakan wujud dari *civil society* yang layak menjamur ditengah-tengah masyarakat di Indonesia.

Untuk itu penulis mengangkat judul "Proses Pelebagaan Sekolah Alternatif Studi Kasus PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM)" ini dimaksudkan untuk mengkaji proses pelebagaan pada sekolah alternatif yang diselenggarakan secara mandiri oleh warga masyarakat sebagai wujud dari *civil society*. Kajian tentang pengembangan kelembagaan (*institutional development*) dan proses pelebagaan (*institutionalization*) di masyarakat pernah dilakukan oleh Maulidiansyah (2002) dan Asri (2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiansyah (2002) dengan judul "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa" berusaha mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa. Dengan meneliti di dua lokasi, yaitu PKBM "At-Taqwa" Desa Dewasari dan PKBM "17 Agustus" Desa Pamalayan, keduanya di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Maulidiansyah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat belum terwujud dengan baik, serta program pendidikan yang disusun belum berdasarkan pada proses *assessment* dan identifikasi yang benar. Masyarakat secara umum masih menaruh ketergantungan yang cukup besar pada bantuan pemerintah, sementara di pihak pemerintah masih belum serius memperhatikan pengembangan PKBM. Semangat masyarakat untuk membekali dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang bisa membuat dirinya sejahtera sudah cukup tinggi, namun terhalang oleh sulitnya mendapatkan modal atau investasi (h. 1).

Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Christiyani (2011) dengan judul "Pengembangan Kelembagaan Lokal Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal di Kota Depok" ini dimaksudkan untuk mempelajari pengembangan kelembagaan lokal sebagai usaha kolektif kesatuan warga atau komunitas untuk mengadakan perubahan sosial secara terencana terhadap pola perilaku, nilai-nilai dan norma yang mengacu pada suatu inovasi tertentu dengan menciptakan perubahan pada sistem mikro dan sistem makro masyarakat (h. 1). Penelitian

tentang “Proses Pelembagaan Sekolah Alternatif Studi Kasus PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM)” ini mengambil *setting* kegiatan PKBM YABIM di Kota Depok merupakan pengembangan dari studi yang pernah dilakukan oleh Asri (2011).

Jika Christiyani (2011) fokus penelitiannya pada model pengembangan kelembagaan dari segi pendidikan. Pada penelitian “Proses Pelembagaan Sekolah Alternatif Studi Kasus PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM)” ingin menggambarkan proses pelembagaan suatu sekolah alternatif tidak hanya dibidang pendidikan saja, tetapi juga dibidang sosial, hukum serta kesehatan dan dalam proses pelembagaan PKBM YABIM sebagai wujud *civil society*. Seperti sedikit telah disinggung bahwa keberadaan PKBM YABIM ada di Kota Depok adalah karena keinginan komunitas lokal, yaitu komunitas di lingkungan terminal Depok Baru, sehingga lembaga ini bisa dikatakan eksis hingga sekarang dan (bahkan) semakin dikenal. Pengetahuan awal peneliti menunjukkan bahwa terdapat norma-norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata yang berpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial khususnya kebutuhan akan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di sekitar lingkungan terminal Depok Baru. Tema utama pendidikan inilah yang diorganisir dan dilembagakan oleh PKBM “YABIM”, disamping adanya program-program lain seperti kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, dan kesehatan.

Dalam kasus penyelenggaraan PKBM YABIM oleh PKBM “YABIM” alasan seperti ini juga disampaikan oleh Pak Nur Rochim --yang menjabat Ketua YABIM-- dan dirasakan sebagai pendorong dirinya untuk mendirikan sekolah gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Peran pendidikan yang awalnya merupakan kewajiban negara tetapi sekarang menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara. PKBM YABIM yang merupakan sebutan Sekolah Masjid Terminal yang terletak di terminal Depok Baru yang kini memiliki 11 ruang kelas belajar-mengajar (PAUD, SD, SMP, SMA), lima ruang kantor (SD, SMP, SMA, YABIM, Sekretariat), juga terdapat lima ruang lukis, ruang musik, ruang sablon, ruang untuk remedial, ruang rekaman, tiga ruang untuk asrama putra dan putri, dan satu klinik.

Berdirinya PKBM YABIM berawal dari pengalaman Nur Rochim kecil yang tinggal di lingkungan terminal. Dia lebih beruntung dibanding teman-temannya karena berhasil lulus dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jakarta, sedangkan teman-temannya hanya untuk makan saja harus bekerja keras. Karenanya, dia mengaku merasa prihatin melihat anak-anak usia sekolah berkeliaran di jalanan.

Tahun 1998, lokasi PKBM YABIM yang sekarang ini dulunya dijadikan tempat *tongkrongan*, karena letaknya berada di belakang masjid, agak menyempit, dan gelap. Bahkan, lokasi tersebut sering digunakan untuk tempat minum-minuman keras, bermain bilyar, dan tempat para preman dan copet berkumpul untuk berbagi barang hasil kejahatan. Sampai suatu saat Pak Nur Rochim datang ke Depok awal tahun 1999, dan bersama isterinya berjualan nasi rames serta mengumpulkan barang rongsokan. Dia melihat kondisi lokasi di belakang masjid sangat memprihatinkan, serta melihat banyaknya anak-anak yang mengamen tidak terurus dan tidak sekolah.

Melalui interaksi dengan mereka, Pak Nur Rochim melihat kemauan yang besar dari anak-anak tersebut untuk belajar. Melihat kemauan dan potensi mereka yang masih terpendam maka pada tahun 2000 dari menyisihkan hasil berjualan warung nasi dan usaha jual beli barang rongsokan, Pak Nur Rochim --dengan dibantu seorang temannya, Pak Purwandiono-- “membeli” tanah di belakang terminal tersebut, dan mendirikan sebuah *saung* yang digunakan untuk tempat belajar.

Beberapa bulan berlalu, berdirilah Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM), yang pendiriannya didasari oleh pandangan perlunya suatu wadah yang menaungi kegiatan yang sedang berjalan, yang salah satunya adalah kegiatan belajar. Sekolah --yang kemudian lebih dikenal dengan PKBM YABIM-- ini semakin lama semakin berkembang. Meskipun demikian, pada awalnya proses belajar-mengajar yang diterima anak-anak jalanan tersebut secara formal belum diakui karena belum ada ijazah atau tanda lulus lainnya. Karena itu, kemudian pengurus YABIM melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kota Depok --dalam hal ini Dinas Pendidikan-- dan mengusulkan agar anak-anak yang belajar di PKBM YABIM diakreditasi dan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapat ijazah.

Hingga pada akhir tahun 2004 yayasan ini baru mendapat pengakuan eksternal, dan secara formal YABIM disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berkompeten menyelenggarakan program-program PAUD, Paket A, Paket B, Paket C, serta Sekolah Terbuka tingkat SLTP dan SMA yang merupakan satu-satunya sekolah terbuka negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat. PKBM YABIM saat ini mendapat sokongan dana sebesar Rp 2-3 juta perbulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kategori sekolah terbuka. Dana diberikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan melalui sekolah induknya, yaitu SLTPN 10 Depok dan SMAN 5 Depok. Bantuan yang lainnya sebagian besar pendanaannya diperoleh dari donatur.

Minimnya fasilitas PKBM “YABIM” tidak menghalangi siswa-siswinya untuk mencetak prestasi gemilang. Tahun 2005 dan 2006, siswa PKBM menjadi juara 1 (satu) lomba Menulis Surat Untuk Presiden dan juara harapan I dan II Olimpiade Matematika SD. Dan, pada tahun 2008, tiga orang murid dari sekolah PKBM “YABIM” berhasil lolos Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diterima di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI). Berbagai prestasi yang diraih tersebut membuktikan keberhasilan PKBM “YABIM” dan membuktikan bahwa pendidikan tidak harus digapai dengan biaya yang mahal. Pendidikan “bermutu” dapat juga dinikmati oleh masyarakat dari golongan ekonomi lemah.

Kontribusi PKBM “YABIM” terhadap proses pendidikan di Kota Depok sungguh telah memberikan inspirasi bagi para *stakeholder* pendidikan untuk turut terlibat dalam penciptaan ruang-ruang pembelajaran dan pendidikan, khususnya bagi mereka yang jauh dari akses pendidikan. Peran lembaga pendidikan yang berbasis komunitas sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan *civil society*.

1.2. Fokus Permasalahan

Pendidikan formal yang mahal dan tidak menjangkau masyarakat kalangan menengah kebawah, mendorong lahirnya sekolah-sekolah alternatif di Indonesia. Sekolah alternatif yang merupakan jalur pendidikan non formal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan

layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal.

Salah satu bentuk pendidikan non formal yang dapat diusahakan oleh masyarakat adalah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan kebijakan pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang tepat bagi masyarakat yg tidak mampu. PKBM mulai berkembang pesat sejak tahun 2000 yang kini sudah mulai tersebar diberbagai provinsi di Indonesia. Tetapi dalam praktiknya banyak juga PKBM yang bermasalah yang melakukan kecurangan dilapangan. Seperti halnya yang ditemukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok menemukan sebuah PKBM ilegal yang memungut biaya Rp 700 ribu per siswa yang hendak mengikuti program Paket B atau Paket C.

"Kita sudah menemukan PKBM ilegal tersebut, namanya PKBM Cerdas yang diselenggarakan di SMPN 4 Depok," ungkap Tuti Roeheti, kepala Seksi Bina Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Kota Depok, Jumat (7/7). (Disdik Depok Temukan PKBM Ilegal, 2011: 1).

Lebih lanjut ia menegaskan agar bagi para orang tua atau siswa yang tidak berhasil lulus Ujian Nasional, diminta untuk hati-hati saat memilih Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Menurut Dinas Pendidikan Kota Depok, Asep Rahmat menjelaskan, sebanyak 1.507 siswa paket C yang mengikuti ujian peserta itu terdiri dari 23 PKBM dari total 41 PKBM. Dalam ujian tersebut mereka terbagi tiga kelompok IPA, IPS, dan SMK (Sebanyak 1400 Siswa Di 25 PKBM Akan Mengikuti Ujian Paket C, 2011: 1).

Ini berarti sekitar 18 PKBM atau setengah dari total PKBM yang ada di Kota Depok yang tidak menyertakan anak didiknya untuk mengikuti ujian nasional. Ini menandakan adanya ketidakseriusan PKBM-PKBM dalam menyelenggarakan pendidikan alternatif ini dan keberadaannya menjadi tanda tanya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Sumatera Utara, Drs. Ali Ishak Dalimunthe agar masyarakat luas berhati-hati dan arif dalam memilih pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C.

"Imbauan ini terkait dengan banyaknya permasalahan legalitas ijazah pendidikan kesetaraan tersebut, maka masyarakat diminta selektif betul dalam memilih penyelenggara pendidikan kesetaraan ini, jangan karena diiming-imingi dengan berbagai macam kemudahan lalu tanpa melihat keberadaan lembaganya lalu langsung masuk saja," kata Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Sumatera Utara didampingi sekretaris, pada Analisa, Selasa (6/9) di kantornya Jalan Pertiwi Medan.

Ditegaskan Ali Ishak, meskipun lembaga memacu pertumbuhan PKBM di setiap daerah namun harus taat aturan dalam melaksanakan program, tidak serta merta PKBM dapat melaksanakan program kesetaraan (Pendidikan Gratis Hanya Janji, 2012: 1).

Kehadiran sekolah alternatif yang seyogianya merupakan kebutuhan dari masyarakat hendaknya keberadaannya mendapat pengakuan dan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mengejar kuantitas melainkan kualitas peserta didiknya. Harus taat aturan dalam melaksanakan program, tidak serta merta PKBM dapat melaksanakan program kesetaraan. Hal inilah yang tergambar dari sekolah alternatif PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM). PKBM yang sudah dikenal di tahun 2000-an di dalam proses pelebagaannya memerlukan waktu yang lama dan melewati beberapa tahap pelebagaan. Ditahun 2005 PKBM YABIM baru mendapatkan pengakuan eksternal dan tahun 2006 sudah meluluskan peserta didiknya dengan mengantongi ijazah. Dan sampai saat ini PKBM YABIM telah meluluskan 349 peserta didik Paket A, 1.092 peserta didik Paket B, serta 1.209 peserta didik Paket C. Tidak sebatas disitu PKBM YABIM tidak main-main dalam menyelenggarakan pendidikan, PKBM tersebut juga menghendaki kualitas lembaga pendidikannya ini terbukti dari penghargaan yang diberikan yaitu juara satu lomba PKBM tingkat Jawa Barat di tahun 2008. Dan tahun ini PKBM Bina Insan Mandiri kembali lagi akan mewakili kota Depok untuk mengikuti lomba penyelenggaraan PKBM berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Barat (Camat Pancoran Mas Di Sekolah Master, 2012: 1).



**Gambar 1.2 Anak Jalanan Berhak Akan Masa Depan
PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri**

Sumber: Warta Depok Desember 2011

Penelitian tentang “Proses Pelembagaan Sekolah Alternatif (Studi Kasus PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM))” ini diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak bagi lahirnya sekolah-sekolah alternatif berbasis komunitas di Indonesia. Penelitian ini akan melihat proses-proses pelembagaan yang terjadi pada PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri. Untuk itu, penelitian ini akan fokus kepada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelembagaan PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri dan peran Pemerintah Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan kegiatan PKBM?
2. Bagaimanakah upaya pengembangan pelembagaan PKBM YABIM?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pelembagaan PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri dan peran dari Pemerintah Daerah.
2. Mendeskripsikan upaya pengembangan pelembagaan PKBM YABIM.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat. Bagi insan akademis (teoritis) maupun secara umum bagi masyarakat (praktis). Manfaat tersebut antara lain:

a. Manfaat Akademik:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi wacana diskusi didunia pendidikan khususnya dilingkungan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya terkait dengan pendalaman dan pengkayaan referensi bagi kajian pengembangan kelembagaan lokal dalam mewujudkan *civil society* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah Kota Depok dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pemacu bagi para stake holder lainnya untuk mendorong lahirnya kelembagaan-kelembagaan lokal dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat komunitas.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah alur sejarah (*timeline*). Pengertian *timeline* adalah teknik penelusuran alur sejarah masyarakat dengan menggali kejadian penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu, karena pendekatan ini dianggap relevan dalam meneliti proses kelembagaan lokal yang dipilih dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat di dalam kegiatan mereka. Secara umum dapat dimengerti bahwa pendekatan alur sejarah merupakan penelaahan dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai satu kejadian dan dilaksanakan secara sistematis.

Pendekatan penelitian ini dipilih karena beberapa kelebihan dari pendekatan penelitian melalui alur sejarah (*timeline*) antara lain:

- a) teknik dapat menggali perubahan-perubahan yang terjadi, masalah-masalah, dan cara menyelesaikannya dalam masyarakat secara kronologis;

- b) teknik ini dapat memberikan informasi awal yang bisa digunakan untuk memperdalam teknik-teknik lain;
- c) sebagai langkah awal untuk teknik *trend and change*;
- d) dapat menimbulkan kebanggaan masyarakat di masa lalu;
- e) dengan teknik ini masyarakat merasa lebih dihargai sehingga hubungan menjadi lebih akrab; dan
- f) dapat untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara berbagai kejadian dalam sejarah kehidupan masyarakat, seperti; perkembangan desa, peran wanita, kondisi lingkungan, perekonomian, kesehatan atau perkembangan desa, peran wanita, kondisi lingkungan, perekonomian, kesehatan atau perkembangan penduduk. (SUSDEC, 2005: 1)

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Arikunto (2002) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bisa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun, penggunaan angka-angka bukannya mutlak tidak boleh, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal tertentu seperti jumlah penduduk di suatu wilayah, banyaknya keuntungan yang didapat dari industri rumah tangga, dan lain-lain (h.10). Arikunto (2002) membahas tentang kualitatif naturalistik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami dan peneliti terlibat secara langsung di lapangan (h.11).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pertama, penelitian ini bersandar pada kekuatan naratif atau penjelasan verbal mengenai proses pelebagaan yang terjadi pada PKBM YABIM dan bagaimana wujud dari *civil society*. Kedua penelitian ini apa adanya, artinya unsure manipulasi sebisa mungkin dihindari dan fokus penelitian studi pelebagaan pada PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri dilihat dari konteks alamiah. Ketiga, analisis induktif digunakan karena metode pengambilan data diambil melalui wawancara secara mendalam dan pertanyaan yang diajukan secara terbuka, dimana yang

diwawancarai bebas menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pemaknaan yang dimaknai. Ketiga alasan di atas diperkuat oleh penjelasan Patton (1991) bahwa strategi metode yang ideal yang khas dari kualitatif terdiri dari tiga bagian: (1) data kualitatif, (2) penyelidikan naturalistik dan (3) analisis secara induktif atau berdasarkan kasus (Arikunto, 2002: 105).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena alam studi pelebagaan Sekolah Alternatif PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri merupakan suatu proses perubahan perilaku yang kompleks, sehingga tidak ada pembatasan pada produk akhir. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mencari jawaban tentang bagaimana proses pelebagaan pada PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri sehingga untuk memaknai kegiatan ini mesti dilaksanakan melalui wawancara dan mengamati secara mendalam latar alamiah agar memperoleh gambaran baik dari lingkungan sekitar PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri sehingga jawaban diperoleh dapat akurat.

1.5.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Neuman (2000) menjelaskan “*Descriptive research presents a picture of the specific details of the situation, social setting, or relationship*” (h. 21-22). (Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran detail yang spesifik dari situasi, seting sosial, atau hubungan). Ditambahkan juga bahwa dalam penelitian deskriptif, seorang peneliti memulai suatu penelitian dengan subyek yang telah didefinisikan dengan baik kemudian melakukan penelitian untuk menguraikannya secara akurat. Alasan pemilihan jenis penelitian deskriptif karena hasilnya berupa gambaran yang detail tentang subjek penelitian atau proses pelebagaan pada PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri.

1.5.3. Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian ini penentuan informan menggunakan model *purposive*. *Purposive* adalah pemilihan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, *random*, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya

tujuan tertentu (Arikunto, 2006: 228). Dasar dari pemilihan informan adalah individu-individu yang mengetahui dan memahami tentang proses pelebagaan PKBM YABIM.

Selain itu teknik pemilihan informan juga dilakukan melalui *snowball sampling* yang disebut juga *network* (jaringan), *chain referral* (penunjukan secara berantai) atau *reputational* (reputasional). Adapun teknik ini dipilih untuk memilih informan untuk orang tua. Menurut Neuman (2000) *snowball sampling* adalah :

“A method for identifying and sampling (or selecting) the cases in a network. It is based on an analogy to a snowball, which begins small but becomes larger as it is rolled” (h.199). (Suatu metode untuk mengidentifikasi dan memilih kasus-kasus dari sebuah jaringan. Hal ini didasarkan pada analogi bola salju, sampel dipilih mulai dari yang kecil dan kemudian menjadi lebih besar).

Pada penelitian ini informan pertama adalah Pendiri PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) yang merupakan kunci dari sejarah berdirinya PKBM YABIM. Informan yang kedua adalah tutor PKBM YABIM yang dianggap mengetahui perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Informan yang ketiga adalah murid dari PKBM YABIM yang merupakan adik dari alumni yang pernah bersekolah di PKBM YABIM. Informan keempat dari Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai penyelenggara Pendidikan Non Formal serta dari Dinas Sosial yang selama ini ikut campur dalam menangani anak jalanan yang merupakan binaan dari PKBM YABIM.

Informan yang berikutnya berasal dari masyarakat yang mula-mula tinggal di daerah Terminal Depok. Awalnya Pendiri PKBM (NUR) memberikan referensi dua orang yaitu Pak HJ (Ketua RT 04) dan juga Pak MT yang merupakan warga yang sudah dari tahun 2005 tinggal di lingkungan PKBM YABIM. Dari kedua nama tersebut lalu mengalirlah informan-informan yang lain berdasarkan referensi dari kedua informan yaitu Pak HJ dan Pak MT (teknik *snowball*). Jumlah informan yang tak terbatas, sehingga informasi yang didapat saat wawancara sampai pada titik jenuh karena jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang

sama dari wawancara informan sebelumnya sehingga diambil 4 orang warga yang terlibat dan memahami betul sejarah dan pelebagaan PKBM YABIM dan mewakili semua jawaban informan yang lain.

Tabel 1.1 Kerangka Informan

NO	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN		INFORMAN	JML
1.	Diskripsi proses pelebagaan terjadi di PKBM “YABIM”.	• Ide dan gagasan terbentuknya PKBM “YABIM”	• Pendiri PKBM YABIM. (Nur Rohim)	1
		• Bagaimana proses pelebagaan terjadi, kendala apa yang dihadapi.	• Masyarakat yang tinggal di lingkungan Terminal	4
			• Tutor di PKBM YABIM	3
			• Relawan di PKBM YABIM	2
			• Siswa yang masih bersekolah di PKBM YABIM	2
2.	Diskripsi dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan di PKBM “YABIM”	Peran pemerintah daerah dalam proses pelebagaan PKBM “YABIM”.	Dinas Pendidikan Kota Depok.	2
Jumlah keseluruhan				14

Sumber: telah diolah kembali

1.5.4. Unit Analisis

Penelitian ini memfokuskan untuk mendiskripsikan proses-proses pelebagaan pada PKBM “YABIM”, khususnya menjawab bagaimana proses-proses yang dijalani, kendala dan tantangannya serta strategi yang dijalankan untuk membentuk kelembagaan pada sekolah tersebut. Berbagai data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut kemudian akan diuji dan diklarifikasi dengan teori-teori untuk menganalisis dan merumuskan hasil penelitian.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Ada berbagai metode yang kita kenal antara lain wawancara, pengamatan (observasi), kuesioner atau angket, dan dokumenter. Untuk data historis tidak bisa ditemukan secara observasi, tetapi dimungkinkan dengan dokumenter dan wawancara (Gulo, 2000: 115).

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Studi Literatur dan Dokumentasi.

Studi literatur dan dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, undang-undang, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Penulis juga mengutip pendapat para ahli/pakar sesuai dengan bahan yang diperlukan baik melalui buku, jurnal, media cetak maupun internet dan referensi dari skripsi serta tesis yang membahas tentang pelebagaan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dalam rangka mengumpulkan data yang lebih konkrit dan mendalam. Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara semi terstruktur karena dalam riset kualitatif sering dipakai sebagai metode pokok dengan maksud untuk menggali jawaban, pedoman pertanyaan digunakan pada saat proses penggalian informasi dilakukan. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka dengan maksud agar *interviewee* dapat dengan bebas memahami dan memaknai setiap pertanyaan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pemahamannya. Karena dalam wawancara

sumber datanya adalah manusia, maka digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Untuk keperluan itu peneliti menggali informasi dari pejabat-pejabat yang berwenang seperti dari Pemerintah Kota Depok dan pendiri PKBM “YABIM”, para pengajar atau anak didik yang secara langsung terkait dengan sekolah dan masyarakat setempat yang mengetahui proses berdirinya PKBM “YABIM”. Pertanyaan-pertanyaan lebih dalam berkembang dengan sendirinya dalam wawancara tersebut.

1.5.6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dari data-data yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, data yang sudah terkumpul dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Moleong (2006:280) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini mengikuti proses analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Irawan, (2006:89), yaitu: pertama, dilakukan pengumpulan data mentah, pada tahap ini dilakukan melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, kajian dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan pencatatan dengan apa adanya di lapangan, dan rekaman. Pada tahap kedua, dilakukan transkrip data tahap ini adalah tahap untuk memindahkan data-data rekaman atau hasil wawancara ke dalam bentuk tertulis (narasi). Tahap ketiga, adalah pembuatan koding tahap ini penulis membaca ulang secara hati-hati dan teliti seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu, penulis akan berupaya menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut kemudian diambil kata kuncinya, dimana kata kunci itu akan diberi kode. Tahap keempat, adalah kategori data, tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”. Tahap kelima, adalah menyusun kesimpulan sementara, yaitu menyimpulkan sementara hasil yang ada berdasarkan data. Tahap terakhir, keenam, adalah Triangulasi. Triangulasi adalah cara untuk

mengecek kebenaran (*truthworthiness*), mengurangi bias dan kesalahan data perlu menggunakan “teknik triangulasi” atau pemeriksaan silang *check & recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

1.6. Hambatan Penelitian

Penelitian lapangan dilaksanakan selama 6 bulan, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan antara lain:

- 1) Penggunaan identitas peneliti sebagai tenaga kerja yang ditempatkan di PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri oleh Kementerian Sosial pada tahap awal untuk menjalin komunikasi dengan informan. Hal ini menyebabkan pada tahap awal pelaksanaan penelitian di lapangan informan memberikan informasi secara normatif dengan artian informan memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan program bukan kenyataan. Namun setelah tercipta komunikasi yang baik dan informan memahami bahwa tujuan penelitian untuk penulisan tugas akhir informan mulai terbuka dan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan.
- 2) Beberapa informan yang berasal tokoh masyarakat bersikap sentimen seringkali memberikan informasi di luar fokus penelitian misalnya mengenai keberadaan penduduk yang tidak jelas yang tinggal di sekitar PKBM YABIM, anak binaan yang suka mengganggu kenyamanan warga sehingga peneliti harus senantiasa mengingatkan kembali maksud dan tujuan penelitian.
- 3) Karena ini penelitian mengenai alur sejarah terkadang informan lupa dan waktu lama untuk mengingat-ingat kembali
- 4) Pada informan, dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang sulit untuk ditemui dan data statistik mengenai kelulusan yang sulit untuk didapat.

1.7. Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian

Untuk meningkatkan kualitas penelitian menurut Moleong (2006) dilakukan dengan cara mengikuti teknik-teknik peningkatan kualitas penelitian dalam penelitian kualitatif yakni sebagai berikut (h. 324-325):

- 1) Derajat kepercayaan (*credibility*) yaitu pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Derajat ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.
- 2) Keteralihan (*transferability*) berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam keadaan khalayak sasaran yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada unit analisis. Untuk melakukan keteralihan tersebut, seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.
- 3) Konteks kebergantungan (*dependability*) merupakan substitusi istilah reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Konsep kebergantungan lebih luas dari konsep reliabilitas, karena konsep ini memperhitungkan segala-galanya yaitu yang terdapat pada reliabilitas ditambah dengan faktor-faktor lainnya.
- 4) Kriteria kepastian (*confirmability*) berawal dari konsep objektivitas versi non kualitatif yaitu menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pemahaman satu orang adalah subjektif dan jika sudah merupakan kesepakatan beberapa atau banyak orang baru bisa dikatakan objektif

1.8 Sistematika Penulisan.

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pertama pada penelitian ini menyampaikan tentang kondisi pendidikan di Indonesia yang semakin hari tidak mampu menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan selayaknya bukan hanya menjadi beban dari pemerintah tetapi menjadi kewajiban dari seluruh komponen bangsa untuk mendukung dan mengupayakan adanya ruang-ruang pembelajaran dan pendidikan khususnya untuk anak usia sekolah.

Lahirnya berbagai sekolah yang berbasis komunitas di beberapa tempat merupakan salah satu jawaban dari berbagai permasalahan pendidikan di

Indonesia. Bagaimana eksistensi PKBM “YABIM” terjaga dan meningkat kualitasnya. Maka penelitian ini akan melihat dan mendokumentasikan proses-proses tersebut.

2. Bab II: Kerangka Pemikiran

Bab ini akan menyampaikan teori pelebagaan, teori pembangunan sosial, *civil socety*, teori pemberdayaan teori tentang lembaga pendidikan serta beberapa teori lain yang menunjang untuk menganalisis penelitian ini.

3. Bab III: Profil PKBM “YABIM”:

Bab ini akan menyampaikan tentang profil dari PKBM “YABIM”, terdiri dari lokasi, bentuk kelembagaan, proses belajar mengajar/ berbagai prestasi yang didapat. Dan berbagai hal yang bisa menggambarkan tentang PKBM “YABIM”.

4. Bab IV: Hasil Temuan Lapangan

Pada bab ini akan disampaikan hasil wawancara dan dokumentasi informasi terkait dengan proses pelebagaan yang terjadi di PKBM “YABIM”

5. Bab V: Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas berbagai temuan lapangan dari penusuran data baik data primer maupun sekunder. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan gugus teori yang sudah disampikan pada Bab 2.

6. Bab VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi, yakni tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan, serta saran yang dapat direkomendasikan dari hasil analisis yang dilakukan.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1. Pembangunan

Istilah “pembangunan” pada mulanya adalah sekadar terjemahan dari bahasa Inggris *development*. Menurut Wiradi (2000) makna pembangunan mengacu pada tiga hal antara lain: “a). membangkitkan semangat kemandirian, membangun jiwa merdeka, membebaskan diri dari mentalitas bangsa penjajah, b). membangun susunan masyarakat baru yang bebas dari penindasan, adil dan demokratis, c). membangun secara fisik, bagi kesejahteraan rakyat” (h.152). Sedangkan Todaro dan Smith (2006) “tujuan pokok yang harus difasilitasi pemerintah melalui pembangunan untuk setiap individu masyarakatnya setidaknya ada tiga hal yaitu: kecukupan, harga diri dan kebebasan dari sikap menghamba” (h. 27-28).

Meski demikian, istilah ‘pembangunan’ saat ini banyak orang mengkonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diawali oleh proses industrialisasi. Juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup modern dan perilaku masa kini. Sehingga pembangunan seringkali di asosiasikan dengan perubahan ekonomi, pembangunan berarti kemajuan ekonomi.

Dengan sempitnya pemahaman tersebut maka dalam pembangunan ada suatu istilah yang dikenal dengan nama pembangunan terdistori. Pembangunan terdistori adalah pembangunan yang menyimpang dari tujuan pembangunan, yaitu menghadirkan kesejahteraan manusia, dimana pembangunan hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Dampaknya adalah perumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan. Kegagalan tersebut bukan pada pembangunan tapi pada kegagalan dalam mengharmonisasikan tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi dan juga kegagalan dalam keuntungan ekonomi yang menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Contohnya terjadi di Amerika dan Inggris, bahwa kedua negara ini memiliki standar hidup yang tinggi, tetapi masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut. Daerah Mississipi

merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan dan angka kematian bayi yang termasuk tertinggi di Amerika Serikat bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara dunia ketiga.

Dalam pembangunan yang terdistorsi juga terjadi diskriminasi etnis dan ras, dimana masyarakat yang minoritas tidak banyak mendapat kesempatan-kesempatan yang dapat meningkatkan standar hidup, masih adanya penindasan terhadap kaum perempuan, dan terjadinya degradasi lingkungan dalam proses pembangunan yang dijalankan dimana pembangunan dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam. Pembangunan terdistrosi juga berkaitan dengan pendanaan militer yang berlebihan.

Bagi sebagian orang, istilah pembangunan berkonotasi pada sebuah proses perubahan ekonomi yang dibawa oleh proses industrialisasi. Istilah ini juga dapat mengandung arti sebuah proses perubahan sosial yang dihasilkan dari urbanisasi, adopsi gaya hidup modern dan perilaku masa kini. Selanjutnya, istilah ini juga memiliki konotasi kesejahteraan yang menawarkan bahwa pembangunan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan mereka, memperbaiki kondisi pemukiman dan kesehatan mereka (Midgley, 2005: 3).

Pemahaman pembangunan dikembangkan oleh ilmuwan sosial lain yang mempunyai pemahaman yang luas dan mempunyai pengaruh kuat, yaitu Sen (1999), mendefinisikan “pembangunan sebagai pemerdekaan manusia atau *development as freedom*. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati” (h. 5). Sementara Todaro & Smith (2004), memahami pembangunan merupakan “suatu *kenyataan* fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik”. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apapun komponen spesifik atas kehidupan yang serba lebih baik, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (h. 28).

Jika Sen (1999) memahami pembangunan sebagai proses membuka beban yang membuat manusia tidak mampu mengembangkan kapasitasnya (*unleashing the hidden capacity of the human being*), maka Todaro & Smith (2004) mempunyai pemahaman yang sama namun lebih praktikal dengan memberikan indikator-indikator di mana kapasitas yang dimaksud berkenaan dengan tingkat kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Pemahaman bahwa pembangunan bersifat multidimensi dan merupakan perjalanan berjenjang, sebagaimana dikemukakan Sen (1999) dan Todaro & Smith (2004), merupakan pemahaman pembangunan yang universal dan diterima secara luas. Sebagai pembanding, dapat disimak pemahaman pembangunan dari salah satu eksponen Orde baru, Moertopo (1982) yang mengemukakan bahwa:

Pembangunan adalah proses pertumbuhan satu atau beberapa indikator kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan proses dan melibatkan perubahan-perubahan, termasuk pembaharuan di berbagai kehidupan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pembangunan yang seutuhnya, artinya perubahan harus terjadi dalam lingkup perubahan integral dan bukan hanya sebatas pada beberapa aspek kehidupan. Ia meliputi aspek sosio-kultural dan mencakup aspek teknis, ekonomis, politis dan lain-lain (h. 29).

Dari beberapa pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan selain merupakan proses menuju kehidupan yang lebih baik, melalui proses pembelajaran dan pentahapan, pembangunan merupakan sebuah proses perubahan sosial yang direncanakan oleh pemerintah yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam rangka membangun kesejahteraan bagi rakyatnya.

2.1.1 Pembangunan dalam Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial bukan pada kegiatan-kegiatan amal yang dilakukan kelompok-kelompok pilihan filantropi tropi, juga bukan bantuan publik yang diberikan pemerintah. Kesejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami kesejahteraan sosial.

Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen. *Pertama*, sejauh mana masalah-masalah sosial diatur. *Kedua*, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan sosial dipenuhi dan *ketiga*, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Semua lapisan masyarakat memiliki apa yang disebut dengan masalah sosial namun tergantung pada bagaman mereka mengatur masalah-masalah tersebut. Contohnya; konflik dapat ditangani dengan baik oleh beberapa keluarga namun pada keluarga lain bisa saja menghancurkan hubungan, terkadang keluarga bisa bercerai akibat dari ketidakmampuan dalam mengatur kemampuan. Ketidakmampuan dalam mengatur masalah-masalah sosial melahirkan kondisi yang disebut '*social tillfare*' atau penyakit sosial.

Semua manusia memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar manusia dapat mencapai kondisi yang dimaksud kesejahteraan sosial (*social contentment*). Kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada.

Kesejahteraan dalam arti luas menurut Adi (2008) "mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual" (h. 44).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Selanjutnya masih dalam konsep kesejahteraan sosial (*welfare*) yang merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005) bahwa kesejahteraan sosial mengandung empat makna :

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal (*personal social service*).
3. Sebagai tunjangan sosial, khususnya Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) dan menyelenggarakan pelayanan sosial (pengertian kedua dan ketiga) (Suharto, 2007: 104-105).

Ini sejalan dengan kondisi kesejahteraan sosial menurut Midgley (2005) yang diciptakan atas kompromi 3 (tiga) elemen, terdiri dari:

Pertama, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur. *Kedua*, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan *ketiga*, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen itu berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas bahkan seluruh masyarakat yang ingin menikmati apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial (h. 21).

Adapun dalam konteks kabupaten/kota, rute peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut Eko (2006) dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sangat beragam, yaitu :

1. Kebijakan atau program yang mengarah pada pengurangan kemiskinan secara langsung, seperti program P2KP.
2. Pengembangan atau pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan dana bergulir, koperasi, industri kecil, pasar tradisional, pertanian organik, agrowisata.
3. Kebijakan atau program jaminan sosial melalui perbaikan pelayanan publik, seperti pemberian pelayanan gratis di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan administrasi.
4. Kebijakan atau program alokasi dana desa (ADD) yang secara umum berorientasi pada penguatan ekonomi desa (Suharto, 2007:184-185).

2.1.2 Perspektif Institusional dan Campur Tangan Negara

Perspektif institusional berpendapat bahwa institusi sosial yang berbeda termasuk negara, pasar dan masyarakat dapat dimobilisasi untuk mengangkat tujuan pembangunan sosial. Pandangan ini berpendapat bahwa pendekatan strategis berbeda dengan pembangunan sosial bergantung pada salah satu dari institusi yang ada oleh karena itu tidak menggunakan pada salah satu dari institusi yang ada dan mereka oleh karena itu tidak menggunakan semua intervensi yang ada untuk mengangkat kesejahteraan manusia. Pendekatan ini percaya bahwa semua strategi ini berusaha mengharmonisasi semua strategi yang berbeda dan memfasilitasi implementasi mereka dengan cara yang beriringan. Oleh karena itu pandangan ini dilihat sebagai sebuah pendekatan yang strategis yang berusaha menggabungkan intervensi pembangunan sosial yang berbeda.

Perspektif ini membutuhkan pemerintah untuk memainkan peran aktif dalam mengatur dan mengkoordinasi implementasi yang berbeda. Pemerintah seharusnya secara aktif mengarahkan proses pembangunan sosial dengan cara memaksimalkan partisipasi masyarakat, pasar, dan individu. Selain memfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga seharusnya memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sosial lewat bermacam kebijakan dan program sektor publik (Midgley, 2005: 205).

Perspektif institusional membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggung jawab untuk mengatur usaha pembangunan sosial yang dan mengharmonisasikan implementasi dari berbagai pendekatan strategi yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinasi pada tingkat nasional. Mereka juga harus memperkerjakan tenaga spesialis yang telah terlatih dan terampil untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial.

Perspektif institusional berdasar pada posisi ideologis yang mengangkat pluralisme dan mengakomodasi paham yang berbeda. Paham ini terinspirasi oleh paham 'jalan tengah' yang berkompromikan ide yang berbeda pada pemikiran politik Barat. Hasil kerja mereka terlihat pada munculnya pendekatan konseptual pada ilmu sosial seperti paham Keynesianisme, Welfarisme dan Institusionalisme.

Beberapa penganut paham institusionalisme lebih dipengaruhi oleh ideologi kolektivisme dan intervensionisme statisme daripada tradisi reformis liberal. Mereka termasuk R.H Tawney, Richard Titmus, dan Gunnar Myrdal dan banyak lainnya. Penganut paham institusionalis yang paling terkenal adalah Gunnar Myrdal yang memainkan peran kunci dalam menformulasikan pendekatan terpadu milik PBB dalam perencanaan pembangunan. Karena usaha keras nya memperkenalkan paham institusionalisme ini, Myrdal sering sekali disebut pemimpin pergerakan neo-institusionalisme. Myrdal mendukung sumbangannya pada sosialisme demokratik Swedia juga pada komitmennya pada persamaan, solidaritas dan nilai sosial lainnya (Midgley, 2005: 211).

Tulisan Myrdal (1968; 1970) ini juga memperlihatkan komitmen yang kuat pada paham egalitarianisme. Komitmen ini jelas terinspirasi oleh pergerakan sosial demokrat Swedia yang menekankan pada perbedaan kelas di masyarakat. Myrdal (1968;1970) berpendapat bahwa:

Masalah ketidakmerataan adalah hambatan besar pada kemajuan ekonomi dan sosial di dunia ketiga dan pengikisan ketidakmerataan adalah hambatan besar pada kemajuan ekonomi dan sosial di dunia ketiga dan pengikisan ketidakmerataan ini merupakan kondisi awal dalam suatu pembangunan. Perbedaan kelas dan kasta yang sudah mendalam dimasyarakat, ketidakmerataan dalam distribusi lahan, pembagian antara pedesaan dan perkotaan, penindasan terhadap perempuan dan akses yang tidak sama terhadap layanan sosial kesemuanya harus disentuh (Midgley, 2005: 213).

Selanjutnya, beberapa penganut neo-institusionalis tidak menekankan pada pentingnya strategi egalitarian. Streeten dan rekannya (1981) berpendapat bahwa “pengikisan ketidakmerataan bukanlah syarat utama dalam pembangunan, karena kebutuhan dasar harus menempati prioritas utama” (Midgley, 2005: 213). Walaupun Streeten (1981) ini bukanlah penganut paham neo-institusionalis dan dia memiliki pemikiran yang sama dengan Myrdal (1968; 1970). Ia berbeda pada aliran besar paham ini dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih pragmatis, empiris dan menekankan egalitarianisme (Preston, 1982). Tetapi penyediaan kebutuhan dasar ini memerlukan perencanaan implementasi program oleh para administrator terlatih dan akhirnya hadirnya pemerintahan pusat yang kuat dengan sumber dan niat yang kuat untuk memecahkan masalah sosial (Midgley, 2005: 213).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan didefinisikan oleh Lasswell & Kaplan, sebagai “..... *a projected program of goals, values, and practices*” (Islamy, 2004: 15), atau suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Definisi berikutnya dikemukakan Jones (1996), yang menyatakan: “*Policy is defined as a standing decision characterized by behavioral consistency and repetiveness on the part of both those who makes it and those who abide by it*” (Islamy, 2004: 41). Dari dua pendapat ini dapat dipahami bahwa kebijakan adalah keputusan yang dilaksanakan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Jones (1984), istilah “kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari, namun untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan-tujuan (*goals*), program, keputusan-keputusan (*decisions*), standar, proposal dan *grand design*” (Islamy, 2004: 25). Sedangkan menurut pandangan Syahrir (1988), istilah “kebijakan publik” (*public policy*), atau seringkali disebut dengan “kebijakan” saja, “pada hakekatnya semacam jawaban terhadap suatu masalah, atau merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah” (Islamy, 2004: 1).

Pengertian kebijakan publik menurut Dunn (2001), adalah “serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah” (Islamy, 1997: 109). Pendapat senada muncul dari Dye (1981) yang mengartikan “kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih/diputuskan oleh pemerintah mengenai mengerjakan atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu” (Islamy, 2004: 8).

Menurut Winarno (2002), menyarankan bahwa “kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan tersendiri” (Islamy, 2004: 15). Sementara menurut Winarno (2002), yang mengutip Anderson bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengawasi beberapa masalah atau persoalan” (Islamy, 2004: 16).

Definisi Rose sebenarnya bersifat ambigu, namun berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi Anderson (1979) lebih memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Kemudian, Syafei (1999), mencatat beberapa definisi tentang kebijakan publik, diantaranya:

1. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis atas sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik (Chandler & Plano);
2. Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya, atau, serangkaian tindakan yang saling berkaitan dalam pemerintahan (Islamy, 2004: h. 17).

Santoso (1993), mencoba mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik. Kemudian membuat kesimpulan, bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam “dua wilayah kategori, yaitu: pertama, pandangan yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah, artinya cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, pandangan yang memberi perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan” (Islamy, 2004: 4-5).

Kategori kedua terbagi menjadi dua kubu, yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu serta mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai kebijakan yang memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kubu pertama, melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan, yaitu: perumusan, pelaksanaan, dan penilaian. Secara ringkas, pandangan ini dapat dikatakan sebagai proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Artinya, bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kubu kedua, lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu ini diwakili oleh Presman & Wildavsky yang mendefinisikan “kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan sebelumnya” (Islamy, 2004: 4).

Kedua kubu dapat dirangkum bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dipilih oleh pemerintah, diformulasikan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dalam rangka

memecahkan masalah publik. Implikasi atas pilihan “dilaksanakan” atau “tidak dilaksanakan” oleh pemerintah, pengaruhnya sama besar.

Definisi-definisi yang ada, mungkin memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, akan tetapi besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, proposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapatkan perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta.

Penegasan Anderson (1979) mengenai implikasi kebijakan publik dapat menjadi bahan pertimbangan tersendiri dalam membuat preposisi kebijakan publik, antara lain:

1. Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu daripada sebagai perilaku atau tindakan yang bersifat kebetulan;
2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan untuk melakukan sesuatu;
4. Kebijakan bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan (pejabat) pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan
5. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa” (Islamy, 2004: 19).

Pada penggunaan bahasa yang sederhana, Anderson (1979) mengatakan, bahwa pada hakikatnya studi tentang kebijakan mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: apa (*what*), mengapa (*why*), kapan (*when*), dimana (*where*), oleh dan untuk siapa (*who/whom*), dan bagaimana (*how*).

Oleh karena kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan (atau tidak dilakukan) pemerintah yang mempunyai tujuan

tertentu demi kepentingan masyarakat, maka Islamy (2004) mengetengahkan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- (a) bahwa kebijakan publik itu dalam operasionalnya berbentuk penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- (b) bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- (c) bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu, mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; dan
- (d) bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat (h. 20).

Sifat-sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan, dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori, sebagaimana menurut Anderson (1979) antara lain: “tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan kebijakan (*policy statements*), produk kebijakan (*policy outputs*), dan dampak kebijakan (*policy outcomes*)” (Islamy, 2004: 19-20).

Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan yang dibuat oleh para aktor swasta atau pemerintah, yang ditujukan kepada para pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Mereka didesak untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya, diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus berbuat sesuatu sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan

Keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah eksekutif atau pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan resmi atau artikulasi kebijakan publik yang menjelaskan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Islamy, 2004: 21).

Hasil kebijakan (*policy outputs*), cenderung merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan publik, atau hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Hasil kebijakan dapat diungkapkan pula sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah, yang keberadaannya perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu. Penyelidikan mengenai hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan secara jelas bahwa kebijakan -dalam kenyataannya-- berbeda dengan apa yang tersirat dalam pernyataan kebijakan. Dengan demikian, dapat dibedakan antara dampak kebijakan (*policy outcomes*) dengan hasil kebijakan (*policy output*).

Hasil kebijakan (*policy output*) lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibat atas kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (Islamy, 2004:22).

2.3 Pengertian Pendidikan

2.3.1 Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat

Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.

a. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda, ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.

b. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui dua sasaran yaitu pembentukan pribadi oleh mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.

c. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara

Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.

d. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

e. Definisi pendidikan menurut GBHN

GBHN (BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

2.3.2 Pendekatan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis komunitas merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi

tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas adalah model penyelenggaraan pendidikan yang tertumpu pada prinsip "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat". Pendidikan "dari masyarakat" artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan "oleh masyarakat" artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan, terutama pada pelaksanaannya. Adapun pengertian pendidikan "untuk masyarakat" artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat "dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri" (Sihombing, 1999: 134).

Pada Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 16, menyebutkan arti dari pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu dilingkungan akademik para ahli juga memberikan batasan pendidikan berbasis komunitas. Galbraith (1992) menjelaskan bahwa:

"community-based education could be defined as an educational process by which individuals (in this case adults) become more competent in their skill, attitudes, and concept in an efforts to live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation" (pendidikan berbasis komunitas dapat diartikan sebagai proses pendidikan dimana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokrasi) (Hermanto, 2009: 34).

Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis komunitas adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat menjadi agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat menjadi fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Disini dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis komunitas jika ditanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaannya berada di tangan masyarakat. Pendidikan komunitas bekerja atas asumsi bahwa masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota maupun desa, mereka telah memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Pada UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 di dalam pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat/Komunitas disebutkan sebagai berikut;

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Dari kutipan di atas nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Karena itu dalam menyelenggarakannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan yang lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis (Sihombing, 1999: 140).

Menurut Sudjana (2000) untuk itu tujuan dari pendidikan nonformal berbasis komunitas dapat mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti karir, pelatihan terhadap lingkungan, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, penanganan masalah kesehatan seperti korban narkoba, HIV/AIDS, dan sejenisnya. Sementara itu lembaga itu yang memberikan pendidikan kemasyarakatan bisa dari kalangan bisnis dan industri, lembaga-lembaga berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisasi kesehatan, organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, museum, organisasi persaudaraan sosial, lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain (Hermanto, 2009: 33).

2.4 Pengertian Lembaga

Secara sosiologis, istilah lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur dan mapan (*established*). Dalam pengertian ini lembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang. Secara umum lembaga lahir dari cara-cara berbuat (*usage*) yang menjadi kebiasaan (*Folksway*), lalu kebiasaan tumbuh menjadi tata kelakuan (*mores*), dan apabila tata kelakuan ini tambah bertambah matang, disertai adanya aturan dan peneakan sanksi yang relatif berat terhadap pelanggar aturan tersebut, maka berarti telah terbentuk apa yang disebut sebagai adat-sitiadat (*customs*). Dengan kata lain, lembaga merupakan kebiasaan berbuat yang dilakukan secara sadar, bersifat permanen dan rasional (*super folksway*). Istilah lembaga mengandung pengertian yang lebih kompleks dari pada sekedar jaringan kebiasaan kehidupan kelompok. Dalam pengertian ini, lembaga lebih merupakan kristalisasi dari aksi dan kaedah-kaedah yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman hidup yang menunjukkan pada pola perilaku yang mapan. Banyak pula kalangan berbuat yang menterjemahkan lembaga sebagai kumpulan cara berbuat yang berguna untuk mengatur lembaga stabilitas hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 1984: 6).

Cooley dan Davis menyatakan bahwa lembaga merupakan kaedah-kaedah yang kompleks yang ditetapkan oleh masyarakat, untuk secara teratur memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, maka suatu lembaga dapat dianggap sebagai acuan tata-tertib dalam bertindak, sehingga dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok itu terhindar dari penyimpangan perilaku dan perlakuan yang tidak adil. Pengertian lain dari "lembaga" adalah "pranata", koentjaraningrat misalnya, lebih menyukai sebutan pranata dan mengelompokkannya kedalam delapan golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Kedelapan golongan pranata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan *kinships* atau *domestic institution*;
- b) Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan

mendistribusi harta dan benda, disebut dengan *economic institutions*. Contoh: pertanian, peternakan, perburuan, feodalisme, industri, *barter*, koperasi, penjualan, dan sebagainya;

- c) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut *educational institutions*;
- d) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta di sekelilingnya, disebut *scientific institutions*;
- e) Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi, disebut *aesthetic and recreational institutions*;
- f) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, disebut *religious institutions*;
- g) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, disebut *political institutions*. Contoh dari institusi politik disini adalah pemerintah, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan dan sebagainya; dan
- h) Pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia, disebut dengan *somatic institution* (Hendropuspito, 1989: 63).

Istilah lembaga, menurut ensiklopedia Sosiologi diartikan sebagai institusi—sebagaimana oleh Machmillan—adalah sebuah perangkat hubungan norma-norma, keyakinan- keyakinan, dan nilai- nilai yang nyata, yang berpusat pada kebutuhan- kebutuhan sosial dan serangkaian penting yang berulang (Saharuddin, 2001:55)

2.4.1 Perbedaan Lembaga/kelembagaan dengan Organisasi

Pada dasarnya untuk memahami masyarakat harus juga berusaha memahami organisasi yang terdapat dalam lingkungan sosial. Hal tersebut dikarenakan:

Masyarakat terdiri organisasi-organisasi, dimana hampir semua dari kita melewati masa hidup dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian organisasi adalah suatu unit sosial (pengelompokan sosial) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Namun untuk mendefinisikan organisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini karena organisasi merupakan sesuatu yang abstrak, sulit dilihat namun bisa dirasakan eksistensinya (Etzioni, 1985: 3).

Definisi lain mengenai organisasi menjelaskan bahwa “organisasi sebagai satu kesatuan sosial sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu-kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dilingkungkannya” (Lubis & Husein, 1987: 1).

Sudut pandang lain menjelaskan bahwa organisasi dipandang sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya. Siagian (1995) misalnya, menyebutkan bahwa “sebagai wadah melihat organisasi sebagai struktur yang memiliki jenjang hirarki jabatan manajerial, berbagai kegiatan operasional, komunikasi yang digunakan, informasi yang digunakan serta hubungan antar satuan kerja” (h. 11). Kemudian organisasi sebagai wadah, melihat pemilihan dan penggunaan tipe organisasi tertentu, apakah bertipe lini, lini dan staf, fungsional, matrix, dan panitia. Kemudian organisasi dipandang sebagai suatu proses interaksi memiliki anggapan bahwa keberhasilan satu-satuan kerja didalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi interaksi antar anggota, satu-satuan kerja serta organisasi dengan lingkungannya.

Bila dilihat dari perspektif ekonomi, Martindale (1966) mengatakan bahwa besarnya organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu pembagian tenaga kerja, hubungan formal, dan rasionalisasi, dengan penjabaran sebagai berikut (h. 142):

Pertama, pembagian tenaga kerja, menurut teori organisasi klasik akan meningkatkan efisiensi. Namun ketika mesin-mesin digunakan membantu tugas

manusia, *skill* akan berpengaruh dalam menggerakkan mesin-mesin tersebut. Organisasi besar membutuhkan adanya spesialisasi.

Kedua, hubungan formal, dimana individu yang menjadi anggota dalam suatu organisasi saling berinteraksi yang bersifat formal dalam hubungan ini diakibatkan adanya hirarki yang mengatur jalannya organisasi. Birokrasi ini di dalam organisasi berdampak pada tingkah laku individu dalam berhubungan. Artinya birokrasi di dalam organisasi ini akan mengatur pola hubungan tingkah laku individu dalam berinteraksi.

Ketiga, rasionalitas, yaitu bagaimana suatu organisasi memandang sesuatu secara rasional. Misalnya hubungan antara tenaga kerja dengan beban kerja yang harus dilaksanakan, peningkatan kapabilitas individu untuk meningkatkan *skill* sebagai upaya menjalankan tugas-tugas organisasi.

Dengan demikian, untuk meneliti sebuah kelompok, menurut Martindale (1966) harus melihat kegiatan yang dihasilkan kelompok tersebut, yang meliputi: pengambilan keputusan, komunikasi, penyelesaian tugas, dan pembagian hasil pada suatu kelompok (h. 123). Kegiatan-kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan suatu organisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan demikian di dalam suatu lembaga ini terkandung prinsip-prinsip ekonomi.

Walaupun organisasi membutuhkan adanya pola-pola perilaku yang membawa keefektifan suatu organisasi (Indrawijaya, 2000: 8), namun definisi lembaga di atas, dapat dilihat dari adanya perbedaan organisasi dengan lembaga atau institusi. Menurut Uphoff (1986) bahwa organisasi merupakan struktur yang mengakui dan menerima adanya peranan (h. 8). Organisasi bergerak pada bidang formal dan informal dimana struktur yang ada, dihasilkan dari adanya interaksi diantara peranan yang semakin kompleks.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa lembaga hadir untuk memenuhi kebutuhan satu kelompok manusia dan bukan perorangan. Naluri manusia yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, seperti misalnya ketertarikan terhadap seks pada diri manusia, yang mengakibatkan manusia hidup berkelompok. Ada tua dan muda serta laki-laki dan perempuan yang secara harfiah manusia membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian akan terjadi aksi sosial di dalam kelompok, sehingga tercipta suatu lembaga yang memenuhi

kebutuhan seks manusia. Begitu pula akan lembaga-lembaga lain yang hadir di sekitar masyarakat itu sendiri.

Uphoff (1986) salah satu penggagas *People Centered Development Forum* mengajukan definisi sederhana yang membedakan antara organisasi (*organization*) dengan kelembagaan (*institution*) sebagai berikut:

Organizations are structures of recognised and accepted roles.

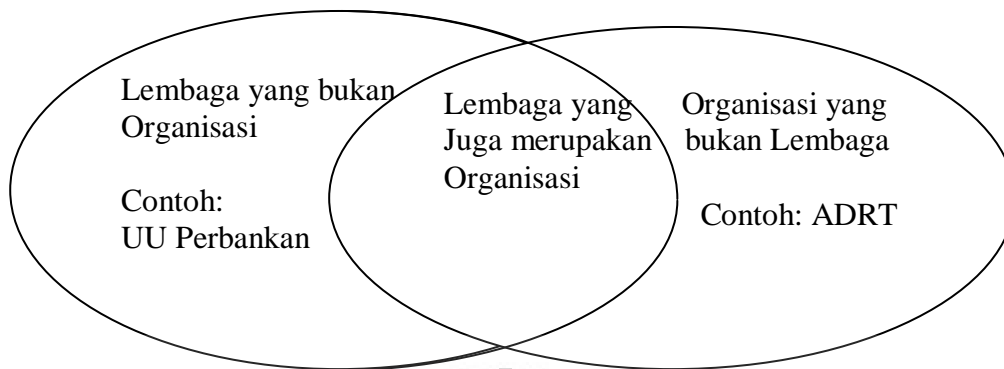
Institutions are complexes of norms and behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposes (h. 8).

(Organisasi adalah struktur peran yang telah dikenal dan diterima.

Kelembagaan/pranata adalah serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan-atau digunakan-selama periode waktu tertentu yang relatif lama-untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif/bersama atau maksud-maksud yang bernilai sosial).

Lebih lanjut Uphoff (1986) menyatakan banyak sekali yang mendefinisikan institusi, karena pengertian institusi sering dipertukarkan dengan organisasi (h. 9). Menurut Uphoff, '*institutions are complexes of norms and behaviors that persist over time serving collectively valued purposes*' (hal.9). Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud yang bernilai sosial.

Ada beberapa tipe kelembagaan/ pranata. Ada kelembagaan yang bukan organisasi (*institutions that are not organization*), ada kelembagaan yang bukan merupakan organisasi (*institutions that are organizations*), dan organisasi yang bukan kelembagaan (*organizations that are not institutions*).



Gambar 2.1 Kelembagaan dan Organisasi

Sumber: Simanjuntak 2001

Penjelasan lebih rinci tentang pemahaman terhadap kelembagaan dan organisasi mengacu pada gambar di atas diuraikan dengan contoh-contoh sebagai berikut:

- a) Sebuah Bank dapat disebut sebagai organisasi karena di dalamnya terdapat struktur peran-peran yang telah dikenal dan diakui. Ada peran Kepala (Direktur), ada peran Bagian Kredit, ada peran Bagian Pelayanan Nasabah (*Customer Service*) dan sebagainya.

Sebagai kelembagaan (*institution*), Bank sebagai penyedia jasa untuk melakukan “simpan-pinjam” uang, penggunaan jasa Bank sudah menjadi norma dan perilaku masyarakat luas yang memiliki dan memerlukan uang. Karenanya Bank adalah kelembagaan dan juga organisasi.

- b) Undang-undang Perbankan sebagai suatu kelembagaan (*institution*) dalam rangka penyediaan pelayanan jasa keuangan sudah menjadi kebutuhan bersama bagi sekelompok warga, bahkan masyarakat dunia. Berbagai aturan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang itu menjadi norma dan perilaku umum dalam kegiatan simpan pinjam uang. Tetapi undang-undang Perbankan tidak memiliki Ketua (Direktur), Kepala Bagian, dan sebagainya. Karena itu Undang-undang Perbankan dalam hal ini adalah kelembagaan (*institution*) yang bukan organisasi.
- c) Kelompok ibu-ibu di suatu Rukun Tetangga (RT) adalah sebuah organisasi karena di dalamnya ada struktur peran yang telah dikenal dan diakui oleh

para peserta arisan itu. Kelompok arisan itu dapat bubar (tidak diteruskan keberadaannya) ketika semua anggota mendapat giliran memperoleh uang arisan. Karenanya, dan terutama atas pertimbangan persistensinya, sebuah kelompok arisan sebagaimana digambarkan di atas belum dapat dikatakan sebagai suatu kelembagaan (Simanjuntak, 2001: 70).

Menyimak penjelasan di atas (terutama butir ketiga), sebuah organisasi suatu saat dapat saja menjadi kelembagaan, tetapi itu baru terwujud jika fungsi dan peran organisasi itu dalam kaitannya dengan kepentingan warga, diakui secara luas sebagai suatu norma dan perilaku bersama. Dengan demikian, dan jikapun diinginkan, agar suatu organisasi dapat menjadi kelembagaan (*institution*), diperlukan waktu cukup lama hingga aturan dan tata cara menyalurkan dan memperoleh pelayanan dari organisasi itu diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama (kolektif) sebagaimana di contohkan pada Bank. Organisasi yang juga kelembagaan seperti halnya Bank adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, misalnya.

Jika suatu organisasi pada akhirnya diharapkan akan dilembagakan maka upaya yang harus dilakukan haruslah merupakan suatu proses pelebagaan (*institutionalizing*) yang digambarkan pada bahasan berikutnya.

2.4.2 Lembaga Pendidikan Masyarakat

Bila berbicara mengenai kelembagaan dan institusi pendidikan maka yang pertama kali terlintas di benak kita adalah sekolah, baik itu yang berbentuk formal maupun yang non formal yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, dan PT. Pendidikan non formal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau *skill* guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumberdaya manusia sangat bergantung pada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperan.

Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga & biaya, sarana dan prasarana dan menyediakan lapangan kerja. Karenanya, partisipasi masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat diharapkan (Tim Dosen IKIP: 1981).

Model pendidikan yang diinisiasi oleh masyarakat umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah
2. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau *drop out*
3. Tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek
4. Peserta tidak perlu homogen
5. Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis
6. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus
7. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup.

2.4.3 Sekolah Alternatif

Dalam tulisan Sekolah Alternatif bagi kaum Miskin (2005) Pendidikan semestinya menjadi milik tiap anggota masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah harus menyediakan sarana-sarana pendidikan, termasuk memberikan subsidi memadai agar rakyat memperoleh kesempatan belajar. Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memperhatikan pendidikan bagi mereka yang kurang secara *financial*. Menguatnya liberalisasi ekonomi dan krisis multidimensi memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kemudian diserahkan kepada swasta. Akibatnya pendidikan menjadi barang mewah dan sulit dijangkau oleh mereka yang berada pada ekonomi lemah (h. 1).

Privatisasi pendidikan dapat dilihat dari seberapa besar anggaran pendidikan yang dialokasi pemerintah. Bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya,

tingkat privatisasi pendidikan di Indonesia merupakan yang tertinggi. Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya privatisasi.

- a) Privatisasi didorong oleh motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah sering dianggap kurang mampu mengelola pendidikan. Akibatnya, lembaga pendidikan menjadi tidak efisien, tidak kompetitif, dan tidak berkembang.
- b) Privatisasi pendidikan merupakan konsekuensi logis dari adanya prinsip teknologisasi, kuantifikasi dan efisiensi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini pendidikan dalam masyarakat sudah dipandang sebagai *private goods*, sehingga pemerintah tidak harus menyediakan pendidikan secara *missal*.

Pemerintah merasa tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikan. Dalam hal ini privatisasi dianggap dapat meringankan beban pemerintah dalam membiayai pendidikan, sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan bisa dialihkan pada sektor lain yang dirasa lebih mendesak. Privatisasi pendidikan yang kemudian mengarah pada komersialisasi pendidikan kini seakan menjadi sesuatu yang sah-sah saja (Sekolah Alternatif bagi kaum Miskin, 2005: 1).

Tidak bisa disangkal bahwa kontroversi komersialisasi pendidikan yang marak akhir-akhir ini merupakan salah satu kesalahan dari negara dalam menangani masalah pendidikan. Pemerintah harus mempertegas arah regulasi pendidikan, termasuk mengembangkan jaminan sosial pendidikan untuk keluarga miskin secara melembaga dan berkelanjutan dengan tunjangan pendidikan, beasiswa dan subsidi silang. Pemerintah harus berkomitmen untuk tetap ambil bagian dalam dunia pendidikan. Keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan cuci tangan pemerintah. Dengan kenyataan seperti ini, pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat bawah sampai saat ini belum tersentuh dalam program pendidikan nasional.

Alhasil yang terjadi, pendidikan dikelola bak perusahaan di mana pendidikan yang berkualitas diperuntukan bagi pihak yang punya kemampuan *financial*. Sementara orang miskin akan tetap dengan kondisinya. Dari sini pemerintah terkesan ingin melepas tanggung jawab atas terwujudnya pendidikan

(khususnya pendidikan dasar) gratis, bermutu, dan berkualitas bagi rakyat Indonesia. Ujung semua ide Depdiknas, pada cabinet Indonesia bersatu, sepertinya menuju pada terwujudnya privatisasi pendidikan, di mana tanggung jawab pemerintah berkurang, bahkan di lepas sama sekali terlihat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Sekolah Alternatif bagi kaum Miskin, 2005: 2).

Sebagian dari peran negara akhirnya diambil oleh masyarakat yang peduli akan pendidikan anak bangsa. Mereka yang peduli dengan kaum marginal di negara ini mampu memberikan kontribusi positif berupa pembuatan sejumlah sekolah khusus orang miskin. Mereka percaya, pendidikan merupakan obat mujarab untuk mengubah seseorang dari yang miskin menjadi tidak miskin, dari yang bodoh menjadi berpengetahuan.

Sejumlah model sekolah pun mereka kembangkan untuk pendidikan kaum miskin. Di antaranya model sekolah alternatif di Salatiga, Sekolah Gratis Alfa Central Centauri di Bandung dan model sekolah-sekolah di wilayah-wilayah konflik. Ada beberapa contoh sekolah alternatif yang didirikan swadaya oleh sekelompok orang dan cukup berhasil mengakomodasi hak-hak orang miskin untuk mendapatkan pengajaran (Sekolah Alternatif bagi kaum Miskin, 2005: 2).

1) QT dan Centauri

Penyelenggaraan model sekolah alternatif di Salatiga, yakni SMP alternatif Qaryah Thayyibah (QT) terbilang sangat sukses. Bahkan, gaung kesuksesan sekolah tersebut terkenal di Indonesia. Sekolah itu pun kini jadi inspirasi bagi masyarakat di wilayah lain untuk membuat sekolah sejenis SMP alternatif QT.

Ide pembuatan SMP alternatif QT di Desa Kalibening, Salatiga berangkat dari keprihatinan Baharuddin, warga desa setempat yang kini menjabat sebagai kepala di sekolah tersebut, atas mahalannya biaya pendidikan. Masyarakat setempat yang hidup dalam kemiskinan, tidak akan mampu menyekolahkan anak-anaknya. Untuk kehidupan sehari-hari saja warga Kalibening sudah sulit memenuhinya, apalagi menyediakan biaya sekolah, buku, transportasi. Akibatnya, banyak anak di desa itu yang hanya bersekolah sampai SD, itu pun banyak yang tidak lulus.

Melihat kondisi desanya itu, Baharuddin menginginkan adanya perubahan dan dia pun segera memutuskan untuk mendirikan sekolah setingkat SMP untuk membantu warga miskin mengakses pendidikan murah dan berkualitas.

Melalui rembukan di antara warga setempat, disepakati pembuatan sekolah alternatif QT yang kurikulumnya tetap didasarkan pada kurikulum nasional (kurnas). Hanya, pada sekolah QT, muatan pengetahuan teknologi informasi dan bahasa Inggris mendapat porsi yang lebih banyak.

Bantuan koneksi internet dari kawan Baharuddin membuat sekolah QT tidak pernah putus dengan jaringan informasi dunia. Para anak didik semangat untuk menggunakan internet guna menghapuskan rasa haus mereka akan ilmu. Hasilnya, sekolah QT bisa unggul jauh dibandingkan sekolah induknya. Bahkan, sejumlah muridnya berhasil menjuarai kontes pidato bahasa Inggris mengalahkan para siswa yang berasal dari sekolah yang berbiaya mahal.

Meski mengadopsi kurnas, Baharuddin mengadopsi pendidikan yang membebaskan muridnya berperan aktif dalam kelas. Para murid, yang merupakan anak-anak dari buruh tani setempat, begitu lantang berbicara di kelas. Mereka berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Tentunya, sikap-sikap seperti ini sangat baik sebagai modal mereka untuk mengarungi kehidupan nanti.

Selain sekolah QT di Salatiga, di Bandung ada juga sekolah yang dikhususkan untuk orang miskin, yakni SMA Alfa Centauri. Sekolah ini digagas oleh Sony Sugema, salah seorang pengusaha bimbingan belajar (bimbel). Sony melihat banyak orang miskin yang pintar tidak bisa meneruskan sekolah karena keterbatasan finansial orang tua mereka.

Akhirnya, dengan mengalokasikan sejumlah keuntungan bisnisnya, SMA Alfa Centauri pun didirikan pada Juli 2003. Sekolah ini memang benar-benar gratis. Tidak heran, banyak yang tertarik untuk sekolah di sana. Tentu saja, tidak semua bisa diterima. Karena itu, pihak penyelenggara pendidikan di SMA Alfa Centauri mengadakan seleksi untuk memilih siapa saja yang berhak sekolah di SMA yang terletak di Jln. Supratman Bandung itu.

Model sekolah ala Sony ini seharusnya bisa juga diteladani para pengusaha lainnya. Bagaimanapun, suksesnya wajar 9 tahun butuh kerja sama dari berbagai pihak, termasuk melibatkan peran aktif pengusaha sebagai penyokong dana guna

terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan mengakomodasi kepentingan orang miskin.

2) Daerah konflik

Model sekolah alternatif di sejumlah wilayah konflik, berawal dari hancurnya fasilitas pendidikan seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pascakonflik Mei 2000. Agar hak masyarakat mengakses pendidikan dasar tidak terputus, sejumlah masyarakat dan LSM yang peduli dengan pendidikan, memutuskan membuat sekolah alternatif.

Para siswa di wilayah Poso dikumpulkan tanpa melihat perbedaan latar belakang mereka, baik dari unsur sara maupun status ekonomi. Para anak didik diberikan pengertian bahwa perbedaan suku, agama di antara mereka bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.

Tentu saja, peran mentor atau guru pembimbing untuk mendidik anak-anak di wilayah konflik sangat vital. Para mentor ini harus mampu menangkap gejala psikologis yang mungkin timbul akibat trauma setelah menyaksikan kerusuhan sosial di wilayah mereka tinggal.

Tentu saja, masyarakat yang hidup di wilayah konflik punya banyak keterbatasan, baik dari aspek ekonomi maupun aspek lainnya, sehingga kehidupan mereka ditopang dana dari pemerintah atau lembaga lainnya. Karena itu, untuk pembiayaan pembuatan sekolah alternatif di wilayah konflik, sudah jelas para orang tua harus dibebaskan dari biaya pendidikan anak-anak mereka (Sekolah Alternatif Bagi Kaum Miskin, 2005: 3).

2.4.4 Lembaga Sosial

Keberadaan lembaga sosial dapat dilihat dengan pendekatan historis, yaitu menelusuri lahirnya lembaga sosial dan perkembangannya. Lembaga sosial tumbuh dan berkembang dari perilaku usaha pengemabangan masyarakat yaitu dari tuntutan kebutuhan hidup bersama dan kelompok, misalnya lembaga keluarga muncul dari kebutuhan perkawinan, kebutuhan kehidupan agama melahirkan lembaga gereja maupun mesjid, kemudian lembaga adat muncul dari kehidupan adat istiadat dan sebagainya.

Dalam perjalanan kehidupan, lembaga sosial tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk. Bentuk dan jumlah lembaga sosial tumbuh bagaikan jamur di musim kemarau seiring dengan pengalaman pembangunan nasional di waktu yang lalu, dimana sistem pembangunan paternalistik pada waktu itu kurang memberi peluang dalam menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan teknokrasi dalam sistem perencanaan *top down* yang melemahkan partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas mendorong adanya kebutuhan pendekatan pengembangan des, masyarakat dan komunitas diluar kenegaraan yang berbasis masyarakat. Berpijak dari dorongan ini muncul berbagai bentuk lembaga non pemerintah (NGO) atau lembaga sosial seperti yang dikemukakan oleh Priyono meliputi:

- a) *Non Profit Organization* (NPO) = Organisasi Nirlaba. Lembaga Sosial (ORSOS NIRLABA) adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat, dalam bidang pembangunan bidang sosial merekamelaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
- b) *Grass Roots Support Organization* (GRSO) = Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat.
- c) *Grass Roots Organization* (GRO) = Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan dampak pembangunan, pengembangan, perubahan sosial serta pemberdayaan masyarakat (Prastyowati, 2004: 37).

Secara esensial ketiga bentuk lembaga sosial tersebut di atas bertujuan sama, yaitu menumbuhkan pemberdayaan yang berorientasi berkisar pada keadaan sosial, ekonomi dan budaya dengan pendekatan kemanusiaan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan rakyat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hikam bahwa “ruang gerak lembaga sosial bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswadayaan (*self supporting*), keswasembadaan (*self generating*), dan kemandirian” (Raharjo, 2002: 23).

2.4.5 Syarat Kelembagaan

Sebagai lembaga partisipan di bidang kesejahteraan sosial maka Departemen Sosial (1994) telah menetapkan syarat kelembagaan sosial sebagai berikut:

a) Kelembagaan

Dari segi Kelembagaan maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) yang dimiliki suatu organisasi sosial bersifat terbuka, kekeluargaan gotong royong, serta berbasis masyarakat berdasarkan swadaya, swasaha dan swadana, bertujuan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial secara bersama-sama pemerintah dibidang usaha kesejahteraan sosial, didukung struktur organisasi/pengurus/personalia dan sarana prasarana.

b) Lembaga sosial hendaknya memiliki sumberdaya pendukung, yaitu:

1. Didukung SDM yang berkualitas, memiliki sistem pengembangan SDM, yang sesuai dengan profesi misalnya melalui DIKLAT.
2. Sumber daya kelembagaan (SDK) khususnya aspek finansial secara swadaya.
3. Memiliki sumber daya alam (LSM juga dimungkinkan mengelola SDA)

c) Program/pelayanan lembaga sosial

1. Langkah pelayanan ditempuh melalui pendataan, penjajagan kebutuhan, perencanaan program penyiapan potensi pendukung, ada pengorganisasian pelaksanaan dan koordinasi.
2. Program pemberdayaan mencakup dalam hal pencegahan, rehabilitasi dan pengembangan kesejahteraan sosial
3. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat agar secara aktif dapat menjadi pelaku pemberdayaan (h. 25).

2.4.6 Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial

Banyak kajian pustaka yang menjelaskan ciri lembaga sosial salah satunya yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin yaitu memberikan ciri-ciri umum atau karakteristik lembaga sosial sebagai berikut:

1. Lembaga sosial mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis yang merumuskan tujuan, atta tertib dan lain-lain.
2. Lembaga sosial merupakan suatu organisasi pola-pola pemikiran dan perikelakuan yang terwujud melalui aktivitas-sktivitas kemasyarakatan dah hasil-hasilnya.
3. Lembaga sosial merupakan suatu tingkat kekekalan tertentu umurnya lama dan melalui proses yang panjang.
4. Setiap lembaga sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan.
5. Setiap lembaga sosial mempunyai alat atau perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
6. Setiap lembaga sosial mempunyai lambang, simbol yang khas yang menggambarkan tujuan dan fungsi (Sugiyanto, 2002: 38).

2.4.7 Pelembagaan atau Institusional

Roucek dan Warren (1984) menyebut lembaga sebagai pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai satu ketetapan untuk menggunakannya yang tetap, memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat, dan melahirkan suatu struktur. Lembaga pada mulanya terbentuk atas dorongan kesamaan pandangan, hasrat dan keinginan bersama manusia untuk hidup secara teratur. Cita-cita tentang keteraturan hidup ini berpusat pada tatanan normatif hubungan antar anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Penataan, pemeliharaan dan pengekalan keteraturan hubungan antar anggota masyarakat itu sangat tergantung pada intensitas kesadaran bersama terhadap fungsi normanorma sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila kemudian secara sadar norma-norma sosial itu diakui, dihormati dan dipatuhi bersama sebagai satu-satunya alternatif yang dapat berfungsi memelihara stabilitas hubungan sosial dan dapat mendorong kemudahan dalam usaha memenuhi kepentingan-kepentingan

kelompoknya, maka kehidupan kelompok ini akan semakin mapan dan terpolada dalam bentuk lembaga sosial (Syani, 2001: 5).

Norma-norma yang ada di masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Soekanto (1982) membedakan kekuatan mengikat norma-norma ini dengan empat pengertian, yaitu (*usage*), kebiasaan (*folksway*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*customs*) (h. 6). Sedangkan pelebagaan suatu norma pada suatu organisasi lebih lanjut menurut Soekanto (1982) bahwa:

(Pelebagaan) dapat dilakukan apabila norma-norma itu telah (a) diketahui, (b) dipahami, (c) ditaati, dan (d) dihargai. Norma yang ada disuatu organisasi bila baru pada tingkat diketahui anggotanya maka tingkat pelebagaannya paling rendah. Namun, norma itu dikatakan telah dimengerti jika ukuran masing-masing anggota telah mengetahui hak dan kewajiban dan menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi. Tahapan norma yang ditaati dapat dilihat dari peningkatan dari tahap pemahaman akan hak dan kewajiban yang mentaati segala ketentuan yang berlaku. Kemudian bila telah ditaati, maka norma itu akan berkembang dengan adanya penghargaan akan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan organisasi (h. 73).



Gambar 2.2 Proses Pelebagaan

Sumber : diolah dari Soekanto (1982)

Secara lebih ringkas Simanjuntak (2001) menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan dalam proses institusionalisasi atau pelebagaan, yaitu:

- a) Norma dan perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama;
- b) Norma dan perilaku baru tersebut diperkenalkan dan diuji cobakan
- c) Jika norma dan perilaku tersebut dirasakan bermanfaat, akan memperoleh pengakuan (legitimasi) dari warga
- d) Pengakuan atas manfaat norma dan perilaku itu akan mengundang penghargaan dari warga. Penghargaan dalam hal ini dipahami sebagai adanya upaya warga untuk melindungi dari perilaku menyimpang dan tindakan pelanggaran, sehingga selalu ditaati secara swakarsa; dan
- e) Norma dan perilaku tersebut dihayati, mendarah daging oleh warga (h. 12).

Sementara menurut Johnson proses pelebagaan atau institusional suatu nilai atau norma dalam suatu sistem sosial paling tidak harus memenuhi tiga syarat, yakni:

1. Bagian terbesar warga sistem sosial menerima norma tersebut
2. Norma-norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar dari warga-warga sistem sosial tersebut
3. Norma tersebut bersanksi

Proses pelebagaan atau institusional pada masyarakat sangat lama sekali dan merupakan hasil cipta manusia. Oleh karena proses pelebagaan merupakan hasil cipta manusia, maka kelembagaan dapat dikategorikan sebagai "teknologi". Teknologi yang diciptakan manusia dapat didefinisikan menjadi dua yaitu:

- a) Teknologi yang bersifat materiil, dan
- b) Teknologi yang bersifat organisatoris. Teknologi yang bersifat organisatoris ini yang juga merupakan pengertian dari kelembagaan tersebut.

2.4.8 Pembangunan Lembaga

Pembangunan lembaga adalah suatu perspektif tentang perubahan tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina. Ia menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan perorangan dan hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Ia tidaklah bersangkutan dalam pola-pola yang sudah ada, dengan penyimpangan-penyimpangan marginal dari praktek-praktek lalu, atau dengan perbaikan-perbaikan yang sedikit saja dalam efisiensi. Temanya yang dominan adalah inovasi (Easton, 1986: 23).

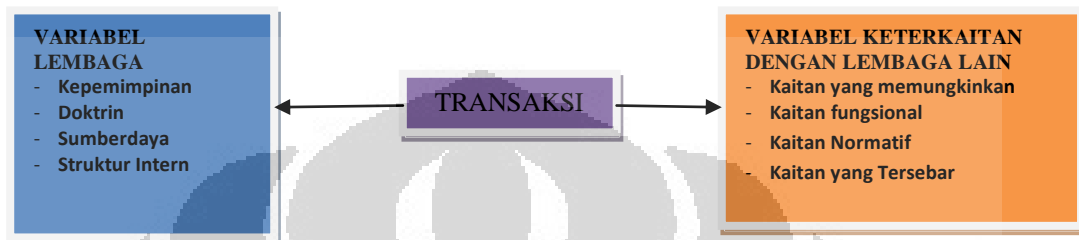
Sebagai dasar pemikirannya, perspektif pembangunan lembaga mengambil inovasi sosial yang bertujuan, yang dipaksakan oleh elite-elite yang berkiblat pada perubahan dan yang bekerja melalui organisasi-organisasi formal. Tujuan mereka adalah untuk membangun organisasi-organisasi yang dapat hidup terus yang efektif yang membangun dukungan-dukungan dan kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungannya. Dukungan ini memungkinkan inovasi-inovasi untuk berakar, memperoleh dukungan, menjadi normatif dan dengan demikian dilembagakan dalam masyarakat. Pembangunan lembaga suatu proses yang generik, dalam arti bahwa ia dapat diterapkan pada tiap inovasi sosial yang tidak dipaksakan dalam tiap sektor masyarakat dalam tiap kebudayaan pada tiap saat. Tetapi ia bukanlah suatu model perubahan sosial yang eksklusif, karena ia tidak menerangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses-proses yang sembarangan atau penyebaran yang tidak direncanakan, maupun yang terjadi melalui tindakan yang revolusioner. Dalam model pembangunan lembaga, lembaga diartikan sebagai suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi, dan jaringan-jaringan dukungan tidak diartikan (sebagaimana dinyatakan dalam literatur lainnya) sebagai pola-pola kegiatan yang normatif (umpamanya bisnis, agama).

2.4.9 Model pengembangan lembaga

Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a)

mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Konsep yang menjadi model tersebut:



Gambar 2.3 Universum Pengembangan Kelembagaan

Sumber: Joseph W. Easton. (ed), 1986.

1. Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan merupakan salah satu variabel penting dalam pengembangan Kelembagaan yang mengandung berbagai karakteristik fungsional baik internal maupun eksternal. Beberapa karakteristik fungsional internal dari variabel kepemimpinan adalah:

- a) Memiliki kompetensi
- b) Memiliki komitmen yang kuat
- c) Adanya gaya kepemimpinan yang ditunjukkan
- d) Memiliki taktik yang tepat
- e) Menunjukkan adanya kontinuitas dan mempersiapkan suksesi

Sedangkan karakteristik-karakteristik fungsional eksternal dari kepemimpinan adalah:

- a) Manajemen/pengelolaan terhadap kaitan-kaitan yang ada
- b) Adanya gaya kepemimpinan yang ditunjukkan
- c) Memiliki taktik yang tepat
- d) Adanya sikap/perlakuan terhadap doktrin

2. Doktrin (*Doctrine*)

Doktrin ini merupakan norma dan nilai perubahan yang akan dilembagakan, yang mana norma dan nilai itu sudah ada sebelumnya. Doktrin ini biasanya berupa temuan-temuan baru, yang diharapkan akan menciptakan keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya.

Secara internal, tema-tema yang berupa temuan-temuan norma dan nilai baru dianggap akan menciptakan keadaan yang lebih baik yang harus dilindungi oleh lembaga dan dianjurkan selama proses pelebagaan antara lain:

- a) Tema-tema yang diarahkan kepada (kegiatan) para staf
- b) Tema-tema yang diarahkan pada (kegiatan) para sarjana/pemikir.

Sedangkan secara eksternal, tema-tema yang harus dilindungi oleh lembaga dan dianjurkan selama proses institusionalisasi ke luar adalah:

- a) Tema-tema yang mengangkat identitas atau esensi perubahan
- b) Tema-tema yang mengarah pada pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan dalam hidup dan kehidupan
- c) Tema-tema yang mengarah pada program, cara-cara bagaimana mengatasi persoalan
- d) Tema-tema yang mengarah pada pelayanan, bagaimana memanfaatkan waktu, dan sebagainya.

3. Program (*Programs*)

Program merupakan tindakan tertentu yang konkret sifatnya, yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan inovasi. Jadi program merupakan penjelasan secara rinci dari inovasi. Menurut Esman (1974) program yang baik yaitu:

4. Mampu mengoptimumkan penggunaan sumber daya yang ada
5. Program harus benar-benar menjabarkan inovasi
6. Memungkinkan untuk dilaksanakan, dan
7. Mempunyai nilai efektivitas dan efesiensi yang cukup tinggi (Easton, 1986: 34).

Program di sini merupakan upaya untuk mengetengahkan hal-hal apa yang bisa dan seharusnya dilakukan dalam rangka proses pelebagaan. Secara internal,

program-program yang bisa dan seharusnya dilakukan oleh lembaga antara lain sebagai berikut:

- a) Program-program pengajaran dan pembelajaran
- b) Program-program penelitian
- c) Program-program inovasi
- d) Program-program evaluasi
- e) Program-program pelayanan.

Sedangkan secara eksternal, program-program yang bisa dan seharusnya dilakukan oleh lembaga antara lain:

- a) Program-program tambahan yang dibutuhkan
- b) Program-program pelayanan yang menstimulasi pemberdayaan komunitas.

4. Sumberdaya (*Resources*)

Yang dimaksud sumberdaya disini adalah segala bentuk sumberdaya yang dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya program. Sumberdaya yang dimaksud meliputi:

- a) Sumberdaya manusia
- b) Sumberdana
- c) Sarana

Sumberdaya tersebut idelanya harus bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Dengan terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan, maka diharapkan bisa mendukung keberhasilan pengembangan kelembagaan.

5. Struktur Internal

Merupakan struktur dan proses yang mendukung terselenggaranya suatu program yang akan dilembagakan. Terdapat beberapa persyaratan suatu struktur intern yang baik, yaitu:

- a) Adanya pembagian peranan
- b) Adanya pola wewenang yang jelas
- c) Terdapat sistem komunikasi yang baik/efektif dalam struktur tersebut

- d) Masing-masing bagian struktur tersebut mampu melaksanakan tugas dengan baik
- e) Terjalin hubungan yang baik antara struktur internal dengan organisasi yang terkait dan berada di luar struktur.

Selanjutnya, perlu juga dipahami variabel-variabel keterkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada dilingkungan luar. Variabel-variabel keterkaitan tersebut adalah:

- a) Variabel kaitan-kaitan yang memungkinkan (*Enabling linkages*).
- b) Variabel kaitan-kaitan yang seharusnya (*Normative Linkages*).
- c) Variabel kaitan-kaitan fungsional (*Functional Linkages*).
- d) Variabel kaitan-kaitan yang tersebar (*Diffuse Linkages*) (Easton, 1984: 24).

Mengetahui faktor kapabilitas yang masing-masing lembaga merupakan faktor pendukung yang vital dalam mengembangkan lembaga adalah harus melihat tujuan yang telah ditentukan lembaga yang bersangkutan sehingga memudahkan arah pengembangannya. Kemudian, langkah selanjutnya dimulai dari mengetahui keberadaan lembaga itu sendiri. Untuk mengetahui keberadaan lembaga yang hendak dipromosikan maka dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada pada lembaga tersebut.

Untuk membantu mengetahui nilai-nilai pada lembaga yang hendak dipromosikan dapat diketahui dengan mengajukan:

- a) Bagaimana kemampuan lembaga yang bersangkutan untuk dapat bertahan?
- b) Bagaimana inisiatif lembaga yang bersangkutan dalam menghadapi permasalahan?

Pengukuran pertanyaan di atas mencakup norma, perilaku, sistem kepercayaan, kesadaran kolektif yang berkembang dilembaga tersebut. Tujuan dilakukan hal demikian adalah agar mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk membantu mengembangkan lembaga tersebut.

Cara membantu pengembangan lembaga tersebut, mencakup tiga hal yang saling berkaitan yang sedapat mungkin dilaksanakan dengan tidak terputus-putus atau dalam satu kegiatan. Ketiga cara tersebut adalah:

- a) Asistensi: diberikan kepada lembaga yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengatur jalannya organisasi, serta melihat peluang yang ada. Kebutuhan asistensi ini diminta sendiri oleh lembaga yang bersangkutan dengan tujuan membantu lembaga tersebut berhubungan dengan pihak lain.
- b) Pemberian fasilitas: diberikan kepada lembaga yang bersangkutan bila lembaga itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rutin anggota, namun lembaga tersebut kurang mampu dalam mengakses, merencanakan, dan mengembangkan kreativitasnya. Pada keadaan seperti ini pemberian fasilitas akan membantu lembaga ini mengembangkan dirinya.
- c) Promosi: diberikan apabila keadaan suatu kelembagaan lokal mengalami permasalahan internal organisasi yang berkaitan sulitnya lembaga ini berkembang untuk mencapainya tujuannya. Pemberian cara promosi diharapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan internal lembaga ini dan membantu mengembangkan lembaga ini.

2.4.10 Pengembangan Kelembagaan

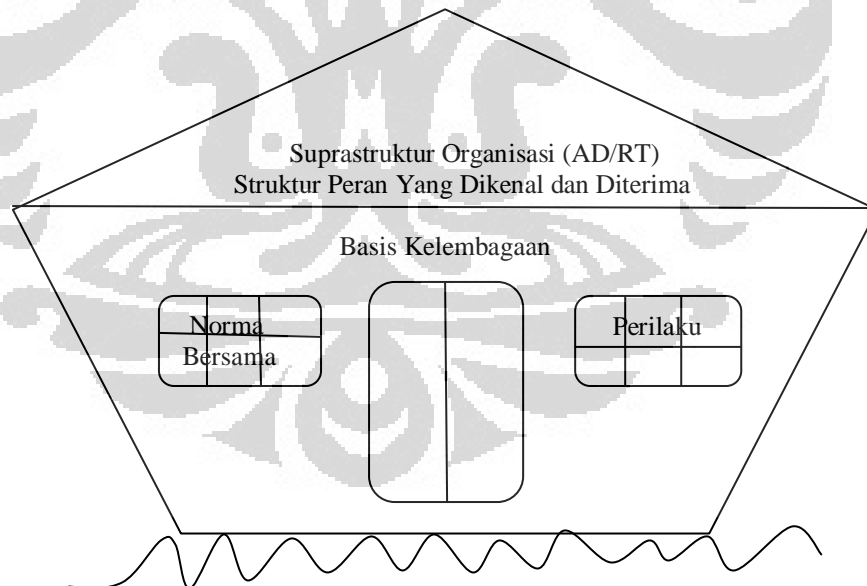
Perlu diingat bahwa tidak semua pelebagaan selalu berarti positif. Sebagai contoh, pelebagaan birokrasi di mana-mana telah melahirkan berbagai persoalan inefisiensi, kelambanan pelayanan, proses dan mekanisme yang bertele-tele dan berbiaya tinggi, korupsi, sampai krisis kepercayaan yang sangat luas di berbagai negara adalah akibat dari pelebagaan birokrasi.

Pada kegiatan program/proyek pengembangan warga yang bermuatan pengembangan kelembagaan tertentu diskala lokal wargakomunitas, kebutuhan akan formalisasi organisasi secara umum bersumber dari pandangan yang begitu pada aspek legalitas formal, suatu aspek yang secara jujur tidak selalu seiring dengan logika warga. Hal ini dapat dimaklumi dengan mengakui secara jujur betapa banyaknya sisi penegakan hukum (*legal/law enforcement*) yang tidak

terbukti secara baik. Karenanya, bagi warga secara umum, jauh lebih penting norma dan perilaku positif yang dikembangkan dan disepakati bersama secara kolektif untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan (sekalipun tidak tertulis), daripada aspek-aspek legalitas formal suatu organisasi yang dibentuk warga yang bersangkutan.

Langkah formalisasi organisasi (jikapun harus dilakukan) seringkali bukan merupakan kebutuhan warga tetapi relatif sebagai kebutuhan para administrator pembangunan, penanggung jawab proyek, konsultan, pemerintah dan badan-badan penyanggah dana pembangunan yang disalurkan kepada komunitas. Ringkasnya, dua hal di bawah ini biasanya menjadi alasan utama perlunya formalisasi organisasi warga.

- a) Memenuhi syarat administrasi penyaluran sumberdaya, karena organisasi pelaksana pembangunan dan badan-badan penyanggah dana mempersyaratkannya,
- b) Memenuhi permintaan warga jika warga yang bersangkutan menginginkannya dan menilainya sebagai suatu kebutuhan.



Gambar 2.4 Skema Deskriptif Hubungan Antara Norma dan Perilaku Sebagai Basis Kelembagaan dengan Struktur Peran dan Suprastruktur Organisasi Formal

Sumber: Simanjuntak (2001)

Pengembangan Kelembagaan dalam konteks pengertian pengembangan norma dan perilaku positif lebih penting daripada pembentukan organisasi formal. Hal ini menitikberatkan pada upaya pada pembentukan organisasi dan aturan main formal (AD/RT, Akta Notaris dan sebagainya), dan kurang perhatian pada pengembangan basis kelembagaan (norma dan perilaku positif); sama seperti membangun atap sebuah rumah tanpa dinding sebagai penyangga dibawahnya. Ini diilustrasikan pada gambar 4. Sehingga proses pelembagaan (*institutionalizing*) dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Norma dan perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama.
- b) Norma dan perilaku baru tersebut baru diperkenalkan dan diuji cobakan
- c) Jika norma dan perilaku baru tersebut dirasakan bermanfaat, akan memperoleh pengakuan (legitimasi) dari warga setempat
- d) Pengakuan atas manfaat norma dan perilaku itu akan mengundang penghargaan dari warga. Penghargaan hal ini dipahami sebagai adanya upaya warga yang bersangkutan untuk melindungi dari perilaku menyimpang dan tindakan pelanggaran, sehingga selalu ditaati secara swakarsa; dan pada akhirnya,
- e) Norma dan perilaku tersebut dihayati mendarah daging oleh warga.

2.5 *Civil Society*

Terbentuknya masyarakat sipil sebagai sebuah indikasi keberdayaan dan kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan dan partisipasi politik yang otonom sesungguhnya tidak terlepas dari kebijakan akomodatif negara. Negara pada Era Reformasi ini tampaknya membuka ruang jauh lebih luas untuk “menampung” kehadiran aktor-aktor demokrasi ketimbang negara pada era sebelumnya.

Entitas masyarakat sipil sepanjang Orde Baru (1966-1998) selalu mengalami kesulitan dalam mengartikulasi peranan sebagaimana mestinya. Masyarakat sipil senantiasa berhadapan dengan sosok negara otoritarian bentukan rezim Orde Baru Soeharto yang tidak member toleransi pada

kemajemukan politik. Menurut Stockholm (2000) *Internasional Insitute for Democracy and Electoral Assistance (Internasional IDEA)* memaparkan:

For thirty-two years, the authoritarian government of Soeharto's New order undermined the development of civil society, weakening independent powers and voices of authority in the belief that and open participatory decision-making process would endangered national stability. In other words, the New Order tried to build a strong state by weakening civil society.

[Selama 32 tahun, pemerintah otoriter Orde baru Soeharto menghambat pembangunan masyarakat sipil, melemahkan kekuatan independen dan suara pemegang kewenang, dengan dasar pemikiran bahwa proses pembuatan keputusan yang terbuka dan partisipatoris akan membahayakan stabilitas nasional. Dengan kata lain, Orde baru mencoba membangun negara yang kuat dengan melemahkan masyarakat sipil (Culla, 2006: 3).

Menurut Lucian (1972) Peran dominan negara dalam menentukan realitas politik Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dasar pemikiran strategi pembangunan nasional yang diterapkan oleh rezim Orde Baru. Ideologi pembangunan nasional Orde Baru lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan keterlibatan atau stabilitas politik; aspek politik menjadi penunjang dan diabdikan untuk kepentingan stabilitas dan keamanan (Culla, 2006: 4).

Penekanan pada masalah ketertiban-stabilitas-keamanan membuat rezim bias membangun negara yang kuat (*strong state*). Sebagaimana telah dikatakan oleh Presiden Soeharto ketika itu, salah satu tujuan Orde Baru yang paling penting adalah membangun suatu masyarakat baru yang merasa aman, menikmati arti penting ketertiban, dan mengejar kemajuan dalam suasana kestabilan. Untuk tujuan itu dipergunakan semua strategi antara lain mengooptasi pelbagai kekuatan social politik lewat perwakilan wadah-wadah kepentingan.

Menurut Culla (2006) Partisipasi politik masyarakat yang dibutuhkan oleh sistem politik lebih bersifat semu, karena semua telah diarahkan dan disalurkan melalui sejumlah organisasi korporatis yang sebagian besar dibentuk dan dikontrol oleh negara.

Masyarakat sipil berdiri tegak diatas prinsip-prinsip egalitarianisme-inklusif bersifat universal. Melalui domain yang diciptakan, masyarakat sipil selalu membangun kreativitas serta berupaya mengatur dan memobilisasi diri sendiri tanpa melibatkan negara. Masyarakat sipil terbentuk berdasarkan ikatan sukarela sekelompok individu.

Berlawanan dengan masyarakat sipil yang hakikatnya berdasarkan *peraturan masyarakat sendiri* oleh pribadi-pribadi yang membentuk masyarakat ini, negara pada hakikatnya berdasarkan “peraturan dari luar” yang menggunakan kekerasan dan paksaan. Sementara Ernest Gellner mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai institusi non-pemerintah yang cukup kuat mengimbangi negara menurut Aditjondro (1997). Meskipun tidak menghalangi negara dari memenuhi perannya sebagai penjaga perdamaian dan sebagai wasit diantara berbagai kepentingan, masyarakat sipil tetap dapat menghalangi negara yang hendak mendominasi masyarakat (Culla, 2006: 19).

Masyarakat sipil, menurut Gellner (1995), merupakan sekelompok lembaga atau asosiasi yang cukup kuat untuk mencegah tirani negara dan komunitas tertentu, tetapi dapat dimasuki dan ditinggalkan dengan bebas. Sedangkan Diamond dan Hikam (1996) merujuk pada Gellner (1995) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain, kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan, kemandirian yang tinggi saat berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dipatuhi oleh warganya (Culla, 2006: 19).

Dari paparan di atas bisa disarikan pengertian tentang konsep masyarakat sipil adalah masyarakat yang memiliki kemandirian atau otonomi. Masyarakat sipil pada saat tertentu dapat dilihat sebagai entitas yang memiliki kemampuan memajukan diri-sendiri, bisa “menghalangi”

intervensi pemerintah dan negara dalam realitas yang diciptakan sendiri, serta menunjukkan sikap kritis di bidang kehidupan politik.

2.5.1 *Civil society* dan Kelembagaan Masyarakat Lokal

Negara yang kuat adalah negara yang didukung oleh *civil society* yang kuat. Meski demikian tidak mudah mendefinisikan apa itu *civil society* untuk itu kita akan melihat berbagai literatur untuk mencoba melihat definisi *civil society* dari berbagai pendapat dan apa hubungannya dengan kelembagaan masyarakat lokal.

Indonesia yang sedang memulai demokrasi, atau dalam masa menuju konsolidasi demokrasi menurut istilah Diamond (2003), masih berada dalam fase transisi yang perlu terus disempurnakan di konteks keindonesiaan. Walaupun beberapa kalangan menganggap demokrasi sebagai sistem dianggap mampu berjalan dengan niscaya, menurut Diamond (1992) demokrasi juga menuntut tumbuhnya masyarakat beradab yang bersemangat, gigih dan pluralis. Tanpa satu masyarakat yang beradab demikian, demokrasi tidak akan mungkin dikembangkan dan menjadi langgeng. Pada jangkauan yang lebih jauh, demokrasi tidak akan mampu menjalankan misinya membentuk negara yang adil dan mensejahterakan rakyatnya tanpa adanya peran masyarakat sipil (Susan, 2007: 1).

Masyarakat sipil (*civil society*) dalam kasus negara-negara berkembang termasuk Indonesia berhadapan dengan dua persoalan. Pertama terminologi dan konsep masyarakat sipil yang masih bisa diperdebatkan diantara kalangan akademisi maupun kalangan aktivis demokrasi. Persoalan yang kedua adalah peletakan peran (*role enactment*) masyarakat sipil dalam proses perubahan-perubahan sosial politik di Indonesia, terutama sekali pada saat demokrasi masih dalam fase transisi. Transisi demokrasi di Indonesia ditandai oleh partisi kekuasaan atau desentralisasi yang mempunyai dimensi-dimensi permasalahan kontekstual, terutama sekali berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan agenda terbentuknya *local good government*. Walaupun, faktanya kapasitas dan nilai-nilai demokrasi masih lemah. Sehingga, pada situasi ini *civil society* mempunyai peran yang strategis dalam mengawal konsolidasi demokrasi di tingkat daerah (Susan, 2007: 1).

Secara mendasar masyarakat sipil menempatkan dirinya dalam posisi yang kritis terhadap negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik serta kontrol terhadap kekuasaan. Dalam realitas empirisnya masyarakat sipil mengorganisasi dirinya secara independen dari negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat biasa yang tidak kritis dan pasif dalam struktur sosial yang bisa jadi menindas mereka.

Masyarakat biasa (parokial) dan masyarakat sipil bisa dijelaskan dengan istilah *mass society* dan *public society* yang dikembangkan oleh Mills (1956). *Mass society* adalah masyarakat yang cenderung pasif, tidak kritis terhadap kekuasaan dan pada sisi berseberangan *public society* merupakan masyarakat kritis, independen dan mampu mengorganisasi diri untuk melakukan tuntutan terhadap ketidakadilan. Chandoke (2005) menyatakan dukungannya bahwa masyarakat sipil adalah lembaga-lembaga yang kritis terhadap Negara. Walaupun kritis terhadap negara, Diamond (2003) menekankan bahwa masyarakat sipil berbeda dengan masyarakat politik yang mencakup semua aktor terorganisasi terutama partai politik dan organisasi kampanye (Susan, 2007: 2).

Menurut Hikam (1996) selain kritis terhadap negara *civil society* mempunyai kemandirian dalam banyak hal. Bahwa *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan-jaringan politik resmi (Susan, 2007: 3). Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Diamond dalam bukunya *developing democracy toward consolidation* (2003) menyimpulkan lebih luas bahwa masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial berorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Selanjutnya Diamond menekankan bahwa masyarakat sipil bersedia aktif secara kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, mencapai sasaran

kolektif, mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki fungsi struktur negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara (Susan, 2007: 3).

Masyarakat sipil yang kritis dan mandiri secara esensial didukung oleh orientasi pasarnya, sehingga para aktor di dalamnya mengakui prinsip-prinsip otoritas negara dan *rule of law*. Agar bisa tumbuh berkembang dan mendapat jaminan rasa aman ia membutuhkan perlindungan dari tatanan hukum yang terlembagakan. Sehingga, masyarakat sipil bukan hanya membatasi kekuasaan negara tetapi juga melegitimasi otoritas negara bila otoritas itu didasarkan pada *rule of law* (Susan, 2007: 3).

Berkaitan dengan pencirian masyarakat sipil Diamond mengajukan lima ciri masyarakat sipil. *Pertama*, masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan publik bukannya tujuan privat. *Kedua*, masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan Negara tetapi tidak berusaha merebut kekuasaan atas Negara atau mendapat posisi dalam negara; ia tidak berusaha mengendalikan politik secara menyeluruh. *Ketiga*, masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya, organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik. *Keempat*, masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda pula. *Kelima*, masyarakat sipil haruslah dibedakan dari fenomena *Civic community* yang lebih jelas meningkatkan demokrasi. *Civic community* adalah konsep yang lebih luas dan lebih sempit sekaligus: lebih luas karena ia mencakup semua jenis perhimpunan (termasuk parokial); lebih sempit karena ia hanya mencakup perhimpunan yang terstruktur secara horizontal di seputar ikatan yang sekira mempunyai kebersamaan, kooperatif, dan saling mempercayai (Susan, 2007: 3-4).

Persoalan mendasar lainnya setelah pendefinsian adalah siapa yang merupakan bagian dari masyarakat sipil. Pada level ini seringkali terjadi persoalan karena kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat seringkali menunjuk kepada kelompok yang lain bukan sebagai bagian dari masyarakat sipil tetapi sebagai masyarakat politik. Untuk menengahi ini kita bisa mengutip pendapat Diamond bahwa masyarakat sipil mencakup beragam organisasi, formal dan informal,

meliputi: ekonomi, kultural, informasi dan pendidikan, kepentingan, pembangunan, berorientasi isu, dan kewarganegaraan (Susan, 2007: 4).

Seringkali organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat sipil adalah kalangan NGOs (Non Government Organizations/Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan professional yang didalamnya ada kelompok keagamaan yang kritis independen, kaum bisnis maupun media. Jika kita mengacu pada pengertian ini, tampaknya *civil society* juga bisa merupakan kelas menengah. Kelas menengah oleh Hikam (1999) yang di dalamnya terdapat mahasiswa, aktivis LSM, dan kelompok-kelompok pro demokrasi,

Menurut (Gaffar, 1999) terdapat empat komponen berkaitan dengan kemungkinan tumbuhnya masyarakat sipil; pertama adalah otonomi yang berarti sebuah *civil society* harus lepas sama sekali dari pengaruh Negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Kedua, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap *agencies of the state*. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat (*contacting*), menulis pikiran di media massa, atau dengan terlibat langsung atau tidak langsung organisasi politik. Ketiga, arena publik yang otonom, dimana berbagai macam organisasi social dan politik mengatur diri mereka sendiri. Keempat, arena publik yang terbuka, yaitu arena public yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan rahasia, eksklusif dan *setting* yang bersifat korporatif (Susan, 2007: 5-6).

Peranan lembaga-lembaga yang secara historis, berfungsi secara bebas dari pengaruh langsung pemerintah. Misalnya termasuk perkawinan, keluarga, gereja, organisasi sukarela, dan dunia usaha.

2.6 Sejarah Berdirinya Yayasan Bina Insan Mandiri

Nama "MASTER" julukan untuk sebuah sekolah dibawah naungan Yayasan Bina Insan Mandiri yang pada tahun 2005 resmi mendapat pengakuan eksternal secara formal oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan PAUD, Paket A, B, C serta sekolah terbuka untuk SMP dan SMA yang merupakan satu-satunya sekolah terbuka negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Sekolah MASTER (Masjid Terminal) adalah sekolah gratis yang didirikan oleh Nur Rohim yang tersentuh hatinya melihat anak yang tidak mampu sekolah. MASTER merupakan keutuhan dari masa depan anak-anak bangsa yang putus sekolah dikarenakan ketiadaan biaya. Sebagian besar anak-anak MASTER (panggilan untuk siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah MASTER) adalah anak jalanan (anak yang bekerja dan hidup di jalan), anak yang bekerja sebagai *joki tri in one*, ojek payung, pengamen dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Tempat yang nyaman untuk belajar, mewah dan megah itu jauh dari bayangan karena dulunya sekolah ini menumpang di teras musholla. Tetapi niat dan keinginan anak-anak untuk lulus dan mendapatkan ijazah membuat sekolah ini banyak diminati apalagi gratis, tanpa syarat dan letaknya yang strategis yang berada di antara segi tiga emas yaitu diapit oleh ITC, Terminal Terpadu Depok dan Stasiun Depok Baru yang merupakan persinggahan anak-anak jalanan dan tempat warga yang tinggal dan bekerja sebagai pedagang, supir angkutan umum, dan pengamen.



Gambar 2.5 Lokasi Strategis Sekolah MASTER

Sumber: Dokumentasi Penulis 2011

Sekolah gratis hadir ditengah perekonomian yang sulit bagi anak-anak untuk bersekolah, bagaimana tidak untuk menghidupi kebutuhan keluarga saja belum cukup, mau tidak mau anak banyak dilibatkan untuk mencari uang di jalan. MASTER semakin lama semakin berkembang pesat berkat kegigihan dan didorong oleh kesadaran sebagian komunitas akan arti penting pendidikan anak. Selain pendidikan Yayasan Bina Insan Mandiri juga bergerak dibidang dakwah, kesehatan, advokasi masyarakat, sosial. Sejumlah penghargaan yang diterima seperti juara I dan II lomba menulis surat untuk Presiden RI (2005), penghargaan dari MENDIKNAS dalam rangka HUT guru (2005), juara I dan II olimpiade matematika setara SD Jabodetabek (2006), Juara Cerdas Cermat I setara SD tingkat Jawa Barat (2007), juara I tutor berprestasi tingkat Jawa Barat (2008) Juara I lomba PKBM tingkat Jawa Barat (2008) sampai beberapa siswa-siswi yang diterima di PTN yakni Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya.

YABIM yang dikenal tidak hanya di Depok saja tetapi juga dikenal sampai wilayah Bogor, Jakarta, Bojong. Banyak mahasiswa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lain baik dalam dan luar negeri yang berdatangan ingin mengenal lebih dalam sekolah alternatif ini.

Yayasan Bina Insan Mandiri awalnya tidak memiliki gedung, alias menumpang di teras mesjid yang dulunya musholla. Sedangkan Terminal yang sekarang sangat ramai dan menjadi tempat lalu lintas bus dan angkutan baik dari dalam dan luar kota dulunya adalah empang (1998). Stasiun Depok Baru yang meruakan stasiun kereta yang sudah lama berdiri di Depok sudah mengalami tiga kali perpindahan sekitar tahun 1970-an.



Gambar 2.6 Stasiun Depok Baru

Sumber: Dokumentasi YABIM, 2008

Masuk ke dalam pemukiman penduduk yang ada di samping Terminal dan di belakang sekolah MASTER bukanlah seramai sekarang, penduduk asli yang tinggal sudah sudah berkurang awalnya adalah kebun yang sangat luas. Akhirnya lama-kelamaan digusur untuk pelebaran daerah Terminal. Bangunan ITC yang berdiri megah diantara bangunan-bangunan lainnya merupakan bangunan yang baru berdiri tahun 2005. Pasar kemiri yang berada persis dekat dengan Stasiun Depok Baru sudah ada sejak tahun 1986 dan dulunya adalah Ramayana. Warga berdatangan dan meramaikan Terminal ini semenjak tahun 1990-an.



Gambar 2.7 Kondisi di belakang Sekolah MASTER, Samping Terminal

Sumber: Dokumentasi Penulis 2011

Universitas Indonesia

Ketika saya hendak mewawancarai Pak MAR saat itu sedang duduk santai diteras rumahnya. Pak MAR merupakan satu-satunya warga asli yang tinggal di Terminal Depok. Tempat tinggalnya merupakan warisan dari orang tuanya. Sejak tahun 1985 sudah tinggal disana dan mengetahui tentang sejarah Yayasan Bina Insan Mandiri hingga saat ini.



Gambar 2.8 Wawancara Dengan Pak MAR

Sumber: Penulis 2012

”Dulunya disini tanah kosong,,awalnya juga sekolahnya pada di musholla, lama-kelamaan dibesarin dibangun masjid sekitar tahun 2000-an. Saya udah dari taun 1985 disini, dulu belum ada Terminal tapi sawah dan kebun,, bangunan ITC tahun 2005 kalo Terminalnya sebelumnya udah ada tahun 1998,, kalo stasiun keretanya sebelum saya lahir udah ada, bahkan sudah mengalami tiga kali pindah kalau Pasar Kemiri semenjak saya SMP udah ada mba, sekitar 1986-lah mba. Iya, masih duluan ramayana, dulunya itu sawah,,,1990-an warga disini semakin ramai” (MAR, warga, 20 Agustus 2011)

Awal dari berdirinya Yayasan Bina Insan Mandiri adalah ketika seorang Nur Rohim yang setiap harinya bekerja sebagai pemasok barang dagangan ke lima kios yang berada di Terminal tanah abang, lebak bulus, kebayoran, dan Terminal Depok. Selain itu Pak Rohim juga memiliki warung tegal (warteg) di

Universitas Indonesia

daerah Terminal Depok. Ketika itulah dia melihat sekitar Terminal Depok banyak baPak-baPak, pemuda-pemuda yang mabuk, berjudi dan anak-anak mereka dibiarkan terlantar dan disuruh mengamen, mengasong dan meminta-minta. Sehingga warga Terminal menjadi kawasan yang yang tidak aman dan disisi lain banyak diuntungkan oknum-oknum yang mementingkan dirinya sendiri dan itu berakibat kepada anak-anak mereka ketika orang tuanya mabuk anaknya diterlantarkan dan tidak sekolah sehingga terjadilah dampak penyakit sosial alias pengangguran. Sehingga mereka mencari pekerjaan yang santai tapi hasilnya besar tanpa banting tulang yaitu dengan berjudi/togel. Sebelum togel namanya SSSD (Sumbangan Sosial Dana Berhadiah) yaitu suatu hadiah yang dicapai melalui suatu perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Olah Raga dan disahkan oleh Kementerian Sosial. Dengan membeli nomer dengan harga Rp 1.000,- akan berhadiah Rp 1.500.000,- diundi setiap minggu oleh Kementerian Sosial.

“,,, saya punya lima kios ada di tanah abang, kebayoran, depok. Sehari-hari saya liat di sekitar Terminal Depok banyak sekali orang-orang disitu pada mabuk, berjudi dan anak-anak mereka dibiarkan terlantar dan disuruh mengamen, mengasong dan meminta-minta,,,,diperparah dengan adanya sayembara dari Departemen Sosial bekerjasama dengan Departemen olah raga,,,semakin lama semakin parah saya melihat lingkungan sekitar musholla dijadikan tempat maksiat,,, ”(NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri 21 Agustus 2011)

Semakin lama semakin parah, apalagi beliau melihat lingkungan di sekitar musholla dijadikan tempat maksiat, dimana kalau sudah menjelang malam dijadikan tempat berjudi dan mesum. Beliau berpikir bagaimana cara menyelamatkan masyarakat seperti itu apalagi melihat masa depan anak yang terlantar seperti itu.

Tahun 1998-1999 ketika itu terjadi kerusuhan dimana-mana, usaha beliau jatuh. Harga menjadi melambung tinggi dan daya beli masyarakat menjadi

rendah, Pak Nur Rohim beserta istri memutuskan untuk membuka warung tegal/warteg disamping Terminal Terpadu Depok. Dari sana Pak Rohim melihat disekitar Terminal anak-anak mengamen, mengasong sampai menjadi tukang minta-minta beliau teringat masa kecilnya, ayah dan ibunya berjualan di Terminal Tanah Abang, dia juga bergaul dengan anak-anak jalanan, sungguh miris sehingga dia berkeinginan mendirikan sebuah lembaga yang *concern* terhadap pendidikan buat anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka tidak buta huruf.

Ditahun 2000 Pak Rohim tinggal di Depok dan mulai mengajak anak-anak untuk bersekolah, Pak Rohim mau memulainya di musholla dia meminta izin kepada pengurus musholla agar diberikan tempat bagi anak-anak jalanan belajar membaca dan menulis. Awalnya ini tidak mudah mengajak anak-anak yang bekerja di jalan untuk belajar. Tantangan yang dihadapi adalah para orang tua anak yang merasa terganggu akibat anak yang harusnya bekerja akhirnya waktunya tersita untuk belajar.

Tapi Pak Nur Rohim tidak kehilangan akal, dia memulai pendekatan dengan orang tua anak dan masyarakat sekitar dengan memberikan sembako. Pak Nur Rohim melakukan penjangkauan hingga ke titik rawan anak jalanan, seperti di lampu merah, di Terminal dan sebagian besar adalah di Kampung Lio yang merupakan kawasan masyarakat ekonomi kurang mampu.

Pada awalnya musholla lama kelamaan diperbesar menjadi mesjid (2003). Anak-anak didiknya semakin banyak, Pak Rohim mengajak pemuda masjid untuk membantunya mengajar dengan imbalan uang transport dan makan nasi bungkus, karena kepedulian terhadap anak-anak yang tidak mampu relawan yang membantu Pak Nur Rohim bertambah. Pak Nur Rohim tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga belajar mengaji dan pola hidup sehat (mandi, sikat gigi dan makan yang teratur).

Semakin lama semakin bertambah peserta didik karena selain diberikan pengajaran secara gratis tetapi juga diberi makan. Selain untuk anak jalanan, juga untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sekolah MASTER selain dikenal lewat mulut ke mulut, di bawa oleh teman atau dengan cara *modeling* dari alumni yang sudah lulus. Perilaku peserta didik yang sebagian besar

adalah anak jalanan yang masih melekat sehingga banyak sandal dan sepatu di masjid yang berhilangan sehingga Pak Nur Rohim akhirnya pindah.

“ya taunya dari mulut ke mulut, misalnya kalo ditanya kamu sekolah dimana,,oohh di MASTER sekolah gratis, pastii tau. Kalo gratis orang-orang pada ikutan”(SM, warga 17 Agustus 2011)

“bukan untuk anak jalanan saja tapi juga untuk anak biasa yang orang tuanya kurang mampu,,,dari mulut ke mulut, bawa teman, modeling dari temen-temen kita yang udah lulus, modeling temen-temen kita yang udah kerja, temen-temen kita yang udah kuliah, makin banyak. Lalu ada liputan dari media. Media dating kesini karena ada sesuatu yang unik ” (MUS, Koordinator Yayasan Bina Mandiri 24 Agustus 2011)

Pada tahun 2005 Pak Nur Rohim membeli rumah yang berdekatan dengan masjid dan memulai mengajar disana. Semakin lama semakin banyak peserta didik yang lulus tapi sangat disayangkan kalau tidak disertai dengan ijazah. Untuk itu Pak nur Rohim beserta relawan berjuang mengadvokasi agar mendapat pengakuan dan peserta didik juga dapat melanjutkan kebangku kuliah bahkan untuk bekerja.

“saya mengurus legal tahun 2004 sampai 2005 terus ada perubahan tahun 2006” (NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri, 27 Agustus 2011)

Perjuangan Pak Nur Rohim tidak sia-sia di tahun yang sama pusat belajar yang diperjuangkan untuk mencerdaskan anak bangsa mendapat pengakuan eksternal dari Dinas Pendidikan Kota Depok dan dasar pendiriannya diakui oleh AKTA Notaris Dwi Priharyanto Nomor 02 tanggal 25 february 2005. Tidak hanya itu Yayasan Bina Insan Mandiri semakin dikenal dengan banyaknya liputan dari media cetak dan elektronik.

Berbagai perlombaan yang diikuti mendapatkan hasil yang gemilang yaitu juara I dan II menulis surat untuk presiden, penghargaan dari Mendiknas dalam rangka HUT Guru, juara I dan II olimpiade matematika setara SD Jabodetabek.

Pada tahun 2006 setelah mendapatkan pengakuan eksternal dan mendapat perizinan operasional untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dana bantuan mulai mengalir dari Dinas Pendidikan, Pemerintah Pusat dan Provinsi. Oleh karena banyaknya peserta didik dan Yayasan Bina Insan mulai dikenal oleh masyarakat luas maka Yayasan Bina Insan Mandiri mulai membuat sistem pengorganisasian yang jelas dan strukturisasi yang baik.

Tidak dipungkiri bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga dibutuhkan dana yang lebih untuk menampung semakin banyaknya peserta didik yang saat itu sebanyak 1500 orang. Oleh karena nama Yayasan Bina Insan Mandiri mulai dikenal ada saja bantuan dari *volunteer* baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan dana tersebut dimanfaatkan untuk menambah ruang belajar siswa dan juga keperluan dapur umum.

Pada tahun 2008 ruang gudang dan sablon sekarang, dulunya dipakai untuk belajar TK dan SMP awalnya adalah tempat biliyar dan pada waktu siang dipakai untuk siswa SMA. Pak Nur Rohim juga membeli rumah warga yang dulunya tempat biliyar untuk lapangan sekolah. Demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan anak-anak peserta didik diajak dan dihibau untuk berpakaian sopan. Karena di sekolah MASTER merupakan kawasan terbuka antara pasar dan Terminal kota yang warganya sering mabuk-mabukan dan kerap terjadi pelecehan seksual. Sehingga siswi dianjurkan memakai jilbab untuk yang muslim dan dilarang merokok di lingkungan sekolah.

“Tempat biliyar punya saya juga diambil ama Pak Rohim dijadikan lapangan sekolah, sekitar tahun 2008,, iyya itu sekalian klinik dulunya tempat cucian motor tapi masih jalan ampe sekarang itu tahun 2010” (STP, warga, 20 Agustus 2011)

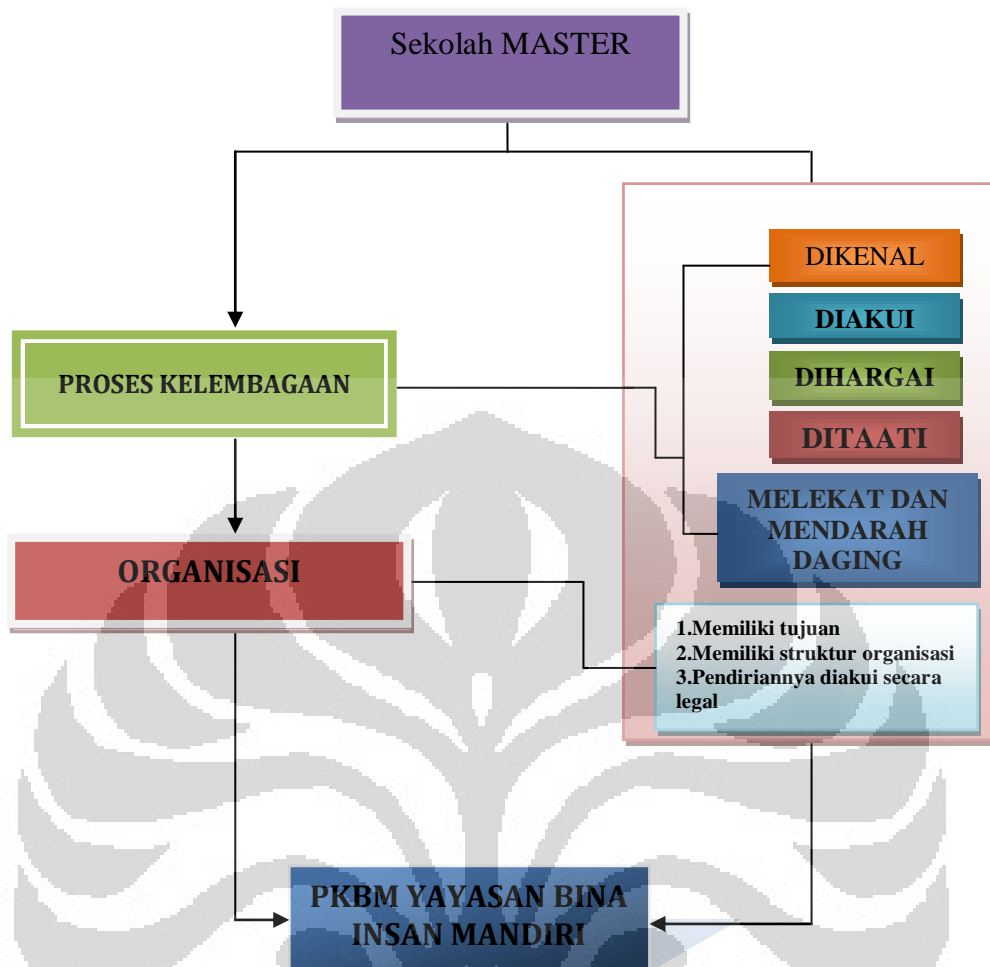
“Awalnya bebas, lalu dimusyawarakan akhirnya disePakatin karena diliat kondisi yayasan yang rentan pada pelecehan dan unsur negatif lingkungan apalagi banyak anak PUNK jadi

meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan” (MUS, Koordinator Yayasan Bina Insan Mandiri, 24 Agustus 2011)

Pada tahun 2009 Pak Nur Rohim mendapat tanah wakaf dari saudagar Arab untuk memperluas lapangan sekolah dan kelas panggung yang didirikan dua lantai. Untuk lantai dua diperuntukan kelas enam dan untuk perpustakaan. Mendapatkan sumbangan container dari ANTAM yang dijadikan dua lantai. Lantai satu untuk Taman-kanak kanak (TK) dan lantai dua untuk ruang computer.

Pada tahun 2010 didirikan asrama untuk para tutor yang berasal dari luar kota, asrama putra dan asrama putrid. Didirikan juga asrama untuk binaan putra dan anak binaan putri. Kepedulian Pak Nur Rohim akan kesehatan warga sekitar yang dipersulit dengan biaya yang mahal hingga Pak Nur Rohim membeli tempat cucian motor untuk didirikan klinik yang obat-obatan mendapat bantuan dari BAZNAZ dan dokter yang ingin mengabdikan pada masyarakat dengan merelakan waktunya melayani warga sekitar MASTER.

Di tahun 2011 Yayasan Bina Insan Mandiri mendapat kontainer dari ANTAM. Awalnya anak-anak Punk tidur dan beraktivitas di jalan seperti Terminal, kolong *fly over*, stasiun kereta. Semakin lama semakin banyak, sehingga ada kepedulian Yayasan Bina Insan Mandiri untuk memberikan tempat tinggal dan Pakaian yang layak, pemenuhan makan dan pendidikan. Didirikan asrama khusus anak-anak PUNK yang sengaja dibedakan dengan anak binaan yang lain agar tidak terganggu dan ikut-ikutan selain itu didirikan juga perpustakaan yang baru. Ada sekitar sepuluh anak-anak peserta didik yang masuk perguruan tinggi negeri favorit seperti Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Yayasan Bina Insan Mandiri semakin eksis dan dikenal masyarakat luas sehingga mutu sangat diperlukan untuk mencetak lebih banyak lulusan-lulusan yang masuk universitas negeri. Untuk itu sistem pengajaran mulai diperbaiki mengarah pada yang lebih baik dan terkoordinasi untuk itu mulai ada absensi tutor, adanya rapat evaluasi setiap bulan, visi-misi pendidikan, jadwal yang konkrit, dan mulai bertambahnya tutor.



Gambar 2.9 Alur Pikir Penelitian

Sumber: Dikembangkan dari Soejono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar 1990

PKBM YABIM mengalami proses pelebagaan norma baru bagi warga sekitar terminal Depok, meskipun pada awalnya banyak ditentang, namun perlahan-lahan sekolah terminal ini mulai diketahui. Dengan kegiatan-kegiatannya dan jelas keberadaannya yang kemudian dipahami atau dimengerti oleh banyak orang sebagai sekolah yang mereka butuhkan. Dalam perjalanannya kemudian sekolah ini ditaati dan dihargai sampai akhirnya menjadi sesuatu yang melekat dan menjadi perilaku bersama dalam keseharian hidup warga di sekitarnya dan disebut sebagai organisasi karena memiliki tujuan, memiliki struktur organisasi dan pendiriannya diakui secara legal. Hingga sekarang PKBM YABIM lebih

dikenal dengan nama Sekolah Master (Masjid Terminal) karena lokasi sekolahnya yang berdekatan dengan mesjid dan terminal Depok Baru.



BAB 3

GAMBARAN UMUM PKBM YABIM

3.1. Gambaran Umum

Pendidikan merupakan tonggak kemajuan suatu bangsa serta investasi terbesar membentuk bangsa yang maju dan mandiri, oleh sebab itu kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa adalah Tanggung jawab bersama.

Miskin bukan berarti tidak bisa belajar di sekolah, sekolah gratis pun tak menjamin siswa didik akan dibebaskan dari segala biaya sekolah. tapi PKBM Bina Insan Mandiri yang biasa dikenal dengan nama Sekolah Master (Masjid Terminal) Depok, memberi kesempatan bagi siswa-siswi untuk menikmati pendidikan dengan cuma-cuma 100% dari PAUD sampai SMA begitu di kutip dari blog resmi PKBM Bina Insan Mandiri.

PKBM Bina Insan Mandiri adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum yayasan. Lembaga ini memberikan pendidikan **Gratis** bagi para dhu'afa melalui pendidikan kesetaraan. Dalam menjalankan proses belajar mengajar PKBM Bina Insan Mandiri yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, C dan kursus serta pelatihan. Program belajar mengajar tersebut diperuntukan bagi masyarakat marginal yaitu : para pengamen, pengasong, anak jalanan, yatim dan dhu'afa. Dengan motivasi yang kuat untuk membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, kreatif dan berbudi pekerti yang luhur

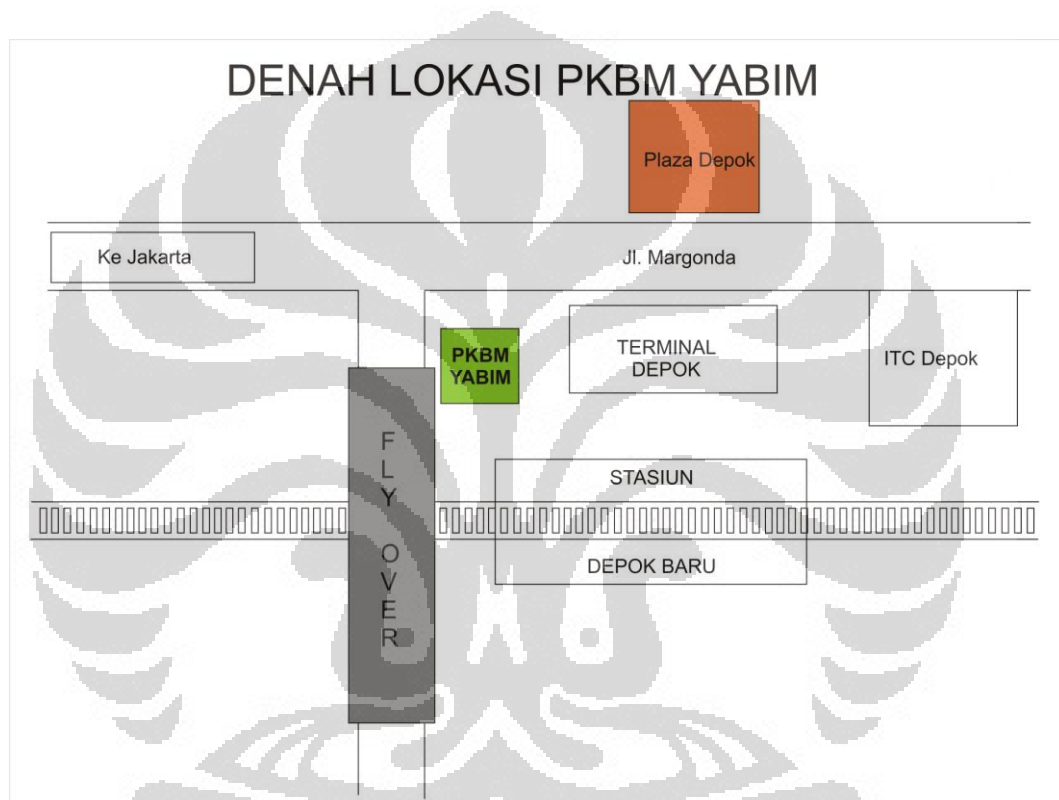
Ada sekitar 1200 warga belajar yang sedang mengenyam pendidikan di PKBM Bina Insan Mandiri, mereka begitu antusias untuk mendapatkan hak-hak pendidikannya yang selama ini terabaikan. Kehadiran PKBM Bina Insan Mandiri telah menyelamatkan pendidikan siswa-siswi yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan dasar dan menengah.

1.1.1 Letak PKBM Bina Insan Mandiri

Yayasan Bina Insan Mandiri terletak di dalam wilayah terminal tepatnya disamping fly over Depok. Boleh dikata lokasi PKBM YABIM di jantung kota Depok yaitu di Jalan Margonda Raya No. 58. Lokasi ini dekat dengan Plasa

Depok, yaitu didepan pintu utama stasiun Depok Baru.

Pada awalnya kegiatan belajar mengajar dilakukan di serambi masjid terminal, maka saat ini sekolah ini dikenal dengan nama atau sebutan Sekolah Master (Sekolah Masjid Terminal). Jumlah sementara seluruh siswa & siswi pada tahun pelajaran 2009/2010 pada bulan desember : 1147 siswa laki-laki : 639 siswa perempuan : 508.



Gambar 3.1 Denah Lokasi PKBM Yabim

Sumber: dokumentasi Yayasan Bina Insan Mandiri

1.1.2 Profil Lembaga

Sebagai sebuah organisasi PKBM Yabim memiliki struktur yang memadai, setruktur ini disusun berdasarkan kebutuhan lembaga.

1. Nama Lembaga : Yayasan Bina Insan Mandiri
2. Alamat Lembaga : Jl. Margonda raya No. 58 Terminal Depok
3. No. Telp./ HP : 77211501 Hp. 92612047
4. Nama Ketua : Nurrohim

5. Nama Bank : BANK JABAR
6. No. Rek. Bank A.N Lembaga : Nomor Rekening : 0610027193
Bank Syariah Mandiri Cab. Depok
7. Pemegang Rekening Bank : 1. Ekwanto Timbul Prasetyo
: 2. Mustami'in
: 3. Tony Zuhendra
8. NPWP : 02.556.605.0-412.000

Program yang akan dilaksanakan pada saat ini Pendidikan Kesetaraan: Paket A, Paket B, Paket C, PAUD, Keaksaraan Fungsional, Kursus Service Hp. Komputer, Percetakan, Musik, Kewirausahaan, Pembinaan Mental dan Spiritual anak -anak Terlantar dan pekerja anak.



Gambar 3.2 Peserta Didik dan Para Tutor

Sumber: Dokumentasi Yayasan Bina Insan Mandiri (2009)

1.1.3 Susunan Pengurus

Penyelenggara PKBM Bina Insan Mandiri

Pelindung : Yayasan Bina Insan Mandiri

Pembina Tekhnis : Dinas Pendidikan / Penilik PLS Dikmas

Penasehat : Drs. Poerwandriyono

Ketua : Nurrohim, Amd

Sekretaris : Tony Zulhendra
 Bendahara : Ahmad Khaerudin Jufri

Koordinator :

Koordinator PAUD : Ma'rifah
 Koordinator SD : Djessy Sofyansyah
 Koordinator SMP : Tommy Alqodiri
 Koordinator SMU : Ekwanto TP

3. 2. Program PKBM

PKBM Bina Insan Mandiri memiliki program kelas akademis program ini merupakan program sekolah layaknya sekolah umum biasa dimana siswa didik dapat belajar sama seperti anak-anak lain. Mesti dengan segala keterbatasan fasilitas tapi tidak menghambat proses belajar mengajar yang dilakukan. Guru-guru dituntut kreatif dalam menyikapi berbagai keterbatasan yang ada. Program ini merupakan pendidikan kesetaraan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) program akademis ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa didik kami agar dapat melanjutkan kejenjang perguruan tinggi. Program akademis dibagi sesuai batasan usia menjadi sebagai berikut :

3.2.1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Pendidikan usia Dini merupakan wadah yang strategis dalam pembinaan anak yang berumur 0 sampai 5 th. Teori psikologi perkembangan menerangkan bahwa pendidikan yang ditanamkan pada usia dini akan mempengaruhi kepribadian anak pada usia selanjutnya, kesalahan mendidik anak pada usia dini menyebabkan timbulnya benih kepribadian yang negative.

Kehadiran PAUD di terminal Depok yang dikelola oleh YABIM bertujuan untuk membantu para orang tua murid yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan cara mendidik anak sehingga kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dapat terealisasikan dengan baik. Walhasil anak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana dicita-citakan oleh orang tuannya. Sekitar 80 anak yang mengikuti kegiatan pendidikan di PAUD Bina Insan Mandiri.

3.2.2. Sekolah Dasar Persamaan PAKET A

Pendidikan Sekolah Dasar adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam jenjang pendidikan nasional, dasar-dasar kecakapan hidup sehari-hari mulai diajarkan pada jenjang pendidikan dasar. Sehingga setiap anak usia 6-12 th harus dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental mereka. Namun demikian, masih banyak anak-anak terlantar, anak jalanan dan para dhu'afa yang belum mendapatkan pendidikan pada tingkat dasar, factor kemiskinan merupakan penyebab utama dari ketidakberdayaan mereka dalam mendapatkan hak-hak pendidikannya.

PKBM Bina Insan Mandiri sebagai lembaga yang concern dalam pendidikan masyarakat marginal sampai saat ini mampu memfasilitasi 250 anak yang putus sekolah dasar sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya.

3.2.3. Kejar PAKET B Setara SMP

SLTP diselenggarakan oleh YABIM sebagai tindak lanjut dari jenjang dasar bertujuan memberikan bekal pengetahuan serta keterampilan bagi siswa SLTP sehingga pola pikir siswa menjadi positif dan siap menyongsong masa depan dengan bekal keterampilan yang ia miliki. Jumlah seluruh siswa yang mengikuti program SLTP sebanyak 381 siswa yang terdiri dari anak jalanan, pengamen, pengasong dan masyarakat yang tidak mampu.

3.2.4. Kejar PAKET C Setara SMU

Kejar paket C merupakan suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pola pikir dan kualitas bagi para warga belajar, melalui pendidikan di PKBM Bina Insan Mandiri jiwa kemandirian dan keterampilan serta profesionalitas dipupuk sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan usaha. Program ini juga mempersiapkan para siswa didik untuk menempuh jenjang perguruan tinggi sesuai minat dan kemampuan mereka khusus dalam segi akademis. Jumlah seluruh siswa sampai saat ini mencapai 553 siswa.

3.2.5. SMP/SMU Terbuka

Program ini setara SMP ini dikhususkan bagi siswa/I yang dapat beradaptasi dengan sekolah formal sebagaimana mestinya. Absensi kehadiran, administrasi kesiswaan dan Standar kompetensi Kelulusan mengacu pada SMP Formal/ sekolah induk yakni SMP N 10 Depok .

Demikian juga dengan SMU terbuka, Sekolah Induk SMU terbuka adalah SMU N 5 Depok. Dengan menginduk pada sekolah menengah negeri di Depok maka kualitas pendidikan SMP dan SMU Terbuka terminal harus dapat bersaing dengan SMP atau SMU Negeri di Depok.

Sederet prestasi telah diukir oleh warga belajar PKBM Bina Insan Mandiri, walaupun dalam keterbatasan mereka tetap berjuang mengukir prestasi untuk masa depan mereka dikemudian hari.

3.2.6. Kelas Bisnis

Program kelas kewiraswastaan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi jiwa berwirausaha pada siswa didik yang memang tidak minat dalam bidang akademis. Program ini akan memberikan motivasi-motivasi berwirausaha serta pelatihan-pelatihan bisnis sehingga dapat mengembangkan potensi dan memunculkan jiwa pengusaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, melihat, menggali dan mengembangkan potensi daerahnya.

Kompetensi kielulusam dari kelas wirausaha, selain memiliki standar kompetensi akademis, warga belajar memilki kemampuan bisnis dengan baik dan benar serta berwirausaha sehingga lulusan kelas bisnis ini dapat mandiri berwirausaha serta membuka lapangan kerja.

3.2.7. Kelas Seni

Program khusus bidang seni ini merupakan sarana bagi siswa didik kami yang pada dasarnya memilki bakat dalam bidang kesenian. Pendidikan seni yang menonjol di lembaga kami adalah :

A. Seni Musik barang bekas (trashick) ; adalah seni musik yang menggunakan instrument musik dari barang-barang bekas seperti tong, botol, gallon besi tua dll. Prestasi Seni musik religi (nasyid) melalui seni religius

diharapkan menumbuhkan semangat keberagaman yang akhirnya sampai dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan

B. Pelatihan Lukisan Gombal, yaitu pelatihan melukis dengan menggunakan gombal/ kain perca yang merupakan limbah penjahit / tailor dimana barang ini akan menjadi sampah bila tidak digunakan. Dengan demikian pelatihan ini sarat dan ramah terhadap lingkungan hidup.

C. Pelatihan Batik; Pelatihan batik sebagai pemberdayaan ibu-ibu dan para siswa untuk di terminal Depok. Dari pelatihan ini selain memiliki **nilai** ekonomis juga sebagai warisan budaya bangsa yang harus dipertahankan oleh masyarakat

3. 3. Program Tambahan

Lab Skill, Program dimaksudkan agar para binaan memiliki semangat (spirit) dalam menjalani kehidupan, memiliki jiwa kreatif, sikap positif, jujur dan inovatif. Pelatihan Komputer , pelatihan tehnik HP pelatihan automotif, menjahit dan sablon adalah beberapa pelatihan yang bertujuan membekali para warga belajar untuk terjun dalam dunia usaha atau kerja

Beberapa pelatihan setiap tahun yang diselenggarakan oleh mitra PKBM Bina Insan Mandiri yang melibatkan warga belajar PKBM Bina Insan Mandiri : Pelatihan Service HP, Pelatihan Salon, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Sablon, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan diaroma, Pelatihan.

3. 4. Capaian Hasil Dan Pengembangan

Dalam perjalanannya PKBM Bina Insan Mandiri telah memberi kontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat Depok. Beberapa hal yang menjadi program kerja dan berhasil dicapai antara lain:

- a. PKBM Bina Insan Mandiri telah berhasil menyelamatkan sedikitnya 1000 anak yang putus sekolah lantaran kemiskinan
- b. PKBM Bina Insan Mandiri telah mengantarkan para mustahik pendidikan mencapai kelulusan , sehingga mereka menjadi muzakki, setelah mereka bekerja dan mandiri.
- c. Setiap tahun PKBM Bina Insan Mandiri berhasil memberikan prestasi dari

berbagai macam program yang telah diselenggarakan oleh PKBM Bina Insan Mandiri

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat miskin untuk tetap berjuang, menempuh pendidikan, mengentaskan kebodohan sebagai pangkal dari kemiskinan
- e. Berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta dalam upaya mencerdaskan anak bangsa .
- f. PKBM menjadi laboratorium untuk penelitian yang berkenaan dengan pendidikan untuk masyarakat dhu'afa

3. 5. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi anak didik dan guru-guru pengajar tentunya PKBM Bina Insan Mandiri terus melakukan berbagai pengembangan fasilitas. Saat ini PKBM Bina Insan Mandiri memiliki 8 (delapan) ruang belajar, 1 (satu) ruang tutor dan tempat rapat, 1 (satu) ruang administrasi, 1 (satu) gedung penyimpanan alat, 1 (satu) ruang koperasi, 1 (satu) ruang pusdiklat, 10 (sepuluh) unit computer, 6 (enam) mesin jahit, alat peraga untuk anak, alat percetakan dan sablon.

Selain pengembangan fasilitas fisik PKBM Bina Insan Mandiri juga mengembangkan strategi pengembangan lembaga melalui berbagai kegiatan antara lain:

- a. Mengembangkan sektor usaha sebagai pengembangan usaha sekaligus pusat pelatihan (magang) warga belajar PKBM Bina Insan Mandiri.
- b. Mengembangkan sentra-sentra kerajinan sebagai sarana pengembangan kreatifitas yang bernilai ekonomi sehingga dapat menopang sektor usaha kecil dan menengah yang hasilnya untuk membantu operasional pendidikan PKBM Bina Insan Mandiri
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran PKBM Bina Insan Mandiri melalui pengembangan kemitraan dengan berbagai instansi sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi warga belajar.
- d. Meningkatkan tata kelola PKBM menuju akreditasi sehingga menjadi PKBM percontohan nasional

3. 6. Prestasi Dan Mitra Kerja

Meski dengan usia yang masih dikatakan muda kerjakeras seluruh pengurus dan guru-guru pengajar di PKBM Yabim mampu menorekhan sejarah dengan berbagai prestasi yang diraih oleh murid-muridnya. Berbagai keberhasilan tersebut antara lain adalah:

1. Juara 1 Lomba menulis surat untuk Presiden RI , BAZNAS (2005)
2. Juara II Lomba Menulis Surat untuk Preiden RI BAZNAS (2005)
3. Juara 1 II dan II Olimpiade Matematika setara SD Jabodetabek (2006)
4. Penghargaan dari MENDIKNAS dalam rangka HUT Guru (2005)
5. Juara Cerdas Cermat 1 Setara SD TK Jawa Barat 2007
6. Juara melukis murai
7. Juara III Cerdas Cermat Paket C setara SMU 2008
8. Juara I Tutor Berprestasi TK Jawa Barat 2008
9. Juara 1 Lomba PKBM TK Jawa Barat 2008
10. Juara 1 Siswa Teladan Paket B 2008
11. Juara 1 Siswa Teladan Paket C
12. Juara 1 Lomba Musik barang bekas (Trashic) TK Jabodetabek
13. Juara I Lomba Menulis Bebas
14. Beberapa lulusan diterima di perguruan tinggi negeri yakni Universitas Indonesia

Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran *stakeholder* dalam turut membantu dan mendorong proses belajar mengajar di PKBM Bina Insan Mandiri. Untuk itu pengurus Yayasan PKBM Bina Insan Mandiri terus berupaya menjalin mitra dalam menjalankan berbagai program pendidikan yang didorong. Saat ini setidaknya sudah ada beberapa mitra tetap dari PKBM Bina Insan Mandiri, yaitu :

1. USZ Mitra Baznas
2. ESQ
3. Semai Benih Bangsa
4. FE UI
5. STAI Al Qudwah
6. STIE TRINANDRA

7. BEM UI

8. Sekolah Cikeas SAC

Tabel 3.1 Data Perkembangan Siswa Sementara
PKBM Bina Insan Mandiri

TINGKAT	KELAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PAUD	A,B,C	45	59	104
	JUMLAH	45	59	104
SD	I	33	7	60
	II	22	20	42
	III	17	8	25
	IV	21	20	41
	V	18	13	31
	VI	24	19	43
	JUMLAH	135	107	242
SMP	VII	41	25	66
	VIII	56	46	102
	IX	96	55	151
	JUMLAH	193	126	319
	SMA	X	78	61
XI		61	62	123
XII		127	93	220
JUMLAH		266	216	482

Sumber: Pusat data PKBM Bina Insan Mandiri 2010)

3.7 PKBM YABIM Sebagai Suatu Lembaga

Roucek dan Warren (1984), menyebut lembaga sebagai pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai satu ketetapan untuk menggunakannya yang tetap, memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat, dan melahirkan suatu struktur. Lembaga pada mulanya terbentuk atas dorongan kesamaan pandangan, hasrat dan keinginan bersama manusia untuk hidup secara teratur. Cita-cita tentang keteraturan hidup ini berpusat pada tatanan normatif hubungan antar anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Penataan, pemeliharaan dan pengekalan keteraturan hubungan antar anggota masyarakat itu sangat tergantung pada

intensitas kesadaran bersama terhadap fungsi norma sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Defenisi ini sejalan dengan apa yang ingin dicapai dari pendirian pendirian sekolah MASTER. Ide awal pendirian sekolah ini adalah berawal dari keprihatinan melihat banyak anak-anak usia sekolah di sekitar Terminal yang semestinya bersekolah tetapi karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya, mereka tidak dapat bersekolah seperti anak pada umumnya, mereka bekerja sebagai pengamen, pengemis, pedagang asongan, tukang ojek payung, tukang semir sepatu, dan sebagainya. Gaya hidup mereka yang suka mabuk-mabukan, berjudi, dan berbuat asusila.

Untuknya, pendiri dan para pengelola sekolah ini memiliki keyakinan bahwa berbagai perilaku negatif sebagaimana digambarkan di atas dapat dirubah melalui pendekatan pendidikan. Mereka yakin bahwa anak-anak tersebut dapat dirubah melalui pendidikan dan pembinaan, dan para pengelola mampu membangun dan menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didiknya untuk menjadi lebih berarti tidak bagi dirinya, keluarga, dan orang-orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka pun memiliki masa depan yang lebih baik.

Secara konkrit, nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik disamping pendidikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dan juga pembinaan akhlak dan perilaku. Anak peserta didik diajarkan untuk mengaji, untuk wanita dianjurkan untuk memakai jilbab, untuk prianya berpakaian sopan, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Selain sebagai unsur pembinaan agar mereka terbiasa dengan pakaian yang sopan juga hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindarkan mereka dari tindak kejahatan yang mungkin terjadi, mengingat resistensi dan tindak kejahatan di lingkungan Terminal yang masih besar.

Dalam pembahasan ini sekolah MASTER dapat dikatakan sebagai lembaga karena sekolah ini hadir sebagai salah satu bentuk kritik sosial terhadap kondisi yang selama ini ditemui bahwa pendidikan yang ada hanya diperuntukan untuk orang-orang yang mampu. Gambaran tentang sekolah yang berkualitas hanya sebuah mimpi bagi masyarakat miskin. Namun hadirnya sekolah MASTER ini menjawab kritik sosial yang selama ini muncul terhadap dunia pendidikan.

Dengan mengangkat nilai kesederhanaan namun tetap mengedepankan kualitas, tetapi lebih pada bagaimana melakukan pengembangan kemampuan (*capacity building*), mengingat pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap orang. Jadi sekolah MASTER menjawab kebutuhan sosial masyarakat sekitar terminal yang tidak mampu dalam mengakses pendidikan.

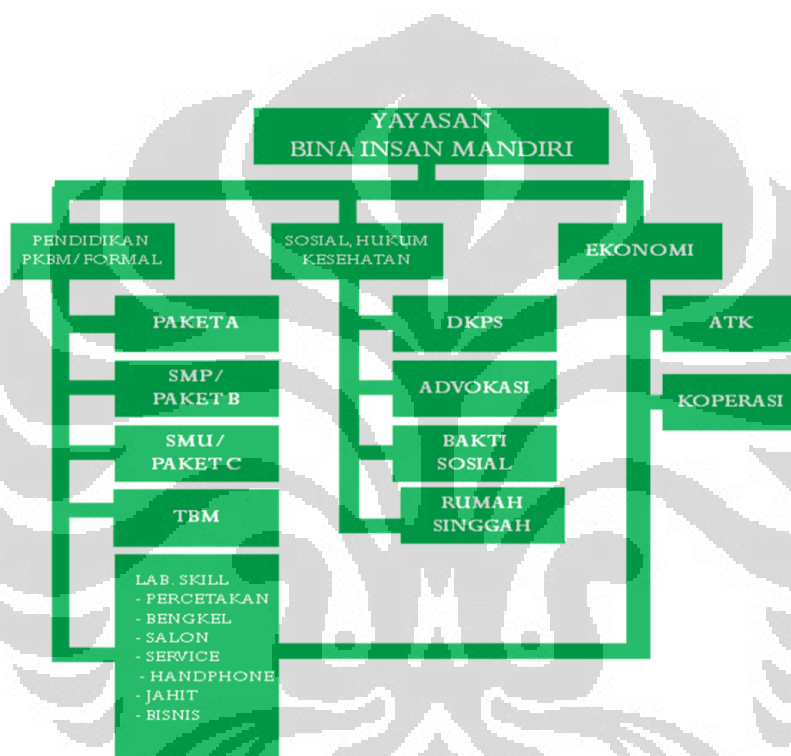
Selain kebutuhan akan pendidikan, sekolah MASTER sebagai lembaga ini juga menawarkan bantuan kepada warga seperti kebutuhan akan spiritual (mengaji, baca iqra, pesantren), menciptakan lapangan kerja bagi warga yang pengangguran, pemberian sembako, kesehatan, advokasi hukum. Hal ini merupakan beberapa hal yang disampaikan oleh Koentjaraningrat tentang prinsip penggolongan pranata berdasarkan kebutuhan hidup manusia:

- a) Pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (menciptakan lapangan kerja bagi warga yang pengangguran, memberikan pinjaman dana/koperasi simpan pinjam yang bekerjasama dengan Bank Swasta kepada warga kurang mampu untuk usaha mereka)
- b) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan (kebutuhan akan spiritual, seperti mengaji, baca iqra, pesantren)
- c) Pranata-pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia, disebut dengan *somatic institution* (Hendropuspito, 1989:63): memberikan makanan, tempat hidup dan pakaian yang layak kepada anak jalanan, pemberian sembako kepada warga, jika ada kesempatan Yayasan Bina Insan Mandiri juga berupaya menyelenggarakan sunat massal dan kawin massal secara gratis.
- d) Pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut *educational institutions*;

3.8 PKBM YABIM Sebagai Suatu Organisasi

Bila dilihat dari perspektif ekonomi, Martindale (1996) mengatakan bahwa besarnya organisasi sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pembagian tenaga kerja, hubungan formal, dan rasionalisasi (h. 142). Pertama, pembagian tenaga

kerja, menurut teori organisasi klasik akan meningkatkan efisiensi. Namun ketika mesin-mesin digunakan membantu tugas manusia, *skill* akan berpengaruh dalam menggerakkan mesin-mesin tersebut. Organisasi besar membutuhkan adanya spesialisasi. Sejalan dengan defenisi tersebut dalam struktur organanisasi Yayasan Bina Insan Mandiri terdapat bidang-bidang yang mengurus program yang dijalankan, yaitu pendidikan PKBM/ formal, sosial, hukum, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Yayasan Bina Insan Mandiri

Sumber: Data Yayasan Bina Insan Mandiri

Sekolah MASTER merupakan salah satu kegiatan yang dikelola oleh bidang pendidikan. Hubungan dalam menjalankan kegiatan dimana yayasan yang berfungsi untuk mengurus pendanaan program-program kegiatan, dan hubungan dengan pihak-pihak eksternal seperti mencari donatur dan kerjasama dengan pemerintah atau universitas yang menjadi mitra Yayasan Bina Insan Mandiri, sedangkan unit-unit di dalam bidang berperan untuk mengurus hal internal dan operasional kegiatan. Di dalam bidang-bidang juga terdapat kepengurusan

(struktur) yang bekerja menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan program-program yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua, hubungan formal, dimana individu yang menjadi anggota dalam suatu organisasi saling berinteraksi yang bersifat formal dalam hubungan ini diakibatkan adanya hirarki yang mengatur jalannya organisasi. Yayasan Bina Insan Mandiri menunjukkan suatu organisasi, sebagai badan yang normal yang memiliki legalitas hukum. Yayasan ini mendapat legalitas pada akhir tahun 2004 dari Dinas Pendidikan Kota Depok bahwa sekolah MASTER ini telah disahkan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan PAUD, Paket A, B, C serta sekolah terbuka SLTP dan SMA yang merupakan satu-satunya sekolah terbuka negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat.

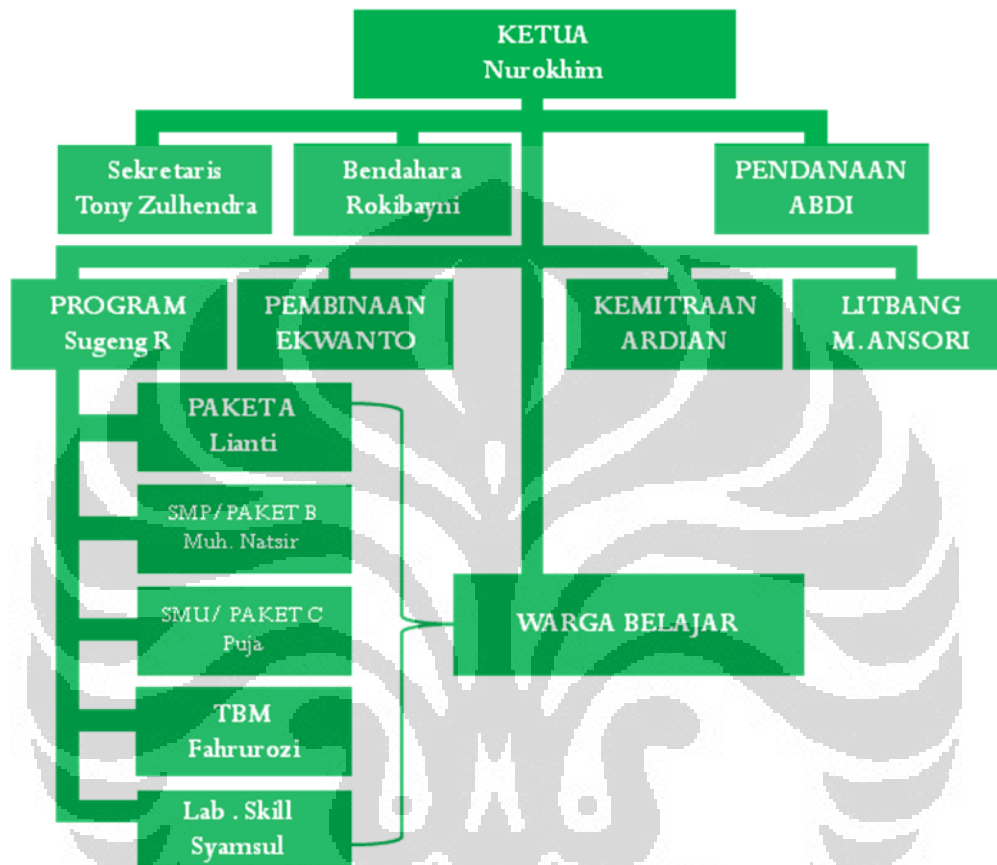
Ketiga, rasionalitas, yaitu bagaimana suatu organisasi memandang sesuatu secara rasional. Misalnya hubungan antara tenaga kerja dengan beban kerja yang harus dilaksanakan, peningkatan kapabilitas individu untuk meningkatkan *skill* sebagai upaya menjalankan tugas-tugas organisasi. Dari perangkat-perangkat kerja yang telah disepakati bersama Yayasan Bina Insan Mandiri, menempatkan koordinator lembaga (staf tetap) dan relawan yang sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan bila ada pelatihan-pelatihan tutor dari instansi-instansi lain Yayasan Bina Insan Mandiri selalu mengirim relawannya, yang baru-baru ini ada pelatihan dari LBH swasta dan Dinas Kesehatan dalam penyuluhan tentang AIDS juga diikutsertakan. Yayasan Bina Insan Mandiri selalu memberikan potensi agar Koordinator dan para relawannya semakin berkualitas.

“Dulu ada yang tamatan SMA, alumni IKIP, ada juga dari lulusan insinyur yang ngajar sekolah STM, hyang dokterandus lah kalo dulu (NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri, 27 Agustus 2011)”

Selanjutnya dikatakan:

“Buat proposal yang operatornya mas bud, dia sarjana pendidikan juga dan juga mas roy dia lulusan supervisi pendidikan psikologi, nyambung kan. Begitu juga ada syamsul ada zainudin. Saya upahin

uang transport sepuluh sampai dua puluh ribuh bisalah darisitu kami berkembang, awalnya seperti kejadian kita semua mayoritas anak jalanan.”



Gambar 3.4 Perangkat Koodinator Dan Relawan YABIM
 Sumber: Data Yayasan Bina Insan Mandiri

BAB 4

DINAMIKA PELEMBAGAAN

Temuan lapangan adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang sudah ditentukan dan hasil pengamatan peneliti. Narasumber dari penelitian ini adalah pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri, orang-orang yang terlibat langsung dengan Yayasan Bina Insan Mandiri, dan instansi yang terkait.

4.1. Proses Pelembagaan Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM)

4.1.1 Proses Pelembagaan Tahap Dikenal

Yayasan Bina Insan Mandiri mulai dikenalkan ke masyarakat sejak tahun 2000 berkat usaha dan kegigihan seorang Nur Rohim. Pak Nur Rohim adalah seorang pedagang warung tegal didaerah Terminal Depok. Melihat banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan dikarenakan harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Awalnya niat Pak Nur Rohim untuk memberikan pengajaran tidak mendapat respon yang baik, adapun tantangan yang dihadapi oleh Pak Nur Rohim;

- a. Kontra dari pihak orang tua karena mengurangi waktu anak untuk bekerja
- b. Perkelahian sesama anak didik
- c. Pencurian di musholla

“Nah disaat saya melihat seperti itu,,orang main judi bisa, mabuk-mabukan bisa, tapi anak kok ngga diurusin, terlantar anak-anaknya jadi pengamen, saya melihat kayak gitu loh, jadi saya prihatin melihat seperti itu,,, (NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri, 27 Agustus 2011)”

Selanjutnya dikatakan:

“Musholla masih kecil jadi saya izin sama pendiri musholla untuk keamanan, masih ada aja barang yang hilang. Barang yang hilang saya yang ditagih kan oleh masyarakat disitu tapi kan orang ngga berani ama

saya. Kalau ada barang-barang orang yang hilang saya yang ganti, orang yang berantem saya yang tangani dulu saya dilempari melulu,,,”

Tidak berhenti sampai disitu, Pak Nur Rohim melakukan pendekatan kepada orang tua anak dan lingkungan sekitar dengan memberikan sembako. Pak Nur Rohim juga melakukan penjangkauan ke titik rawan anak jalanan, seperti di lampu merah, di Terminal dan sebagian besar adalah di Kampung Lio yang merupakan kawasan masyarakat ekonomi kurang mampu.



Gambar 4.1 Penjangkauan Anak Jalanan

Sumber: Dokumentasi Yayasan Bina Insan Mandiri

Pada awalnya musholla lama kelamaan diperbesar menjadi mesjid (2003). Anak-anak didiknya semakin banyak, Pak Rohim mengajak pemuda masjid untuk membantunya mengajar dengan imbalan uang transport dan makan nasi bungkus, karena kepedulian terhadap anak-anak yang tidak mampu relawan yang membantu Pak Nur Rohim bertambah. Pak Nur Rohim tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga belajar mengaji dan pola hidup sehat (mandi, sikat gigi dan makan yang teratur).

Sekolah gratis juga menjadi kebutuhan dari warga yang tidak mampu, Yayasan Bina Insan Mandiri semakin lama semakin dikenal oleh masyarakat melalui;

1. Media cetak
2. Media elektronik

3. Dari mulut-ke mulut
4. *Modeling* dari alumni yang sudah lulus
5. Di bawa/diajak oleh teman
6. *Outreach*/penjangkauan relawan
7. Saudara yang sekolah di Yayasan Bina Insan Mandiri
8. Promosi lewat orang terdekat



Gambar 4.2 Tahap Dikenal Lewat Media Cetak

Sumber: Dokumentasi Penulis 2011

Saya sempat memawawancarai ibu SM yang saat itu sedang menunggu jam istirahat anak sekolah, sesekali dia melayani pembeli dia bercerita banyak tentang kemudahan anaknya bersekolah di MASTER dan bantuan yang dia rasakan dari Pak Nur Rohim.

“ya taunya dari mulut ke mulut, misalnya kalo ditanya kamu sekolah dimana,,,oohh di MASTER sekolah gratis, pasti tau. Kalo gratis orang-orang pada ikutan”(SM, warga 17 Agustus 2011)



Gambar 4.3 Wawancara Dengan Ibu SM

Sumber :Dokumentasi Penulis

“bukan untuk anak jalanan saja tapi juga untuk anak biasa yang orang tuanya kurang mampu,,,dari mulut ke mulut, bawa teman, *modeling* dari temen-temen kita yang udah lulus, *modeling* temen-temen kita yang udah kerja, temen-temen kita yang udah kuliah, makin banyak. Lalu ada liputan dari media. Media datang kesini karena ada sesuatu yang unik ” (MUS, Koordinator Yayasan Bina Mandiri 24 Agustus 2011)



Gambar 4.4 Suasana Ketika Upacara Hari Kemerdekaan

Sumber: Dokumentasi Penulis 2011

Pada saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2011 lalu, ada hal unik yang saya lihat bahwasannya acara tersebut dilakukan sangat sederhana di tengah lapangan sepak bola. Tidak ada keharusan anak untuk memakai atribut yang lengkap dan memakai pakaian yang seadanya saja. Terlihat tidak semuanya para siswa yang memakai pakaian seragam sekolah bahkan ada yang memakai sandal.

Setelah selesai upacara saya tertarik untuk mewawancarai seorang siswa yang kebetulan bersedia untuk diwawancarai setelah menghabiskan jajanannya karena setengah jam lagi akan dimulai kegiatan belajar:

“aku dulu di Alyawana kelas 3 SMP, karena waktu tamat ijazah saya ngga ke ambil, soalnya mahal kak, trus kata Pak Rohim udah disini aja, siska langsung SMA kelas dua (ST, siswa Yayasan Bina Insan Mandiri, 17 Agustus 2011)”

Selanjutnya dikatakan:

“sebelum aku sekolah di sini kan kakak aku dulu yang sekolah dulu mah masih di masjid kak dia waktu kelas satu SMP sampe tamat”

Siswi kelas 2 SMA tersebut memaparkankan bahwa dia dan keluarganya selama ini dibantu oleh Pak Nur Rohim, seperti pengobatan gratis melalui jamkesmas yang diurus oleh Yayasan Bina Insan Mandiri, untuk makan diberikan beras tiap bulan.

“Iyya itu, kalo dulu ada wali murid, ada pihak-pihak lain yang ikut membantu mempromosikan sekolah gratis ini, mengajak kaum duafa, anak jalanan untuk bersekolah disini gitu (Kak Sopian, tutor SD, 26 November 2011)”

Hal senada juga disampaikan oleh ibu SM ketika ayahnya sakit serangan jantung dia meminta pertolongan Pak Nur Rohim agar diberi perawatan gratis dari rumah sakit yang memadai, dan sekitar lima bulan yang lalu adik laki-lakinya

jatuh dari gerbong kereta. Akhirnya dari Yayasan Bina Insan Mandiri memberikan satu mobil *ambulance* untuk mengangkut jenazah adiknya.

“Kemarin waktu baPak saya sakit aja saya minta tolong ke Pak Rohim. BaPak saya kena serangan jantung, adik saya juga pernah jatuh dari atap kereta, belum lama tuh kejadian adik saya. Ntar nih empat puluh harian tanggal 7 minta tolongnya ama BaPak Rohim dibantu Pake mobil ambulance (SM, warga yang tinggal di lingkungan MASTER, 17 Agustus 2011)”

Yayasan Bina Insan Mandiri tidak hanya dikenal dan dinikmati bagi warga Terminal Depok saja, tetapi menyebar hingga ke Bogor, Citayam, Jakarta, Cisalak, Cibinong, Bojong.

“Dari Bogor, Citayam, Jakarta, Cibinong, Cisalak, Bojong (SM, warga 17 Agustus 2011)”

Ibu SM adalah warga yang tinggal di lingkungan Yayasan Bina Insan mandiri sejak tahun 2006. Ibu SM berjualan di lingkungan sekolah MASTER dan suaminya bekerja sebagai supir angkutan umum di Terminal Depok. Kedua anaknya bersekolah di MASTER secara gratis dan dia menambahkan selama bersekolah di MASTER anak-anaknya diberi kemudahan dalam mengenyam pendidikan, tidak ada pungutan dan keharusan memakai seragam sekolah.

4.1.2 Proses Pelembagaan Tahap Diakui

Sekolah terbuka pertama kali ada ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Terbuka sudah ada pada tahun 1980-an ditingkat nasional. Sekolah Menengah Pertama Terbuka mulai dilaksanakan di Kota Depok Sejak tahun 2004. Dan pertama kali diselenggarakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Depok. Sekolah terbuka yang diinisiatif oleh sekelompok orang yang melihat kondisi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah ke tingkat SMP ini dinamakan Tempat Kegiatan Belajar.

Tempat Kegiatan Belajar (TKB) ini dibagi menjadi dua bagian yaitu TKB Reguler dan TKB Mandiri. TKB Reguler diselenggarakan oleh sekolah induk tersebut sedangkan TKB Mandiri diselenggarakan oleh inisiatif sekelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. TKB Mandiri ada sejak tahun 2004 ditandai dengan nama Yayasan Sekolah Rakyat. .

SMP Negeri 10 mulai menerima TKB Mandiri di tahun 2004 yang dimulai di daerah Terminal Depok (PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri) yang kedua yaitu TKB Mandiri ATS-Tsiqah yang letaknya di daerah Sawangan Depok. Tempat Kegiatan Belajar Reguler yang menginduk ke SMP Negeri 10 ada tiga yaitu TKB Pengasinan, TKB Rangkapan Jaya, dan TKB Bedahan. Sedangkan untuk TKB Mandiri dibagi menjadi lima yaitu Al-Kalam, Al-Atas, Bina Mulia, Al-Sihat, dan ATS- Tsiqah. TKB Mandiri Al-atas dan TKB Mandiri Bina Mulia merupakan milik dari Yayasan Bina Insan Mandiri. Bedanya adalah kalau TKB Mandiri Bina Mulia cakupannya untuk daerah Stasiun Depok Baru sedangkan TKB Al-Atas daerah cakupan Terminal Depok. Tetapi lama-kelamaan menjadi satu dan siswanya belajar di sekolah MASTER walaupun Yayasan Bina Insan Mandiri masih menggunakan nama kedua TKB Mandiri tersebut.

Lanjut dari pembicaraan Pak Yamin bahwa awal dari keinginannya untuk membuka SMP Terbuka adalah terinspirasi dari perjuangan seorang Nur Rohim yang berhasil mendapat pengakuan dari pemerintah dan meluluskan peserta didik di tahun 2005. Sehingga dia membuka SMP terbuka ATS-Tsiqah di tahun 2006. Pak Yamin merupakan salah satu guru di SMP Negeri 10 dan sekaligus Ketua TKB Mandiri ATS-tsiqah

“Dari sejarahnya, SMP terbuka ini ada sejak tahun 1980-an. Di tingkat Nasional udah mulai di launching cumin untuk khusus di Depok, khusus di SMP 10 itu tahun 2000an, tapi yang mengelola disebut TKB regular karena inisiatif dari guru-guru SMP 10, itu inisiatif dari oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mulai 2004 ditandai dengan namanya kalo ditingkat pusat ada namanya yayasan sekolah rakyat. Mereka yang mengelola sekolah terbuka nama TKB nya TKB Mandiri. SMPN 10 mulai menerima TKB

Mandiri itu tahun 2003/2004. Yang pertama Terminal, yang kedua itu TKB Mandiri Ats Tsiqah. Kalo ditanya TKB itu ada dua, TKB Reguler yaitu TKB yang dibentuk oleh induk itu sendiri, ada tiga, TKB pengasinan, TKB Rangkaian Jaya dan TKB Bedahan dan TKB Mandiri yaitu sebagian perannya diambil masyarakat, Terminal, Al-kalam, Al- tsiqah. Jadi total TKB yang menginduk di SMPN 10 itu ada 8 TKB. TKB regular ada 3 dan TKB Mandiri ada 5 yaitu Al kolam, Bina Mulia, Al Atas/dua-duanya di Terminal, kemudian Ats-tsiqah, Al-sihat (YM, Guru SMPN 10, 24 April 2012)”

Senada dengan yang disampaikan oleh Pak Yamin, bahwa Pak Nur Rohim juga atas dasar yang sama yaitu untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dan merangkul anak yang putus sekolah, memiliki keinginan untuk mengenyam pendidikan selayaknya sekolah formal. Membayangkan peserta didik yang lulus kalau tidak disertai dengan ijazah sangat disayangkan. Sehingga Pak nur Rohim beserta relawan berjuang mengadvokasi agar mendapat pengakuan dan peserta didik juga dapat melanjutkan kebangku kuliah bahkan untuk bekerja.

“saya mengurus legal tahun 2004 sampai 2005 terus ada perubahan tahun 2006” (NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri, 27 Agustus 2011)

Pak Nur Rohim mendapat pengakuan eksternal dari Dinas Pendidikan Kota Depok dan dasar pendiriannya diakui oleh AKTA Notaris Dwi Priharyanto Nomor 02 tanggal 25 februari 2005. Tidak hanya itu Yayasan Bina Insan Mandiri semakin dikenal dengan banyaknya liputan dari media cetak dan elektronik.

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka dimulai di tahun 2007. Pak Yamin bersama rekan-rekan termasuk Pak Nur Rohim sebagai perintis dari SMA Terbuka yang merupakan SMA Terbuka pertama ditingkat nasional yaitu di Kota Depok. Awalnya SMA Terbuka akan menginduk ke Sekolah Menengah Kejuruan. Tetapi persoalannya di tahun 2007 SMK di Kota Depok masih baru

dirintis dan belum siap untuk menaungi SMA terbuka pada saat itu. Sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh adalah menginduk ke SMA Negeri 5 Depok. Dan TKB Yayasan Bina Insan Mandiri merupakan salah satu sekolah SMA terbuka yang menginduk di SMA Negeri 5.

“,,saya bersama teman saya terasuk Pak Rohim merintislah,,,karena kalo dicari-cari ditingkat nasional belon ada SMA terbuka, justru ditingkat nasional belon ada. tapi kalo ditanya SMP terbuka ibu cari di DepDiknas ada d lt 16 ged E,Klo SMA terbuka mereka belon ada, SMA terbuka pertama kali ada di Depok, itu Juli 2007, awalnya kita coba SMK terbuka (YM, Guru SMPN 10, 24 April 2012)”

4.2.3 Proses Pelembagaan Tahap Dihargai

Segudang prestasi telah dicetak baik dari peserta didik, tutor dan dari seorang Nur Rohim. Adapun prestasi yang pernah dihargai yaitu;

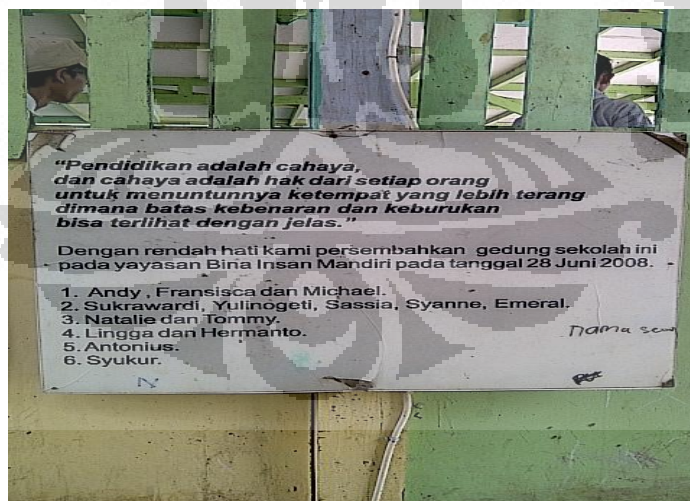
1. Juara 1 Lomba menulis surat untuk Presiden RI , BAZNAS (2005)
2. Juara II Lomba Menulis Surat untuk Preiden RI BAZNAS (2005)
3. Juara 1 II dan II olimpiade matemataika setara SD Jabodetabek (2006)
4. Penghargaan dari MENDIKNAS dalam rangka HUT Guru (2005)
5. Juara Cerdas Cermat 1 Setara SD TK Jawa Barat 2007
6. Juara melukis murai
7. Juara III Cerdas Cermat Paket C setara SMU 2008
8. Juara I Tutor Berprestasi TK Jawa Barat 2008
9. Juara 1 Lomba PKBM TK Jawa Barat 2008
10. Juara 1 warga belajar Teladan Paket B 2008
11. Juara 1 warga belajar Teladan Paket C
12. Juara 1 Lomba Musik barang bekas (Trashic) TK Jabodetabek
13. Juara I Lomba Menulis Bebas
14. Juara Pencak silat tingkat Jabodetabek

15. Diliput di 11 stasiun swasta (iklan gratis)

Selain prestasi yang diberikan kepada tutor dan peserta didik, penghargaan dari masyarakat pun kian menambah citra yang baik kepada seorang Nur Rohim yaitu dengan diberikannya penghargaan dari SCTV dalam program Inspiration Awards pada tahun 2011 yaitu program yang menginspirasi bangsa akan hadirnya sosok pahlawan ditengah keterpurukan yang dialami rakyat Indonesia. Pak Nur Rohim hadir sebagai pahlawan yang mencerdaskan anak bangsa ditengah-tengah ketidak mampuan keluarga, masyarakat dan pemerintah agar anak-anak dapat mengenyam pendidikan gratis.

Selain penghargaan tersebut Pak Nur Rohim dipercaya untuk membawakan iklan multivitamin yang mengutamakan tema kekuatan, kegigihan seseorang yang dapat menginspirasi masyarakat. Iklan obat multivitamin ini ditayangkan di televisi baru-baru ini (2012). Dia juga mengatakan akan ada tiga iklan yang dipercayakan kepadanya tetapi beliau masih pikir-pikir dulu.

4.2.4 Proses Pelembagaan Tahap Ditaati



Gambar 4.5 Plangkat Di Samping Kelas Pangung

Sumber: Dokumentasi Penulis 2011

Plangkat yang menempel di dinding kayu kelas panggung ini seperti cerminan keinginan dari seorang Nur Rohim. Keinginannya untuk menjadikan

anak-anak jalanan sebagai orang-orang yang termarginalkan menjadi sosok yang berguna dan menjadi pemimpin bangsa.

“,,ibarat mutiara, anak-anak ini yang sebagian besar tidak punya biaya untuk sekolah, bahkan untuk transport. Mereka adalah mutiara yang masih terpendam dalam lumpur, kotor, dan belum dilihat orang. Oleh karena itu mereka dibina, kita latih, ibarat mutiara kita bersihkan lagi dari lumpur, dipoles, disusun jadi perhiasan yang bernilai tinggi,” ungkap wanto (Depok, Mei 2009)

Anak-anak peserta didik selain tergolong dari anak yang kurang mampu tapi juga berasal dari anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan. Ini terbukti dari asrama-asrama yang dipergunakan bagi anak-anak terlantar dan asrama khusus anak Punk. Bagi seorang Nur Rohim pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan anak bangsa saja, yang terpenting baginya adalah bagaimana membentuk akhlak anak tersebut.

Untuk itu pendekatan secara ilmu agama sangat penting untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual anak. Hal tersebut tidaklah mudah sehingga diperlukan hubungan yang baik antara tutor/relawan dan anak peserta didik. Pendekatan yang dilakukan oleh para tutor dan relawan Yayasan Bina Insan Mandiri adalah pendekatan seperti adik-kakak. Sehingga dengan pendekatan seperti itu tidak mencerminkan adanya *gap* antara tutor dan anak didiknya dan memudahkan para tutor untuk memberikan arahan yang baik kepada anak-anak binaan.

“,,kita mendekatkan diri dengan anak binaan kita seperti hubungan layaknya adik-kakak, maksudnya supaya terjalin lebih dekat, ngga semuanya dari anak binaan yang memiliki keluarga,,,sehingga ngarahinnya gampang, kan beda lah kalo di sekolah formal lainnya (TM, Tutor SMA, 15 Agustus 2011)”



**Gambar 4.6 Pendekatan Yayasan Bina Insan Mandiri
Kepada Warga Binaannya**

Sumber : Dokumentasi Penulis 2011

Ternyata pendekatan seperti ini cukup efektif nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak binaan lama-kelamaan ditaati oleh anak-anak binaan, seperti larangan merokok, membawa handphone, menganjurkan berpakaian sopan, disiplin waktu, termasuk menganjurkan untuk siswi yang beragama muslim memakai jilbab.

“Kalau di sini enak, beda, tertib banget, misalnya kita dilarang bawa handphone, ngga boleh Pakai Pakaian yang gantung, ngga boleh bawa alat elektronik, gitu pokoknya, peraturannya bagus banget (ST, siswa MASTER, 17 Agustus 2011)”

Selanjutnya dikatakan:

“Awalnya ngga, kemudian dimusyawarahkan akhirnya disePakatin untuk berPakaian sopan seperti jilbab untuk yang muslim itu tahun 2008, apalagi melihat kondisi yayasan yang rentan terhadap pelecehan dan unsur negative lingkungan, banyaknya anak Punk yang tinggal dan numpang makan iya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan (MUS, 24 Agustus 2011, Koordinator Yayasan Bina Insan Mandiri)”

4.1.5 Proses Pelembagaan Tahap Menjadi Perilaku Bersama

Ketika norma yang ada dalam proses pelembagaan dikenal, diakui, dihargai, ditaati, selanjutnya akan menjadi perilaku bersama. Jika ditilik kondisi awal dari masyarakat sekitar Terminal Depok hingga saat ini adanya perubahan yang signifikan. Keberadaan norma-norma yang ditawarkan ke masyarakat diterima dengan baik tahap per tahap yang seiring waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.

Ketika Pak Nur Rohim bangkrut dan memulai usaha warteg di daerah Terminal Depok, dia melihat pemuda-pemuda yang mabuk, bapak-bapak berjudi, anak-anak mereka terlantar dan disuruh mengamen, mengasong, minta-minta. Dia melihat jika malam hari di samping musholla sering dijadikan tempat maksiat. Karena memang kondisi di sekitar musholla terdapat warung remang-remang dan tempat biliar.

“Nahh,, disaat saya melihat seperti itu,, orang maen judi bias, mabuk2an bias, tapi anak kok ngga di urusin, terlantar, anak-anak nya jadi pengamen, saya melihatnya kayak gt loh,, jadi say prihatinlah melihat seperti itu, ,,apalagi rumah-rumah ibadat dijadikan klo malem tuhh org distu mabook tuuhh,, klo pagi2x tuuh bersihin kondom, kemana-mana.(NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri 21 Agustus 2011)”

Ditahun 2000 Pak Rohim tinggal di Depok dan mulai mengajak anak-anak untuk bersekolah, Pak Rohim mau memulainya di musholla dia meminta izin kepada pengurus musholla agar diberikan tempat bagi anak-anak jalanan belajar membaca dan menulis. Awalnya ini tidak mudah mengajak anak-anak yang bekerja di jalan untuk belajar. Tantangan yang dihadapi adalah para orang tua anak yang merasa terganggu akibat anak yang harusnya bekerja harus menghabiskan beberapa jam untuk belajar.

Tapi Pak Nur Rohim tidak kehilangan akal, dia memulai pendekatan dengan orang tua anak dan masyarakat sekitar dengan memberikan sembako. Pak Nur Rohim melakukan penjangkauan hingga ke titik rawan anak jalanan, seperti

di lampu merah, di Terminal dan sebagian besar adalah di Kampung Lio yang merupakan kawasan masyarakat ekonomi kurang mampu.

Pada awalnya musholla lama kelamaan diperbesar menjadi mesjid (2003). Anak-anak didiknya semakin banyak, Pak Rohim mengajak pemuda masjid untuk membantunya mengajar dengan imbalan uang transport dan makan nasi bungkus, karena kepedulian terhadap anak-anak yang tidak mampu relawan yang membantu Pak Nur Rohim bertambah. Pak Nur Rohim tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga belajar mengaji dan pola hidup sehat (mandi, sikat gigi dan makan yang teratur).

Semakin lama semakin bertambah peserta didik karena selain diberikan pengajaran secara gratis tetapi juga diberi makan. Selain untuk anak jalanan sekolah MASTER juga untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kehidupan Jalanan dan didikan dari orang tua yang minim membuat perilaku anak yang jauh dari norma-norma yang berlaku di masyarakat misalnya sering ada barang yang hilang sehingga warga sekitar yang biasanya sholat di musholla tersebut menagih ke Pak Rohim dan juga berantem sesama peserta didik.

Lingkungan warga yang berdekatan dengan musholla yang tak luput dari pandangan Nur Rohim, suka melakukan perbuatan yang tidak baik seperti gonta-ganti pasangan.

“Di mesjid ‘,ini nah saksinya,’ sambil menunjuk seorang bPak usia 60 an yang sedang nukang d sekolah itu’(21 Agustus 2011)”

Pak Nur Rohim menunjuk pada pekerja bangunan yang sedang mengecat tembok kelas. Pak Jack merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari Yayasan Bina Insan Mandiri dan dipercaya Pak Nur Rohim untuk membetulkan listrik, atap yang bocor atau pun membangun kelas baru. Saat diwawancarai Pak Nur Rohim sedang duduk santai mengawasi kelas sambil menceritakan sejarah awal yayasan ini berdiri dan harapan dia kedepan dalam mengembangkan Yayasan Bina Insan Mandiri ini agar dapat dirasakan masyarakat luas. Kendala tempat

yang kurang memadai menampung banyak peserta didik dan sengketa tanah dari instansi terkait.

“Si Jack nieh,, nieh ada nih saksinya orang-orang batak maen aplek disitu, Iyyaa,,batak2x yg brengsek-brengsek,,karena kebetulan khn org batak

Bukan batak aja, betawi jg ada, jawa jg ada , dari mana-mana jg ada, cuma, kebanyakan waktu itu khn batak gitu (NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri, 21 Agustus 2011)”

Selanjutnya dikatakan:

“Klo orangnya brengsek khn ngga batak, ngga betawi khn. Batak-batak yang brengsek karena kan kebetulan anak ini orang batak dari awal banyak orang dimana dimana cuman kebanyakan orang situ orang batak gitu. kalau orang batak brengsek kalau dia baik tidak apa-apa, dulu ini pelakunya nih ”

Pak Nur Rohim menambahkan bahwa pelayanannya tidak sebatas dengan anak-anak didiknya saja. Tetapi dia juga memberikan nilai-nilai agama yang dapat membantu warga sekitar memperbaiki akhlaknya/ merubah perilaku mereka. Dia suka memberikan pengajian kepada warga dan tak sungkan untuk membantu warga yang memerlukan bantuannya seperti pengobatan gratis dengan cara advokasi, melaksanakan sunat gratis. Perlunya norma-norma baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekitar Terminal dirasakan Pak Nur Rohim. Dengan pendekatan yang dia lakukan dia juga mengadakan nikah massal kepada pasangan-pasangan yang belum resmi menikah dan tinggal bersama (kumpul kebo). Memberdayakan warga yang tidak mampu dengan memberikan dana wira usaha.

Selain itu Pak Rohim juga membantu advokasi hukum terhadap warganya yang tertangkap Satuan Polisi Pamong Praja akibat penertiban kaki lima,

mengamen, atau kasus tawuran. Tidak hanya itu juga dia juga memberikan sembako (Sembilan bahan pokok) terhadap warga yang berkekurangan. Nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan menjadi norma yang diaati oleh warga sekitar Terminal.

“Ya tanya aja itu nikah-nikah ini bini muda sampai punya bini, ya kalau jauh-jauh bininya dibotaki oleh orang batak. Pelakunya si jael masih ada (NR, Yayasan Bina Insan Mandiri 21 Agustus 2011)”

Kondisi warga Terminal sekarang lebih aman dan nyaman dijadikan tempat tinggal dan mata pencaharian. Masjid (dulunya musholla) menjadi tempat peribadatan yang semakin lama semakin ramai dan nyaman. Pengunjung yang datang juga baik dari warga sekitar Terminal, pedagang, pekerja kantor yang sebatas lewat, bahkan tamu-tamu pejabat negara yang sengaja datang ke Yayasan Bina Insan Mandiri. Tidak ada lagi ditemui warga yang mabuk-mabukan, tawuran apalagi kumpul kebo.

Norma-norma yang sengaja ditanamkan oleh Pak Rohim sudah menjadi bagian kehidupan warga Terminal Depok dan peserta didik. Dia sadar bahwa sekolah MASTER berada dalam tempat pengajaran yang tidak efektif sebagai tempat tumbuh kembang potensi anak. Berdekatan dengan penduduk tanpa disekat oleh tembok pembatas sehingga pendekatan terhadap penduduk menjadi bagian penting dari proses keberlangsungan sekolah tersebut.

Warga yang tinggal di sekitar Terminal Depok juga merasa dibantu dengan adanya sekolah gratis dan bantuan social dari Yayasan Bina Insan Mandiri. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Yayasan Bina Insan mandiri ini diakui juga bermanfaat bagi kehidupan warga. Jika ditilik dari masa ke masa perubahan perilaku warga semakin baik dan norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

4.2 Peran Pemerintah Daerah Penyelenggaraan PKBM YABIM

Sejak berdirinya Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) dan dikenal oleh masyarakat luas (2005), banyak warga yang datang untuk meminta bantuan baik dari segi hukum seperti pembuatan Kartu Tanda Pengenal, orang tua yang anaknya tertangkap oleh Sat Pol PP, di bidang kesehatan seperti pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu, pemenuhan sandang dan pangan bagi anak-anak jalanan, di bidang ekonomi yaitu penguatan ekonomi keluarga, disediakannya koperasi simpan pinjam, dan penyediaan lapangan kerja bagi warga yang membutuhkan. Umumnya warga yang dibantu adalah warga yang tinggal di sekitar Yayasan Bina Insan Mandiri, seperti warga yang tinggal di laPak-laPak Terminal, di jalan Arif Rahmana Hakim, warga yang tinggal di Kampung Lio yang kesemuanya itu adalah warga kurang mampu. Rata-rata pekerjaan keluarga adalah pedagang asongan, pengamen, buruh cuci, dan pemulung.

Dalam membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat Pak Rohim dibantu oleh para relawan yang tergerak hatinya untuk membantu sesama. Tidak terlepas dengan berbagai usaha yang dilakukan, bantuan dari instansi-instansi yang terkait sangat diperlukan. Seperti dari Dinas Sosial Kota Depok ada hubungan saling membantu yang terjalin diantara Yayasan Bina Insan Mandiri dan Dinas Sosial. Dalam hal pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu, Yayasan Bina Insan Mandiri mengupayakan pengobatan gratis ke Rumah Sakit-Rumah Sakit rujukan dengan menerbitkan Jamkesmas. Dinas Sosial sebagai instansi yang merekomendasi Jamkesmas dalam hal ini sangat membantu dan tidak mempersulit. Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya sering terhambat oleh hal-hal teknis. Di kota Depok permasalahan Sosial seperti anak-anak yang bekerja di jalan dan anak-anak terlantar masih terlihat. Ketika anak-anak tersebut beraksi di jalan dan terjaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diberikan pelayanan sosial. Di Kota Depok belum ada Panti Sosial apalagi Rumah Singgah sebagai tempat tinggal alternatif anak terlantar, Yayasan Bina Insan Mandiri sebagai pilihan ideal untuk anak-anak terlantar yang terjaring dari Satuan Polisi Pamong Praja.

“Kita sudah mempunyai kesepakatan seperti ada orang terlantar, yang sakit jadi penanganannya itu dari YABIM ke Dinas Sosial lalu ditangani ke RSJ/ RSUD untuk penanganannya. Jadi menurut saya YABIM terbantu dan Dinas Sosial juga terbantu. Apalagi banyak anak-anak yang terlantar jadi mo kita bawa kemana kan di Depok belum ada Rumah Singgah yam au tidak mau kita bawa ke YABIM(DN, Staf R.Kesos Dinas Sosial, 22 November 2011)”

Sebelum berdirinya Yayasan Bina Insan Mandiri banyak anak-anak yang bekerja di jalan, misalnya ojek payung, peminta-minta, pengamen yang kerap ditemui di lampu-lampu merah Kota Depok. Dengan adanya Yayasan Bina Insan Mandiri anak-anak yang bekerja di jalan semakin berkurang.

“ Kemaren sebelum ada anak ngamen , ojek payung minta-minta ya macem-macem belum lagi anak jalanan yang sering ditemui dilampu merah. Dengan adanya yayasan ini ngga keluar ngga ditemui dilampu merah itu dah bagus sekali gitu loh (DN, Staf R.Kesos Dinas Sosial, 22 November 2011)”

Dinas Pendidikan sebagai instansi fasilitator penyelenggaraan pendidikan sangat berperan bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Yayasan Bina Insan Mandiri. Dalam hal mempermudah perizinan operasional penyelenggaraan PKBM dan sekolah terbuka, meringankan biaya kelulusan siswa, biaya ujian, dan ijazah. Adanya dana bantuan pendidikan untuk Paket A, B, dan Paket C. Dana bantuan tersebut berasal dari Provinsi dan Pemerintah pusat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan sarana alternatif pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah tetapi dipersulit dalam hal persyaratan masuk sekolah. Yayasan Bina Insan Mandiri hadir sebagai sekolah gratis dengan tidak mempersulit persyaratan

masuk sekolah hanya dengan kemauan dan tekad yang kuat dari anak dapat langsung mengenyam pendidikan.

Yayasan Bina Insan Mandiri sebagai yayasan sosial sekaligus penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didirikan oleh sekelompok orang yang peduli terhadap masa depan anak bangsa. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat seyogianya adalah milik masyarakat, Dinas Pendidikan hanya bersifat sebagai fasilitator dan pemantau selama berlangsungnya PKBM tersebut. Setiap bulan PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri selalu dimonitoring. Banyak alumni dari PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri telah masuk ke universitas-universitas negeri termasuk Universitas Indonesia, IAIN dan universitas Diponegoro.

“lembaga yang bagus, dia banyak membantu orang-orang yang tidak mampu, banyak jebolan-jebolan YABIM yang masuk UI , IAIN banyak dari PKBM itu yang berhasil NZ, Staf Dinas Pendidikan, 24 November 2011)”

PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mem-back up pendidikan formal merupakan tugas dari PKBM tersebut, karena ketidakmampuan ekonomi dan sosial masyarakat maka didirikan PKBM dalam rangka membantu pendidikan non formal yang di dalamnya ditawarkan tidak hanya membaca dan menulis tetapi juga keterampilan yang membuat anak-anak peserta didik siap kerja dan ini sesuai dengan pemberdayaan masyarakat.

“Kalo PKBM itu khan puusat kegiatan belajar masyarakat, yang tugasnya mem-back up yang formal, karena ketidakmampuan ekonomi, social dan masyarakat makanya dibuat PKBM untuk membantu pendidikan nonformal,disitu banyak keterampilan, dan itu cocok dijadikan pemberdayaan masyarakat (NZ, Staf Dinas Pendidikan, 24 November 2011).”

Tabel 4.1 Proses Pelembagaan Yayasan Bina Insan Mandiri

Level Tindakan	Who	What	Where	When	Why
Dikenal	Pak Nur Rohim Mustamiin		Warga Terminal	2000-2003	Karena di daerah Terminal Depok merupakan warga yang kurang mampu dan banyak anak-anak jalanan -Dari mulut ke mulut -Media Elektronik -penjangkauan ke wilayah anak jalanan -bawa teman -Modeling dari alumni
Diakui	PEMDA Depok	Yabim disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai PKBM yang menyelenggarakan PAUD, Paket A, B, C serta sekoloah terbuka SMP dan SMA dan dasar pendiriannya diakui oleh AKTA Notaris Dwi Priharyanto nomor 2 tanggal 25 Februari 2005	Depok	2005	Karena anak-anak lulusan MASTER membutuhkan ijazah yang legal Yabim disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai PKBM yang menyelenggarakan PAUD, Paket A, B, C serta sekoloah terbuka SMP dan SMA dan dasar pendiriannya diakui oleh AKTA Notaris Dwi Priharyanto nomor 2 tanggal 25 Februari 2005

Lanjutan

Dihargai	Telah mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai instansi Para tutor	Telah mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai instansi	Sekolah MASTER	Dari awal tahun 2005 sampai sekarang ini sudah banyak mendapatkan penghargaan	Karena motivasi dari para tutor ke anak binaan dan menyalurkan anak binaan ke berbagai perlombaan
Ditaati	Para Tutor	<ul style="list-style-type: none"> - Berpakaian suppon, dan bagi wan - ita muslim memakai jilbab - Dilingkungan belajar tidak ada yang boleh merokok <p>Walaupun sebagian warga belajar adalah anak jalanan tapi sudah berperilaku baik</p>	Sekolah MASTER	2008	Karena awal pendirian sekolah ini selain pendidikan adalah peningkatan akhlak anak binaan
Menjadi Perilaku bersama	- Pak Nur Rohim dan Relawan YABIM	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah terbiasa dengan nilai dan aturan yang berlaku di YABIM - Masyarakat yakin dan bergantung dengan YABIM - YABIM lebih dikenal masyarakat dengan nama MASTER 	Sekolah MASTER	2009- sekarang	karena bantuan yang diberikan tidak hanya pendidikan gratis tapi bantuankesehatan, advokasi hukum, dan sosial

Sumber: Telah diolah kembali

BAB 5

ANALISIS DINAMIKA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

5.1 Awal Ide Berdiri (1994-1999)

Kawasan Terminal Depok yang sekarang sangat ramai dan menjadi tempat lalu lintas bus dan angkutan baik dari dalam maupun luar kota dulunya adalah empang (1998). Stasiun Depok Baru yang merupakan stasiun kereta yang sudah lama berdiri di Depok sudah mengalami tiga kali perpindahan sekitar tahun 1970-an. Masuk ke dalam pemukiman penduduk yang ada di samping Terminal dan di belakang sekolah MASTER bukanlah seramai sekarang penduduk asli yang tinggal di sekitar Terminal juga sudah tidak banyak awalnya adalah kebun yang sangat luas. Akhirnya lama-kelamaan digusur untuk pelebaran daerah Terminal Terpadu Depok. Bangunan ITC yang berdiri megah diantara bangunan-bangunan lainnya merupakan bangunan yang baru yang berdiri tahun 2005. Pasar kemiri yang berada persis dekat dengan Stasiun Depok Baru sudah ada sejak tahun 1986 dan dulunya adalah Ramayana. Warga berdatangan dan meramaikan Terminal ini semenjak tahun 1990-an.

”Dulunya disini tanah kosong,,awalnya juga sekolahnya pada di musholla, lama-kelamaan dibesarin dibangun masjid sekitar tahun 2000-an. Saya udah dari taun 1985 disini, dulu belum ada Terminal tapi sawah dan kebun,, bangunan ITC tahun 2005 kalo Terminalnya sebelumnya udah ada tahun 1998,, kalo stasiun keretanya sebelum saya lahir udah ada, bahkan sudah mengalami tiga kali pindah kalau Pasar Kemiri semenjak saya SMP udah ada mba, sekitar 1986-lah mba. Iya, masih duluan ramayana, dulunya itu sawah,,,1990-an warga disini semakin ramai” (MAR, warga, 20 Agustus 2011)

Pak Rohim ketika itu (1994-1995) sedang merintis usahanya sebagai distributor bahan sembako dan memiliki lima kios, yang diantaranya di Tanah Abang, Lebak Bulus, Kebayoran, dan Terminal Depok. Sehari-hari memasok

barang ke lima kios miliknya, dia melihat disekitar Terminal Depok banyak sekali pemuda disitu mabuk-manukan, berjudi, dan anak-anak mereka dibiarkan terlantar dan disuruh mengamen, mengasong dan meminta-minta. DamPak penyakit sosial kian terasa ketika saat itu ada seperti sayembara yang namanya Sumabangan Sosial Berhadiah yang resmi dari Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya yang ketika itu bekerjasama dengan departemen olah raga beli nomer dengan harga Rp 1.000,00 bisa berhadiah Rp 1.500.000,00 yang diundi setiap minggu di kementerian sosial, masyarakat kalangan bawah tiap pulang “narek” langsung berjudi seperti itu. Semakin lama semakin parah, apalagi beliau melihat lingkungan sekitar musholla (sekarang menjadi masjid) dijadikan tempat maksiat, dimana kalau sudah menjelang malam di jadikan tempat berjudi dan mesum. Beliau berpikir bagaimana cara menyelamatkan masyarakat seperti itu, apalagi dim iris melihat masa depan anak yang terlantar seperti itu.

“,, saya punya lima kios ada di tanah abang, kebayoran, Depok. Sehari-hari saya liat di sekitar Terminal Depok banyak sekali orang-orang disitu pada mabuk, berjudi dan anak-anak mereka dibiarkan terlantar dan disuruh mengamen, mengasong dan meminta-minta,,,,diperparah dengan adanya sayembara dari Departemen Sosial bekerjasama dengan Departemen olah raga,,,,semakin lama semakin parah saya melihat lingkungan sekitar musholla dijadikan tempat maksiat,, ”(NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri 21 Agustus 2011)

Pada tahun 1998-1999 Pak Rohim diperhadapkan dengan pilihan, dimana ketika itu terjadi kerusuhan dimana-mana, usaha beliau bangkrut, harga menjadi melambung tinggi, dan daya beli masyarakat menjadi rendah. Dan dia harus berdagang sendiri, di sekitar Terminal Depok dan membuka usaha warteg bersama istri. Dari situlah dia melihat anak-anak bekerja mulai dari yang mengamen, mengasong, sampai menjadi tukang minta-minta. Di usia bersekolah mereka tidak bersekolah tetapi sudah disuruh oleh orang tuanya untuk bekerja. Beliau teringat ketika masa kecilnya, ayahnya yang juga jualan di pasar tanah

abang, dan ibunya juga berjualan di Terminal Tanah abang, dia juga bergaul dengan anak-anak seperti itu, sungguh miris. Beliau pada saat itu berkeinginan mendirikan suatu lembaga yang memberikan pendidikan buat anak-anak yang kurang mampu. Beliau melihat anak-anak tersebut memiliki potensi tetapi belum mendapatkan kesempatan.

Ini meruPakan awal mula munculnya sebuah kelembagaan lokal. Menurut Uphoff (1986) sangat dipengaruhi dengan adanya serangkaian norma perilaku dimana norma dan perilaku tersebut ditaati, dihargai, dalam waktu yang relatif lama untuk memahami kebutuhan bersama (lihat bab 2 hal 26). Hal tersebut senada dengan Macmillan (lihat bab 2 hal 60) lembaga meruPakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan dan nilai-nilai yang nyata dan yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan meruPakan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Defenisi ini sejalan dengan apa yang ingin dicapai dari pendirian sekolah MASTER. Ide awal pendirian sekolah ini adalah berawal dari keprihatinan melihat banyak anak-anak usia sekolah sekitar Terminal yang semestinya bersekolah tetapi karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya, mereka tidak dapat bersekolah seperti anak-anak umumnya. dalam proses pelebagaan sekolah MASTER membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya norma-norma yang ditawarkan diterima warga sekitar Terminal dan lembaga ini hadir sebagai suatu kebutuhan sosial bagi warga sekitar Terminal.

Pendiri sekolah (BaPak Nur Rohim) yakin bahwa anak-anak tersebut dapat dirubah melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan, dan para pengelola mampu membangun dan menumbuhkan kesadaran dalam diri anak muridnya untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik dan kesadaran yang tinggi untuk menjadi lebih berarti baik dirinya, keluarganya dan orang-orang disekitarnya, sehingga mereka pun memiliki masa depan yang lebih baik.

Dalam pembahasan ini sekolah Terminal jelas dikatakan sebagai lembaga karena sekolah ini hadir sebagai salah satu bentuk kritik sosial terhadap kondisi yang selama ini ditemui bahwa pendidikan/sekolah yang ada hanya diperuntukan hanya buat orang-orang berduit.

5.2 Pengenalan Kepada Masyarakat

Pada tahun 2000 beliau tinggal di Depok, dan mulai mengajak anak-anak untuk bersekolah, awalnya beliau meminta izin kepada pengurus musholla (sekarang mesjid) untuk mendapat tempat memberikan pengajaran kepada anak-anak, karena pada saat itu belum ada tempat. Ketika berdiskusi dengan pengurus musholla akhirnya diberikan tempat yaitu teras depan musholla.



Gambar 5.1 Peserta Didik ketika Belajar Di Teras Mesjid

Sumber: Dokumentasi Yayasan Bina Insan Mandiri 2003

Pak rohim bersama remaja mesjid pelan-pelan mengajak mereka (anak-anak Terminal) untuk berkumpul di masjid, memberikan makanan, mengajarnya menggosok gigi dan hidup bersih. Kemudian setelah beberapa waktu, yang berminat makin banyak dan akhirnya mulailah dengan kegiatan pendidikan seperti belajar *iqra*, belajar ngaji, sertabelajar bacatulis dan berhitung. Awalnya sempat ditentang dan ditolak warga Terminal namun terus menerus dilakukan pendekatan dengan memberikan sumbangan dan sembako kepada warga sekitar Terminal. Sampai akhirnya mulai diminati oleh peserta didik dan orang tua, dan diterima warga sekitar Terminal Depok.



Gambar 5.2 Kondisi Teras Mesjid Yang Di Sekat agar Terpisah Dengan Kelas Lain

Sumber: Dokumentasi Yayasan Bina Insan Mandiri 2003

Kak Sopian merupakan relawan yang membantu Pak Rohim mengajar peserta didik SD. Dia menggambarkan kondisi belajar-mengajar saat itu (2003) ramai, berisik seperti pasar dan terlihat anak-anak peserta didik masih belum tertib dan peraturan belum diberikan secara tegas ke peserta didik. Jumlah peserta didik saat itu berkisar 30 orang dalam satu kelas, beda dengan saat ini yang bisa dalam satu kelas 50 orang. Teras musolah di sekat-sekat Pakai triplek untuk membatasi dengan peserta didik yang lain. Agar tidak mengganggu warga yang sedang sholat, kegiatan belajar-mengajar dimulai jam 08.00-12.00 wib untuk warga belajar tingkat SD dan SMP. Karena sholat zuhur dimulai jam 12.00wib hingga jam 13.00wib, dan Jam 13.00wib dipakai untuk peserta didik SMA hingga jam 17.00wib.

“Jadi TK, SD,SMP gabung semua itu pagi, siangnya SMA. Dan itu di sekat-sekat (Sopian, tutor SD, 26 november 2011)”

Selanjutnya dikatakan:

“kalo sholat zuhur itu kan siang jam satuan, kalo kita aktivitas belajarnya jam 8 sampai jam 12.jadi ketika azan break, selesai semua. Itu untuk TK sampe jm 10, SD,ama SMP sampai jam 12, SMA dari jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi kondisi kita kayak di

pasar berisik banget, rame banget (Sopian, tutor SD, 26 november 2011)”

5.3 Periode Merintis

Pada awalnya musholla lama kelamaan diperbesar menjadi mesjid (2003). Anak-anak didiknya semakin banyak, Pak Rohim mengajak pemuda masjid untuk membantunya mengajar dengan imbalan uang transport dan makan nasi bungkus, karena kepedulian terhadap anak-anak yang tidak mampu relawan yang membantu Pak Nur Rohim bertambah. Pak Nur Rohim tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga belajar mengaji dan pola hidup sehat (mandi, sikat gigi dan makan yang teratur).

Semakin lama semakin bertambah peserta didik karena selain diberikan pengajaran secara gratis tetapi juga diberi makan. Selain untuk anak jalanan sekolah MASTER juga untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. MASTER selain dikenal lewat mulut ke mulut, di bawa oleh teman atau dengan cara *modeling* dari alumni yang sudah lulus

“ya taunya dari mulut ke mulut, misalnya kalo ditanya kamu sekolah dimana,,,oohh di MASTER sekolah gratis, pastii tau. Kalo gratis orang-orang pada ikutan”(SM, warga 17 Agustus 2011)

Selanjutnya dikatakan:

“bukan untuk anak jalanan saja tapi juga untuk anak biasa yang orang tuanya kurang mampu,,,dari mulut ke mulut, bawa teman, *modeling* dari temen-temen kita yang udah lulus, modeling temen-temen kita yang udah kerja, temen-temen kita yang udah kuliah, makin banyak. Lalu ada liputan dari media. Media dating kesini karena ada sesuatu yang unik ” (MUS, Koordinator Yayasan Bina Mandiri 24 Agustus 2011)



Gambar 5.3 Ketika Proses Belajar-Mengajar Tahun 2003

Sumber: Dokumentasi Yayasan Bina Insan Mandiri

Kak Sopian melanjutkan bahwa walaupun di tahun 2003-2004 merupakan masa-masa merintis tapi ada ketegasan untuk warga belajar, untuk yang putri memakai jilbab, laki-laki Pakaian yang rapi. Tetapi tidak menuntut mereka karena tujuan mereka datang adalah untuk belajar dan memberikan kepada mereka yang lebih baik

“kalo di tahun 2003-2004 kan dikatakan baru merintis, jadi tetep kita beri ketegasan warga belajar, yang putrid Pakai jilbab, yang laki-laki Pakaian yang rapi. Kalo menentang mereka iyya, mereka dating kesini kan untuk belajar. Kita kan berharap dapet memberikan yang lebih baik (Sopian, tutor SD, 26 November 2011).”

Perilaku peserta didik yang sebagian besar adalah anak jalanan yang masih melekat banyak sandal dan sepatu di masjid yang berhilangan. Belum lagi sesama peserta didik yang berkelahi dengan sesama temannya sehingga Pak Nur Rohim akhirnya pindah. Pak Nur Rohim membeli rumah yang berdekatan dengan masjid dan memulai mengajar di rumah tersebut yang akhirnya dijadikan kantor hingga saat ini. semakin lama semakin banyak peserta didik yang lulus tapi sangat disayangkan kalau tidak disertai dengan ijazasah. untuk itu Pak Nur Rohim beserta relawan berjuang mengadvokasi agar mendapatkan pengakuan dan peserta didik juga dapat melanjutkan kebangku kuliah bahkan untuk bekerja.

Universitas Indonesia

Menurut Roucek dan Warren (1984), lembaga pada mulanya terbentuk atas dorongan kesamaan pandangan, hasrat dan keinginan bersama manusia untuk hidup secara teratur. Cita-cita tentang keteraturan hidup ini berpusat pada tatanan normatif hubungan antar anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Penataan, pemeliharaan dan pengekalan keteraturan hubungan antar anggota masyarakat itu sangat tergantung pada intensitas kesadaran bersama terhadap fungsi norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam mengubah perilaku warga binaannya Pak Nur Rohim bersama relawannya sekolah MASTER mencoba memberikan penyadaran kepada warga binaannya berupa norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma yang diberikan yang mau atau tidak mau lama-kelamaan diterima karena pendekatan secara teratur yang dilakukan oleh relawan sekolah MASTER.

Seperti pada kutipan wawancara dengan seorang koordinator lapangan/relawan sekolah MASTER bahwa anak-anak jalanan yang diibaratkan memiliki masa depan yang kelam jika tidak ada kebersamaan dari sesama untuk membantu mereka memperoleh pendidikan.

“,,ibarat mutiara, anak-anak ini yang sebagian besar tidak punya biaya untuk sekolah, bahkan untuk transport. Mereka adalah mutiara yang masih terpendam dalam lumpur, kotor, dan belum dilihat orang. Oleh karena itu mereka dibina, kita latih, ibarat mutiara kita bersihkan lagi dari lumpur, dipoles, disusun jadi perhiasan yang bernilai tinggi,” ungkap wanto (Depok, Mei 2009)

Perilaku anak jalanan saat itu (2003-2004) masih suka berkelahi dengan sesama warga belajar, masih ada sifat mencuri. Untuk itu perlu adanya sikap untuk mengubah perilaku anak jalanan. Peserta didik/warga belajar tidak hanya diberikan pendidikan saja tetapi lebih ditekankan pada akhlak. Mereka dianjurkan untuk memakai jilbab untuk siswi dan untuk siswa laki-laki dianjurkan berpakaian sopan. Walaupun ada asumsi sekolah MASTER terkesan bebas karena niat awal peserta didik adalah untuk belajar sehingga tidak ada pemaksaan bagi mereka untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat tutor sekolah MASTER.

“Pembinaan kita lebih berakhlak sampe-sampe anak perempuan kita bungkus dengan jilbab dan laki-lakinya berpakaian sopan (Sopian, tutor SD, 26 November 2011)”

Selanjutnya dikatakan:

“Karena disini bebas, karena niat awal kita, artinya ngga nekan mereka harus gini atau gitu, kurikulum kebutuhan mereka, pokoknya ngga ngejang, ketika mereka nyaman ama kita, jadi kita enak ke merekanya. Pembinaan ke mereka, satu kita harus membuat mereka menjadi lebih baik lagi, kesabaran untuk membina mereka. Kedua merangkul mereka, ngga ada jarak kayak saudara dengan tutor itu ke warga belajar kayak adik kakak. Makanya mereka lebih betah dibanding dengan sekolah yang dulu. Lebih bebas, karena kita awalnya melihat kondisi mereka (Sopian, tutor SD, 26 November 2011).

5.4 Periode Pengakuan Secara Eksternal (2005-2006)

Perjuangan Pak Nur Rohim tidak sia-sia di tahun yang sama pusat belajar yang diperjuangkan untuk mencerdaskan anak bangsa mendapat pengakuan eksternal dari Dinas Pendidikan Kota Depok dan dasar pendiriannya diakui oleh AKTA Notaris Dwi Priharyanto Nomor 02 tanggal 25 februari 2005. Tidak hanya itu Yayasan Bina Insan Mandiri semakin dikenal dengan banyaknya liputan dari media cetak dan elektronik.

“saya mengurus legal tahun 2004 sampai 2005 terus ada perubahan tahun 2006” (NR, Pendiri Yayasan Bina Insan Mandiri, 27 Agustus 2011)

Dengan adanya pengakuan eksternal dari Dinas Pendidikan Kota Depok sehingga di buatlah struktur organisasi Yayasan Bina Insan Mandiri. Menurut Amitai Etzioni bahwa organisasi adalah suatu unit sosial (pengelompokan sosial) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Namun untuk mendefinisikan organisasi dapat

dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini karena organisasi merupakan sesuatu yang abstrak, sulit dilihat namun bisa dirasakan eksistensinya (Etzioni, 1985:3). Dalam mengembangkan eksistensinya sekolah MASTER harus mendapatkan pengakuan eksternal menurut undang-undang yang berlaku sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi kedepan.

S.B Hari Lubis & Martani Huseini (1987:1) mendefinisikan organisasi sebagai satu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai satu-kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dilingkungannya (Lubis & Husein, 1987:1).

Setelah mendapatkan pengakuan secara eksternal sebagai Yayasan Bina Insan Mandiri, pada tahun 2006 sekolah MASTER yang bernaung dalam Yayasan Bina Insan Mandiri telah mendapatkan pengakuan sebagai PKBM yang menyelenggarakan sekolah Paket A, Paket B, dan Paket C serta memiliki sekolah terbuka untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menginduk pada SMP Negeri 10 dan sekolah terbuka jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yang menginduk pada SMA Negeri 5 Depok.

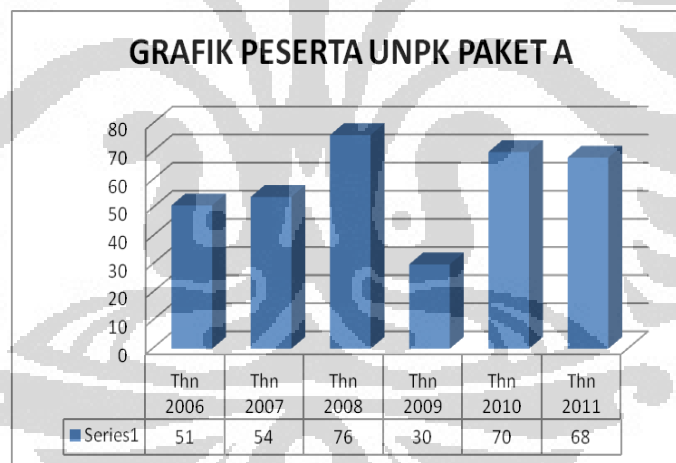
Berbagai perlombaan yang diikuti mendapatkan hasil yang gemilang yaitu juara I dan II menulis surat untuk presiden, penghargaan dari Mendiknas dalam rangka HUT Guru, juara I dan II olimpiade matematika setara SD Jabodetabek.

Pada tahun 2006 setelah mendapatkan pengakuan eksternal dan mendapat perizinan operasional untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Masyarakat dana bantuan mulai mengalir dari Dinas Pendidikan, Pemerintah Pusat dan Provinsi. Banyaknya peserta didik dan Yayasan Bina Insan mulai dikenal oleh masyarakat luas maka Yayasan Bina Insan Mandiri mulai membuat sistem pengorganisasian yang jelas dan strukturisasi yang baik.

Tidak dipungkiri dibutuhkan dana yang lebih untuk menampung semakin banyaknya peserta didik yang saat itu sebanyak 1500 orang. Nama Yayasan Bina Insan Mandiri mulai eksis ada saja bantuan dari *volunteer* baik dari dalam maupun luar negeri berupa dana. Dengan dana tersebut dipergunakan untuk menambah ruang belajar siswa dan juga keperluan dapur umum.

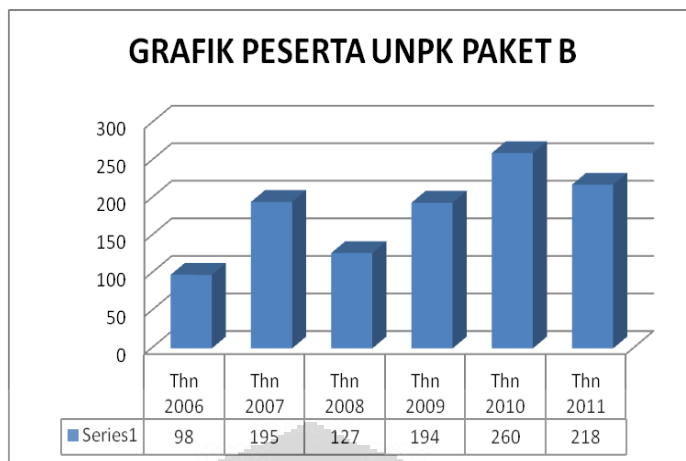
“Karena ada donator jadi kita bebasin lahan, beli lahan ini, (menunjuk ruangan disamping kantor Yayasan Bina Insan Mandiri) dulu lapangan kan kebon (Sopian, tutor SD, 26 November 2011)”

Banyak liputan dari media cetak dan elektronik seperti TRANS TV, Metro TV, ANTEVE dan SCTV yang akhirnya Yayasan Bina Insan Mandiri (MASTER) dikenal luas dan semakin banyak peserta didik karena Yayasan Bina Insan Mandiri menawarkan sekolah gratis dengan tidak memberikan persyaratan khusus. Sekolah MASTER juga diakui oleh masyarakat luas dengan kelulusan peserta didik dari tahun ke tahun, dapat dilihat sebagai berikut;



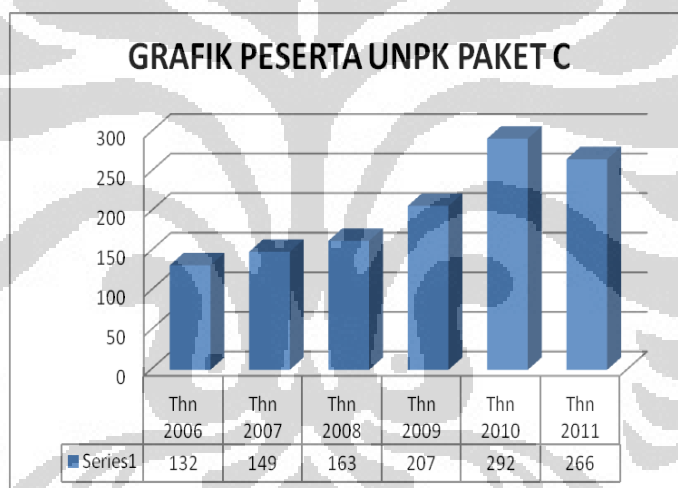
Grafik 5. 1 Perkembangan Peserta UNPK Paket A 2006-2011

Sumber: Telah Diolah Kembali



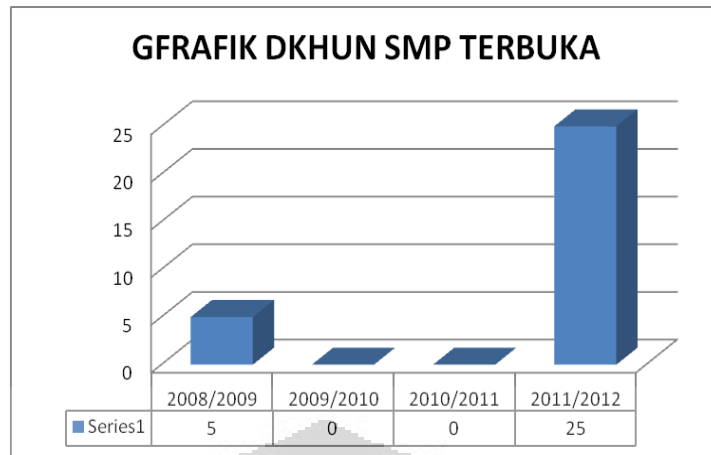
Grafik 5.2 Perkembangan Peserta UNPK Paket B 2006-2011

Sumber: Telah Diolah Kembali



Grafik 5.3 Perkembangan Peserta UNPK Paket C 2006-2011

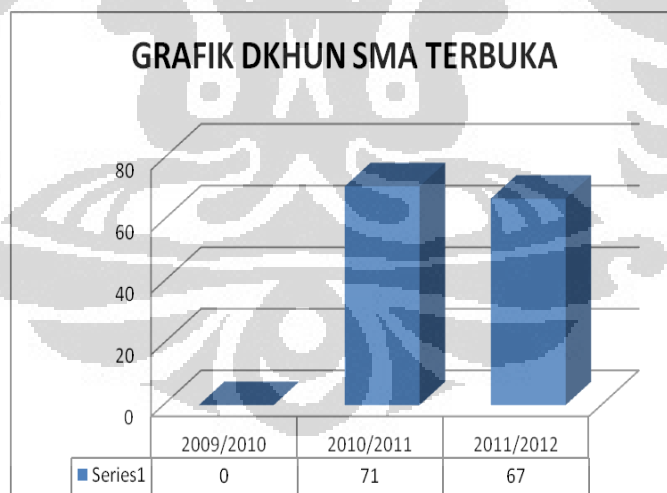
Sumber: Telah Diolah Kembali



Grafik 5.4 Perkembangan DKHUN Siswa SMP Terbuka 2008-2011

Sumber: Telah Diolah Kembali

Pada tahun ajaran 2008/2009 hingga tahun ajaran 2010-2011 hampir tidak ada yang lulus. Ketika peneliti konfirmasi kepada koordinator tutor SMP ternyata anak peserta didik tidak mengikuti Ujian akhir pada tahun tersebut. Di tahun 2011/2012 ada 25 orang yang lulus (lulus 100%).



Grafik 5.5 Perkembangan DKHUN Siswa SMA Terbuka 2009-2011

Sumber: Telah Diolah Kembali

Selain dari kelulusan peserta didik Sekolah MASTER juga diakui sebagai PKBM yang berkualitas dilihat dari kejelasan kurikulum sebagai bahan ajar tutor.

Tabel 5.1 Struktur Kurikulum Paket C Program IPA

No.	Materi Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan5/Derajat Mahir1 Setara 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6/Derajat Mahir 2 setara Kls XI-XII	Jumlah
1.	Pendidikan agama	2	4	6
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3.	Bahasa Indonesia	4	8	12
4	Bahasa Inggris	4	8	12
5.	Matematika	4	8	12
6	Fisika	2	8	10
7.	Biologi	2	8	10
8.	Kimia	1	2	3
9.	Sejarah	1	-	1
10	Geografi	2	-	2
11	Ekonomi	2	-	2
12	Sosiologi	2	2	4
13	Seni Budaya	2	4	6
14	Pendidikan Olahraga	2	4	6
15	Keterampilan fungsional*)	4	8	12
16	Muatan Lokal**)	2	4	6
17	Pengembangan kepribadian Profesional	2	4	6
	Jumlah	40	82	122

Sumber: Data Yayasan Bina Insan Mandiri

Universitas Indonesia

Tabel 5.2 Struktur Kurikulum Paket C Program IPS

No.	Materi Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 5/Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6/Derajat Mahir 2 setara Kls XI-XII	Jumlah
1.	Pendidikan agama	2	4	6
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3.	Bahasa Indonesia	4	8	12
4.	Bahasa Inggris	4	8	12
5.	Matematika	4	8	12
6.	Fisika	2	-	2
7.	Biologi	2	-	2
8.	Kimia	2	-	3
9.	Sejarah	1	3	4
10.	Geografi	1	7	8
11.	Ekonomi	2	8	10
12.	Sosiologi	2	8	10
13.	Seni Budaya	2	4	6
14.	Pendidikan Olahraga	2	4	6
15.	Keterampilan fungsional*)	4	8	12
16.	Muatan Lokal**)	2	4	6
17.	Pengembangan kepribadian Profesional	2	4	6
	Jumlah	40	82	122

Sumber: Data Yayasan Bina Insan Mandiri

Tabel 5.3 Tes Kelayakan Akademik Program Paket C

Tes Kelayakan Akademik Program Paket C				
Kelompok Soal Menurut Kompetensi	Hari Pelaksanaan	Mata Uji	Jumlah Soal	Alokasi Waktu
Kemampuan Mahir 1 (Setara SMA Kelas 10)	I	Bahasa Indonesia	15	105 menit
		Matematika	15	
		PKn	15	
	II	Kimia, Biologi	30	75 menit
		Fisika, Bahasa Inggris	30	75 menit
		Sosiologi, Ekonomi, Geografi	45	90 menit
Kemampuan Mahir 2 (Setara SMA Kelas 11-12) Jurusan IPS	I	Bahasa Indonesia	15	75 menit
		PKn	15	
	II	Sosiologi	15	60 menit
		Ekonomi	15	
	III	Geografi	15	60 menit
		Bahasa Inggris	15	
Jurusan IPA	I	Bahasa Indonesia	15	105 menit
		Matematika	15	
		PKn	15	
	II	Biologi	15	75 menit
		Kimia	15	
		Fisika	15	
	III	Bahasa Inggris	15	75 menit

Sumber: Data Yayasan Bina Insan Mandiri

Tabel 5.4 Struktur Kurikulum SMP

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Setara Kelas VII-VIII	Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara Kelas IX	Jumlah
1. Pendidikan Agama	4	2	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3. Bahasa Indonesia	8	4	12
4. Bahasa Inggris	8	4	12
5. Matematika	8	4	12
6. Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	8	4	12
8. Seni Budaya	4	2	6
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	2	6
10. Keterampilan Fungsional *)	4	2	6
11. Muatan Lokal **)	4**)	2**)	6**)
12. Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
Jumlah	68	34	102

Keterangan:
 *) Pilihan mata pelajaran
 **) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Sumber: Data Yayasan Bina Insan Mandiri

Tabel 5.5 Struktur Kurikulum Paket A Setara SD

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 1 / Derajat Awal Setara Kelas I - III	Tingkatan 2 / Derajat Dasar setara Kelas IV-VI	Jumlah
1. Pendidikan Agama	9	9	18
2. Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3. Bahasa Indonesia	15	15	30
4. Matematika	15	15	30
5. Ilmu Pengetahuan Alam	12	12	24
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	9	9	18
7. Seni Budaya	6	6	12
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	6	6	12
9. Keterampilan Fungsional *)	9	9	18
10. Muatan Lokal **)	6**)	6**)	12**)
11. Pengembangan Kepribadian Profesional	6	6	12
Jumlah	102	102	204

Keterangan:
*) Pilihan mata pelajaran
**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Sumber: Data Yayasan Bina Insan Mandiri

5.5 Perluasan Ruang Belajar (2007-2009)

Pada tahun 2008 ruang gudang dan sablon sekarang, dulunya dipakai untuk belajar TK dan SMP awalnya adalah tempat biliyar dan pada waktu siang dipakai untuk siswa SMA. Pak Nur Rohim juga membeli rumah warga yang dulunya tempat biliar untuk lapangan sekolah. Demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan anak-anak peserta didik diajak dan dihimbau untuk berpakaian sopan. Karena di sekolah MASTER merupakan kawasan terbuka antara pasar dan Terminal kota yang warganya sering mabuk-mabukan dan kerap terjadi pelecehan seksual. Sehingga siswi dianjurkan memakai jilbab untuk yang muslim dan dilarang merokok di lingkungan sekolah.

“Tempat biliar punya saya juga diambil ama Pak Rohim dijadikan lapangan sekolah, sekitar tahun 2008,, iyya itu sekalian klinik dulunya tempat cucian motor tapi masih jalan ampe sekarang itu tahun 2010” (STP, warga, 20 Agustus 2011)

Selanjutnya dikatakan:

“Awalnya bebas, lalu dimusyawarakan akhirnya disepakatin karena diliat kondisi yayasan yang rentan pada pelecehan dan

unsur negatif lingkungan apalagi banyak anak PUNK jadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan” (MUS, Koordinator Yayasan Bina Insan Mandiri, 24 Agustus 2011)

Pada tahun 2009 Pak Nur Rohim mendapat tanah wakaf dari saudagar Arab untuk memperluas lapangan sekolah dan kelas panggung yang didirikan dua lantai. Untuk lantai dua diperuntukan kelas enam dan untuk perpustakaan. Mendapatkan sumbangan container dari ANTAM yang dijadikan dua lantai. Lantai satu untuk Taman-kanak kanak (TK) dan lantai dua untuk ruang komputer.

5.6 Eksis Di Tengah-tengah Masyarakat (2010-sekarang)

Pada tahun 2010 didirikan asrama untuk para tutor yang berasal dari luar kota, asrama putra dan asrama putri. Didirikan juga asrama untuk binaan putra dan anak binaan putri. Kepedulian Pak Nur Rohim akan kesehatan warga sekitar yang dipersulit dengan biaya yang mahal hingga Pak Nur Rohim membeli tempat cucian motor untuk didirikan klinik yang obat-obatan mendapat bantuan dari BAZNAZ dan dokter yang ingin mengabdikan pada masyarakat dengan merelakan waktunya melayani warga sekitar MASTER.

Di tahun 2011 Yayasan Bina Insan Mandiri mendapat kontainer dari ANTAM. Awalnya anak-anak Punk tidur dan beraktivitas di jalan seperti Terminal, kolong *fly over*, stasiun kereta. Semakin lama semakin banyak, sehingga ada kepedulian Yayasan Bina Insan Mandiri untuk memberikan tempat tinggal dan Pakaian yang layak, pemenuhan makan dan pendidikan. Didirikan asrama khusus anak-anak PUNK yang sengaja dibedakan dengan anak binaan yang lain agar tidak terganggu dan ikut-ikutan selain itu didirikan juga perpustakaan yang baru. Ada sekitar sepuluh anak-anak peserta didik yang masuk perguruan tinggi negeri favorit seperti Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Yayasan Bina Insan Mandiri semakin eksis dan dikenal masyarakat luas sehingga mutu sangat diperlukan untuk mencetak lebih banyak lulusan-lulusan yang masuk universitas negeri. Untuk itu sistem pengajaran mulai diperbaiki mengarah pada yang lebih baik dan terkoordinasi untuk itu mulai ada

absensi tutor, adanya rapat evaluasi setiap bulan, visi-misi pendidikan, jadwal yang konkrit, dan mulai bertambahnya tutor.

Tabel 5.6 Perkembangan Pelembagaan PKBM YABIM

Phase	What	How	When
Awal Ide Berdiri		Tahun 1994-1995 Pak Nurrohim memiliki usaha yang sukses dibidang distributor sembako di 5 kios termasuk di Depok. Dia melihat miris masyarakat disekitar Terminal, anak-anaknya tidak dapat bersekolah	1994-1995
		Terjadi krisis moneter usaha Pak Rohim jatuh dan dia mulai membuka warteg bersama istrinya darisitu Pak Rohim mulai terbuka hatinya untuk mengajar anak-anak agar dapat membaca dan berhitung	1998-1999
Pengenalan dengan Masyarakat 2000	Dikenal	Mulai mengajak anak-anak untuk bersekolah di depan teras Musholla. Pendekatan dengan orang tua anak dengan memberikan sembako dan penjangkauan ke titik rawan anak jalanan	
Periode Merintis	Dikenal	Yang awalnya Musholla berkembang menjadi Masjid. Karena anak didik semakin banyak Pak Rohim mulai mengajarkan Iqra, mengaji, baca tulis, mengajarkan hidup sehat (mandi dan sikat gigi) dan anak didik semakin banyak karena Pak Rohim juga memberikan makanan.	2003
		Karena hampir semua yang dibina adalah anak jalanan sehingga perilaku anak jalanan sudah melekat banyak sandal dan sepatu di masjid berhilangan sehingga Pak Nur Rohim harus pindah	2004
Periode Pengakuan secara Eksternal	Diakui	Pak Rohim membeli rumah di sebelah Masjid dan mulai mengajar Banyak relawan yang ingin mengabdikan dirinya	

Lanjutan

		<p>untuk mendidik anak-anak dan membantu Pak Rohim, dan sebagian besar adalah remaja masjid</p> <p>Mendapat pengakuan eksternal dari Dinas Pendidikan Kota Depok</p> <p>Mendapat banyak penghargaan dari lomba-lomba yang diikuti baik dari peserta didik dan para tutor</p> <p>Terbentuknya yayasan sosial</p>	2005
	Dihargai	<p>Mendapat izin Operasional PKBM dari Dinas pendidikan sehingga dana bantuan mengalir baik dari Provinsi, Pemerintah Pusat dan dari APBD</p> <p>Adanya sekolah terbuka dan sekolah Paket sehingga lulusan anak didik dari YABIM mendapat Ijasah</p> <p>Banyak liputan dari media cetak dan elektronik seperti TRANS TV, Metro TV, SCTV, ANTEVE, Kompas, dan surat kabar lainnya membuat banyak masyarakat yang mengenal YABIM dan peserta didik semakin bertambah akan adanya sekolah gratis di Kota Depok</p>	2006
Perluasan Ruang Belajar	Dihargai	<p>Mulai menambah ruang kantor YABIM (Sekarang menjadi Dapur umum)</p> <p>Juara Cerdas Cermat I Setara SD TK JABAR</p>	2007
	Ditaati	<p>Membeli tempat biliar untuk dijadikan tempat mengajar untuk TK dan SD dan siangnya akan dipakai untuk SMA</p> <p>Mendapatkan Kejuaran di berbagai perlombaan salah satunya Juara I lomba PKBM tingkat JABAR</p> <p>Banyak Lulusan dari YABIM yang masuk Universitas Negeri seperti UI dan IAIN</p> <p>Membeli tempat biliar untuk dijadikan lapangan sekolah</p> <p>Peserta didik mulai berPakaian tertutup/Jilbab bagi wanita dan mulai berPakaian sekolah.</p>	2008

Universitas Indonesia

Lanjutan

	Menjadi Perilaku bersama	Mendapatkan tanah Wakaf untuk memperluas Lapangan sekolah, dan mendirikan kelas panggung dan menjadikannya dua lantai, lantai dua untuk kelas 6 SD	2009
		<p>Mendapatkan container dari ANTAM untuk ruang computer dan TK</p> <p>Banyak warga yang berdatangan tidak hanya dari Depok, dari Bogor, cibinong, Bojong, Jakarta yang datang untuk bersekolah</p> <p>Peserta didik mentaati setiap nilai dan aturan yang diberikan para tutor</p> <p>Masyarakat semakin yakin dan bergantung pada YABIM karena tak hanya pendidikan tapi juga dibidang social Pak Rohim mengupayakan kesehatan warga sekitar YABIM(Klinik dan JAMKESMAS)</p> <p>Advokasi hukum bagi warga sekitar YABIM</p> <p>Meningkatkan ekonomi keluarga dengan membuka koperasi dan lapangan kerja yang ada</p>	
Eksis	Mendarah daging	<p>Asrama Tutor Putra dan putrid dan juga asrama untuk anak binaan Putra dan Putri</p> <p>Memperluas ruang dengan membeli tanah dulunya adalah tempat cucian motor sekarang dijadikan klinik</p>	2010
	Mendarah daging	<p>Penambahan container dai ANTAM</p> <p>Penambahan asrama untuk Anak jalanan dan anak PUNK</p> <p>Sistem pengajaran yang baik dan telah terkoordinir dengan adanya absensi tutor, rapat evaluasi para tutor, visi dan misi pendidikan, jadwal yang konkrit dan bertambahnya tutor.</p>	2010

5.7 Pengembangan Kelembagaan Sekolah MASTER



Gambar 5.4 Proses Pelembagaan Sekolah MASTER

Sumber: Soerjono Soekanto 1990

Secara lebih ringkas Simanjuntak menyebutkan beberapa langkah yang dilakukan dalam proses institusionalisasi atau pelembagaan, yaitu:

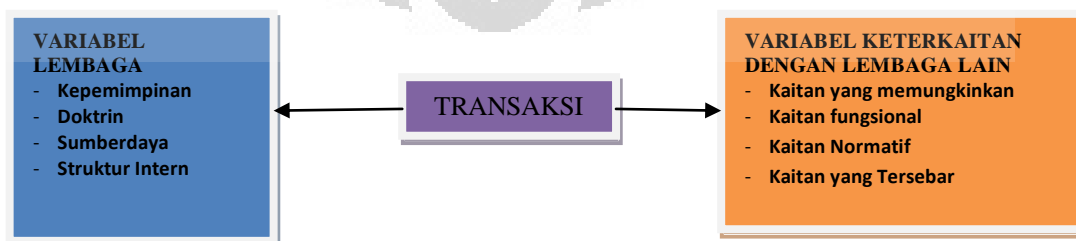
- Norma dan perilaku baru dikembangkan dan disepakati bersama;
- Norma dan perilaku baru tersebut diperkenalkan dan diuji cobakan
- Jika norma dan perilaku tersebut dirasakan bermanfaat, akan memperoleh pengakuan (legitimasi) dari warga
- Pengakuan atas manfaat norma dan perilaku itu akan mengundang penghargaan dari warga. Penghargaan dalam hal ini dipahami sebagai adanya upaya warga untuk melindungi dari perilaku menyimpang dan tindakan pelanggaran, sehingga selalu ditaati secara swakarsa; dan
- Norma dan perilaku tersebut dihayati, mendarah daging oleh warga (Simanjuntak, 2001:12)

Berawal dari kehidupan warga Terminal yang suka mabuk-mabukan, main judi, dan berbuat asusila. Dia ingin membawa warga Terminal ke taraf kehidupan

yang lebih baik dan memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan menawarkan kepada warga betapa pentingnya pendidikan anak demi terwujudnya kehidupan anak yang lebih baik dan tidak harus mengikuti jejak orang tuanya. Sekolah gratis merupakan pilihan bijak dari seorang Nur Rohim dan merupakan angin segar bagi warga terminal yang tergorong dari keluarga yang tidak mampu.

Ide dasar dari perspektif pengembangan kelembagaan (*institutional development*) adalah untuk menciptakan atau menghidupkan suatu lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan inovasi. Pada kasus sekolah terminal "Master", dapat dibuktikan bahwa semua berangkat dari kebutuhan warga (*community*) dan sudah berkembang, mengalami proses pelebagaan norma baru bagi para warga disekitar Terminal Depok. Meskipun pada awalnya banyak ditentang, namun perlahan-lahan sekolah terminal ini mulai **dikenal**. Dengan kegiatannya dan jelas keberadaannya yang "menjawab kebutuhan" maka keberadaannya kemudian **diakui** oleh banyak orang sebagai sekolah yang mereka butuhkan. Dalam perjalannya kemudian sekolah ini **dihargai** menjadi sekolah yang benar-benar berarti dalam kehidupan anak-anak jalanan, asongan, dan pengamen dan menjadi **ditaati** karena ada aturan main di dalam penyelenggaraan sekolah terminal seperti dilarang membawa senjata tajam, yang wanita muslim memakai kerudung saat belajar dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi sesuatu **melekat dan mendarah daging** dalam keseharian hidup warga di sekitar dalam perjalanan waktu yang cukup lama.

5.8 Universum Pengembangan Kelembagaan PKBM YABIM



Gambar 5.5 Universum Pengembangan Kelembagaan

Sumber: Joseph W. Easton. (ed), 1986

1. Variabel Lembaga

a. Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan merupakan salah satu variabel terpenting dalam Pengembangan Kelembagaan Sekolah "Master", baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, aspek kepemimpinan meliputi:

- Memiliki kompetensi

Pendiri Sekolah "Master" (Bapak Nur Rohim) dapat mengerahkan anggotanya secara sukarelawan dalam mengembangkan sekolah bagi para anak jalanan, preman, pengemis, dan anak kurang mampu yang berkualitas sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat.

- Memiliki komitmen yang kuat

Pendiri Sekolah "Master" memiliki komitmen yang besar dalam memajukan sekolah terminal, terlebih dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas sekolah ini, sehingga sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh para siswa yang bersekolah di sini, termasuk orang tua dan keluarganya sehingga sesuai dengan visi dan tujuan pendirian sekolah ini.

- Adanya gaya kepemimpinan yang ditunjukkan

- Memiliki taktik yang tepat

- Menunjukkan adanya kontinuitas dan mempersiapkan suksesi

Sedangkan secara eksternal, aspek-aspek kepemimpinan ini meliputi:

- Manajemen pengelolaan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kaitan-kaitan dengan sekolah "Master"

- Adanya gaya kepemimpinan yang ditunjukkan

- Memiliki taktik yang tepat dan konsisten terhadap tujuan yang akan ditetapkan.

- Adanya sikap perlakuan terhadap doktrin

Tampak jelas bahwa Nur Rohim adalah sentral yang berpengaruh sangat besar terhadap keberlangsungan YABIM beserta program kegiatan yang ada didalamnya termasuk sekolah "Master". Gaya kepemimpinan Pak Rochim terlihat karismatik, yang mana ini cukup efektif untuk

Universitas Indonesia

menggerakkan YABIM, yang salah satu kegiatannya adalah mengelola Sekolah "Master" yang dikemas dalam bentuk keberanian merubah tempat maksiat menjadi tempat yang lebih memiliki manfaat, kejujuran, kerja keras, disiplin, kesederhanaan, dan komunikasi yang terus berjalanan dibina dengan orang-orang di sekitar Terminal Depok.

b. Doktrin

Merupakan norma dan nilai perubahan yang akan dilembagakan, yang mana norma dan nilai tersebut sudah ada sebelumnya. Secara internal, sekolah Terminal merupakan suatu bentuk norma dan nilai baru yang mengusung perubahan akan keadaan yang lebih baik. Kalau selama ini anak jalanan, pengamen, pengemis, selalu dinilai dengan sampah masyarakat dan tidak berguna, maka dengan sekolah "Master" ini membuat perubahan bahwa mereka dapat berubah, dididik, dan dibina menjadi lebih baik secara perilaku dan ilmu pengetahuan sehingga menjadikan dirinya lebih berarti bagi sesama.

c. Program

PKBM YABIM atau lebih kenal dengan Sekolah "Master" memiliki Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) untuk usia 3-5 tahun, Program Sekolah Dasar (Paket A), Program Paket B (setara SMP), program Paket Paket C (setara SMA), SMP-SMA terbuka. Siswa sekolah terbuka berstatus sebagai siswa SMP 5 dan SMA 10 Sawangan Depok. Namun, mereka tidak belajar di sekolah induknya itu, melainkan di PKBM ini.

Pelaksanaan ujian program kesetaraan paket A, B, dan C diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dan pelaksanaan ujian program SMP dan SMA terbuka diselenggarakan oleh sekolah induk, yang ijazahnya pun sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya.

d. Sumberdaya

- Mayoritas pengajar PKBM YABIM adalah relawan, jumlah sekitar 60 orang terdiri-dari relawan tetap dan guru tamu. Banyak pula relawan dari kalangan mahasiswa, kualitas guru yang mengajarpun diperhatikan. Pada saat ini pihak yayasan (YABIM) sedang membiayai kuliah beberapa orang guru, dan bercita-cita dapat membiayai kuliah

semua orang guru lulusan SMA yang mengajar di PKBM Bina Insan Mandiri.

– Sumber danabagia

Sekoalh ”Master” mendapat sokongan dana sebesar 2-3 juta per bulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kategori sekolah terbuka, melalui Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) yang diberikan melalui sekolah induknya yaitu SLTPN 10 Depok dan SMAN 5 Depok. Bantuan yang lainnya, sebagian besar pendanaannya diperoleh dari donatur.

– Struktur Internal

Merupakan struktur dan proses yang mendukung terselenggaranya suatu program yang akan dilembagakan. Struktur organisasi PKBM YABIM memperlihatkan persyaratan struktur yang baik karena didalamnya terdapat pembagian peranan, adanya pola wewenang yang jelas, terdapat sistem komunikasi yang baik dan efektif sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

2. Variabel Keterkaitan Dengan Lembaga Lain

a. Kaitan yang memungkinkan

Adalah hal-hal di luar yang dapat dimanfaatkan agar Sekolah ”Master” ini dapat lebih besar lagi. Contohnya terkait dengan kebijakan pemerintah sebagai *creating power*, sehingga hubungan dengan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Depok selalu dibina dengan baik. Sedangkan nilai yang dikembangkan di dalam sekolah terminal ini secara horizontal kepada para peserta didik yang disebut sebagai *creating value*.

b. Kaitan fungsional

Yaitu secara fungsi apa yang tidak bisa dilakukan organisasi lain sehingga dapat menjalankan mitra. Contohnya dalam mengadakan pendidikan, PKBM YABIM mengadakan kerjasama pendidikan dengan Universitas Indonesia dan lembaga kursus akuntansi dan komputer yang ada dikota Depok, selain itu mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam

hal sekolah terbuka yang kurikulum dan ijazahnya diakui dan sesuai standar nasional.

c. Kaitan normatif

Kebiasaan yang ada dan terus berjalan adalah pengajian setiap malam Jumat bagi siswa-siswi dan pengajar yang beragama muslim, kemudian acara makan bersama yang diadakan setiap minggunya.

d. Kaitan yang tersebar

Memiliki sekitar 2.000 siswa yang berasal dari masyarakat tidak mampu tidak hanya dikawasan sekitar Depok, tetapi juga berasal dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Dari latar belakang preman, anak jalanan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, anak-anak tidak mampu yang orang tuanya bekerja sebagai buruh, tukang cuci, dan tukang becak.

5.9 Proses Formalisasi PKBM YABIM

Pada tahun 1994-1995 Pak Rohim yang memiliki lima kios, yang diantaranya di tanah abang, lebak lubus, kebayoran, dan depok. Sehari-hari memasok barang, dia melihat disekitar terminal depok banyak sekali orang-orang disitu mabok, berjudi, dan anak-anak mereka dibiarkan terlantar dan disuruh mengamen, mengasong dan meminta-minta. Dampak penyakit social kian terasa ketika saat itu ada seperti sayembara yang namanya Sumabangan Sosial Berhadiah yang resmi dari Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya yang ketika itu bekerjasama dengan deprtemen olah raga beli nomer dengan harga Rp 1.000,00 bisa berhadiah Rp 1.500.000,00 yang diundi setiap minggu di kementerian sosial, masyarakat kalangan bawah tiap pulang “narek” langsung berjudi seperti itu. Semakin lama semakin parah, apalagi beliau melihat lingkungan sekitar musholla (sekarang menjadi masjid) dijadikan tempat maksiat, dimana kalau sudah menjelang malam di jadikan tempat berjudi dan mesum. Beliau berpikir bagaimana cara menyuylamatkan masyarakat seperti itu, apalagi dim iris melihat masa depan anak yang terlantar seperti itu.

Pada tahun 1998-1999 Pak Rohim diperhadapkan dengan pilihan, dimana ketika itu terjadi kerusuhan dimana-mana, usaha beliau jadi jatu, harga menjadi melambung tinggi, dan daya beli masyarakat menjadi rendah. Dan saya harus

berdagang sendiri, di sekitar terminal depok. Dari mulai itu saya melihat anak-anak bekerja mulai dari yang mengamen, mengasong, sampai menjadi tukang minta-minta. Di usia bersekolah mereka tidak bersekolah tetapi sudah disuruh oleh orang tuanya untuk bekerja. Beliau teringat ketika masa kecinya, ayahnya yang juga jualan di pasar tanah abang, dan ibunya juga berjualan di terminal Tanah abang, dia juga bergaul dengan anak-anak seperti itu, sungguh miris. Beliau pada saat itu berkeinginan mendirikan suatu lembaga yang memberikan pendidikan buat anak-anak yang kurang mampu. Beliau melihat anak-anak tersebut memiliki potensi tetapi belum mendapatkan kesempatan. Pada tahun 2000 beliau tinggal di Depok, dan mulai mengajak anak-anak untuk bersekolah, awalnya beliau meminta izin kepada pengurus musholla (sekarang mesjid) untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak, karena pada saat itu belum ada tempat.

Pak rohim bersama remaja mesjid pelan-pelan mengajak mereka (anak-anak terminal) untuk berkumpul di masjid, memberikan makanan, mengajarnya menggosokgigi dan hidup bersih. Kemudian setelah beberapa waktu, yang berminat makin banyak dan akhirnya mulailah dengan kegiatan pendidikan seperti belajar *iqra*, belajar ngaji, serta belajar baca tulis dan berhitung. Awalnya sempat ditentang dan ditolak warga terminal namun terus menerus dilakukan pendekatan dengan memberikan sumbangan dan sembako kepada warga sekitar terminal. Sampai akhirnya mulai diterima dan diminati banyak anak terminal, sehingga mulai dikenal oleh warga sekitar.

Semakin lama semakin berkembang rasanya saying anak-anak yang telah punya banyak keterampilan dan pengetahuan, namun tetap mempunyai keterbatasan karena pendidikan yang mereka terima secara formal belum diakui belum diakui karena belum ada ijazah. Perjuangan yang dilakukan selanjutnya adalah pendekatan kepada Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Pendidikan Kota Depok agar anak-anak ini punya kesempatan yang sama untuk sekolah dan mendapatkan ijazah. Hingga pada akhir tahun 2004 yayasan ini mendapat pengakuan eksternal secara formal, dan Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan PAUD, Paket A, B, C,

serta sekolah terbuka SLTP dan SMA yang merupakan satu-satunya sekolah terbuka negeri yang ada di provinsi Jawa Barat. Dasar pendiriannya diakui melalui Akta Notaris Dwi Priharyanto Nomor 02 tanggal 25 februari 2005.

Dalam perkembangannya bahwa sekolah “Master” mengalami proses formalisasi dari sekedar kegiatan bimbingan belajar gratis di lingkungan terminal tanpa rapor dan ijazah (*non degree*) sampai akhirnya diakui dan diformalkan sama seperti sekolah pada umumnya yang mendapat rapor, mengikuti ujian nasional, dan mendapat ijazah kelulusan (*degree*).

Sekolah ”Master” disebut sebagai organisasi karena dinaungi oleh YABIM yang memiliki tujuan, memiliki struktur organisasi dan pendiriannya diakui secara legal. Mereka memiliki visi membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, kreatif dan berakhlak mulia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Visi tersebut kemudian diwujudkan dengan pendidikan gratis berkualitas, pengembangan kemandirian dengan *life skill* dan pengembangan mental spiritual yang berkesinambungan.

Sebagai kelembagaan, sekolah “Master” mampu membuktikan perspektif tentang perubahan social yang direncanakan dan dan dibina dan didalamnya meyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan secara berkualitas terhadap nilai-nilai, pola tingkah laku dan hubungan perorangan maupun kelompok pada tatanan masyarakat Terminal Depok bahkan meluas hingga Jakarta, Bogor, Tangerang, yang membutuhkan pendidikan.



Gambar 5.6 Proses Formalisasi Sekolah MASTER

Sumber: Dimodifikasi Dari UPhoff 1986

5.10 *Civil society* dan Kelembagaan PKBM YABIM

Negara Indonesia sebagai negara berkembang sangat memerlukan peran masyarakat sipil (*civil society*) untuk menjadi suatu sistem yang benar-benar menjamin terbentuknya negara yang memberi keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Peletakan peran (*role enactment*) masyarakat sipil menjadi sangat penting ketika negara belum mampu secara penuh memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga diperlukan peran dari sekelompok masyarakat dalam menyempurnakannya. Berkaitan dengan persoalan tersebut, menjadi sangat penting untuk membahas dalam tulisan ini konsep masyarakat sipil ke dalam pelebagaan sekolah MASTER.

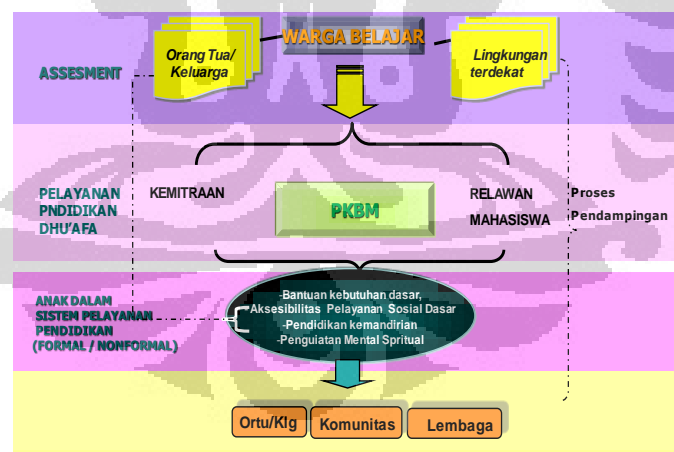
Diamond dalam bukunya *developing democracy toward consolidation* (2003) menyimpulkan lebih luas bahwa masyarakat sipil melingkupi kehidupan sosial berorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Selanjutnya Diamond menekankan bahwa masyarakat sipil bersedia aktif secara kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan pada negara, memperbaiki fungsi struktur negara, dan untuk menuntut akuntabilitas negara.

Kalau melihat dari latar belakang munculnya Yayasan Bina Insan Mandiri, berawal dari kehidupan keras terminal. Banyaknya orangtua yang pengangguran akhirnya mabuk-mabukan, main judi dan anak-anak mereka ditelantarkan. Pak Rohim berpikir bagaimana cara menyelamatkan masyarakat tersebut yang secara fisik kuat tetapi mental yang perlu diperbaiki apalagi masa depan anak-anak mereka dipertaruhkan. Hal seperti ini merupakan penyakit sosial yang merupakan tanggung jawab negara, apalagi anak-anak usia sekolah wajib menjadi tanggungan negara agar dapat mengenyam pendidikan Sembilan tahun (UUD 1945).

Berangkat dari niat untuk memberikan pendidikan dengan modal nekat Pak Rohim memulainya dari teras musholla, impiannya adalah memiliki lembaga yang *concern* untuk pendidikan. Secara konkrit, nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik disamping pendidikan untuk menambah pengetahuan dan

keterampilan dan juga pembinaan akhlak dan perilaku. Anak peserta didik diajarkan untuk mengaji, untuk wanita dianjurkan untuk memakai jilbab, untuk prianya berpakaian sopan, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Selain sebagai unsur pembinaan agar mereka terbiasa dengan pakaian yang sopan juga hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindarkan mereka dari tindak kejahatan yang mungkin terjadi, mengingat resistensi dan tindak kejahatan di lingkungan Terminal yang masih besar.

Sekolah ini hadir sebagai salah satu bentuk kritik sosial terhadap kondisi yang selama ini ditemui bahwa pendidikan yang ada hanya diperuntukan untuk orang-orang yang mampu. Gambaran tentang sekolah yang berkualitas hanya sebuah mimpi bagi masyarakat miskin. Namun hadirnya sekolah MASTER ini menjawab kritik sosial yang selama ini muncul terhadap dunia pendidikan. Dengan mengangkat nilai kesederhanaan namun tetap mengedepankan kualitas, tetapi lebih pada bagaimana melakukan pengembangan kemampuan (*capacity building*), mengingat pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap orang.



Gambar 5.7 Alur Pemberdayaan YABIM Kepada Warga Binaan

Sumber: Jurnal YABIM

Hal ini tercermin dalam visi dan misi yayasan yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas mandiri, kreatif dan berbudi pekerti yang luhur,

Universitas Indonesia

menyelenggarakan pendidikan gratis dan berkualitas sehingga meningkatkan kualitas SDM sebagai pendukung kemandirian, membangun kader masyarakat yang bersifat mengasuh dan membimbing terutama bagi anak-anak yang terpinggirkan. Dan misi yayasan yaitu menyiapkan masyarakat mandiri, handal berketerampilan tepat guna berdasarkan akhlak mulia.

Visi dan misi tersebut diwujudkan dalam program kerja yayasan dengan gambaran sebagai berikut:

- Pelayanan Pendidikan Gratis melalui Paket A, paket B dan paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Insan Mandiri disertai dengan berbagai keterampilan sebagai bekal kemandirian
- Memperluas unit- unit usaha untuk menyokong kemandirian sehingga mereka memiliki aktifitas lebih baik dibandingkan mengamen bahkan kriminalitas
- Meningkatkan pelayanan kesehatan, sosial seperti Program DKPS, Advokasi kesehatan, Nikah masal, Penyuluhan penyuluhan
- Melakukan kemitraan-kemitraan dengan lembaga yang memiliki kepedulian dalam mengentaskan kebodohan kemiskinan dan kesehatan seperti Pemerintah, Universitas , LSM dan
- Melakukan bimbingan konseling mental dan spiritual kepada warga belajar

Apa yang dilakukan oleh Yayasan Bina Insan Mandiri sejalan dengan apa yang dicita-citakan negara yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Yayasan Bina Insan Mandiri sebagai organisasi yang didirikan swadaya oleh sekelompok orang telah mendapat legalitas pada tahun 2004 dari Dinas Pendidikan Kota Depok bahkan sekolah MASTER telah disahkan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan dasar pendiriannya diakui oleh Akta Notaris Dwi Priharyanto Nomor 02 Februari 2005.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- Sekolah alternatif yang didirikan swadaya oleh sekelompok komunitas ini hendaknya terlembaga dengan baik dan melalui empat proses pelebagaan yaitu proses pelebagaan tahap dikenal, diakui, dihargai, ditaati dan akhirnya melekat dan mendarah daging.

Keempat proses ini telah dilewati oleh PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri dengan baik. Walaupun dalam perjalanannya proses pelebagaan PKBM YABIM memerlukan waktu yang cukup panjang. Dari tahun 2000 lembaga yang *concern* terhadap dunia pendidikan ini mulai diperkenalkan oleh Pak Nur Rohim hingga melembaga dan namanya begitu melekat dibenak warga Terminal Depok hingga saat ini. Proses pelebagaan PKBM YABIM berawal tahun 1994-1995 Pak Nur Rohim memiliki usaha yang sukses di bidang distributor sembako di lima kios miliknya termasuk di Terminal Depok. Dia melihat miris melihat masyarakat sekitar Terminal yang suka mabuk-mabukan, main judi, dan berbuat asusila tetapi anak-anaknya dibiarkan terlantar dan tidak bersekolah. Pada tahun 1998-1999 terjadi krisis moneter usaha Pak Nur Rohim jatuh dan dia mulai membuka usaha warteg bersama istrinya disamping Terminal Depok. Darisitu dia melihat anak-anak jalanan yang seharusnya bersekolah tetapi harus bekerja mencari uang.

Pada tahun 2000 ia mulai mengajak anak-anak membaca dan menulis di teras musholla dengan meminta izin dengan pengurus musholla (proses pelebagaan tahap dikenal). Awalnya musholla akhirnya ditahun 2003 diperbesar menjadi mesjid. Banyaknya peserta didik yang berasal dari anak jalanan sehingga sifat jalannya masih melekat. Banyak sandal dari warga yg sholat di mesjid yang hilang, belum lagi tawuran sehingga Pak Rohim harus pindah dan membeli

rumah kontrakan (2004) darisana ia mulai mengajar dan mendapat bantuan dari pemuda mesjid.

Semakin banyak warga belajar yang ditangani hingga pada tahun 2005-2006 dengan perjuangan Pak Rohim dan relawan yang membantu akhirnya PKBM YABIM mendapat pengakuan eksternal dan mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan (proses pelebagaan tahap diakui). Banyaknya kelulusan peserta didik dari sekolah alternatif yang serba minim dan dengan wujud kesederhanaan membuat decak kagum dari masyarakat luas termasuk pemerintah. Selain mendapat prestasi yang berasal dari peserta didik, ada juga dari para tutor, serta pernah mendapatkan prestasi tingkat pertama PKBM terbaik ditingkat Jawa Barat pada tahun 2008, dan saat ini terpilih kembali untuk mewakili Depok mengikuti lomba PKBM Terbaik di tingkat Jawa Barat (proses pelebagaan tahap dhargai). Adanya perubahan perilaku dari peserta didik ini terlihat dari peserta didik yang memakai jilbab, berpakaian sopan, tidak merokok dilingkungan sekolah (proses pelebagaan tahap ditaati). Di tahun 2009 hingga saat ini, PKBM YABIM eksis hingga saat ini dan nama YABIM sudah melekat bagi warga Terminal dan dan norma-norma yang diberikan sudah menjadi perilaku bagi warga Terminal Depok.

- Hadirnya PKBM YABIM merupakan sebagai wujud *civil society* karena PKBM YABIM ini tumbuh semakin kuat karena ini merupakan kebutuhan dari warga yang tidak mampu mengakses pendidikan gratis berkualitas dan niat dari ekelompok masyarakat yang prihatin dengan kondisi negara ini yang semakin lama tidak berpihak terhadap masyarakat tidak mampu ini terbukti dengan pendidikan yang mahal. Hadirnya PKBM YABIM adalah bukti ketidakpuasan dari kinerja negara ini di dunia pendidikan. Upaya yang dilakukan PKBM YABIM ini dapat meringankan tugas dan tanggung jawab negara di dunia pendidikan ini terbukti dari jumlah kelulusan dari peserta didik dan prestasi yang sudah diraih.

- Ada peran dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan tetapi sebatas fasilitator dan instansi yang berwenang dalam perizinan pendirian PKBM. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Depok mempermudah akses pendidikan yang diperjuangkan oleh Pak Nur rohim beserta relawan PKBM YABIM. Tetapi dalam proses pendidikan selama ini peran dari komunitas masyarakat (Pak Nur Rohim beserta relawan PKBM YABIM) ini yang aktif memperjuangkan sekolah alternatif ini yang hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat tidak mampu dan eksis hingga saat ini.
- Tidak sedikit PKBM-PKBM yang keberadaanya fiktif hanya mengejar materi tanpa melihat kualitas dan proses pelebagaan yang baik dari sebuah PKBM sehingga yang ada PKBM yang menjamur bak di tempat yang lembab dan akan hilang begitu saja seiring tidak kokohnya fondasi dari bawah organisasi yang dibangun. Hendaknya sekolah-sekolah alternatif seperti PKBM YABIM ini dapat menjamur di setiap daerah, kecamatan bahkan kelurahan agar masyarakat yang tidak mampu dapat mengakses dengan mudah pendidikan gratis. Dan bagi PKBM-PKBM yang ada saat ini dapat mengadopsi kelembagaan seperti PKBM YABIM ini, karena dalam proses pelebagaan sebenarnya memerlukan waktu yang cukup lama dimana norma-norma baru yang diperkenalkan tidak cepat diterima oleh masyarakat tetapi melewati rentang waktu dan usaha hingga akhirnya diterima, lalu diakui sebagai sesuatu yang bermanfaat, dihargai karena mendapat respon baik tidak hanya dari masyarakat tetapi dari instansi-instansi yang menganggap ini pantas dan layak diberikan penghargaan, lalu ditaati karena norma-norma yang ada merasuk dan mengubah perilaku warga dan akhirnya melekat dan mendarah daging. Dan hingga saat ini PKBM YABIM semakin eksis.

6.2 Saran

- a) Hendaknya PKBM-PKBM yang menjamur di Kota Depok dapat mengadopsi empat proses pelebagaan seperti yang telah dilewati dengan baik oleh PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM). Dan bagi komunitas masyarakat yang tergerak hatinya untuk memajukan dunia pendidikan yang sedang terpuruk. Sekolah alternatif seperti PKBM YABIM ini merupakan sarana dan wadah pendidikan yang masih dibutuhkan oleh kaum marginal. Sehingga tidak warga Terminal Depok saja yang ikut merasakan, tetapi YABIM-YABIM di tempat lain juga menjamur dan pendidikan berkualitas bukan barang yang mahal untuk masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tidak mampu.
- b) Adanya perhatian dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan agar dapat berperan aktif menyelenggarakan pendidikan yang pro masyarakat marginal. Karena selama ini adanya pungutan seperti biaya ujian, biaya untuk menebus ijazah yang dipungut dari setiap peserta didik ini sangat memberatkan PKBM YABIM dalam menyelenggarakan pendidikan gratis. Karena keberlangsungan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat tidak terlepas dari dana, apalagi semakin banyak warga binaan yang masih dibina oleh Yayasan Bina Insan Mandiri.
- c) Lahan yang dipergunakan oleh Yayasan Bina Insan Mandiri masih menjadi sengketa dengan pemerintah daerah. Lahan yang selama ini menjadi ruang kelas SMP, ruang PAUD, Klinik yang berdekatan dengan Mesjid, serta kantor Yayasan Bina Insan Mandiri disinyalir akan digusur karena untuk pelebaran Terminal Terpadu Depok sehingga ini menjadi permasalahan. Dibutuhkan solusi yang terbaik antara pihak Pemerintah Daerah dan Yayasan Bina Insan Mandiri dengan duduk bersama agar dapat memecahkan permasalahan dengan tidak merugikan kedua belah pihak.
- d) Permasalahan yang dihadapi oleh warga terminal yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masalah Kartu Tanda Penduduk. Berulang

kali surat rekomendasi kemudahan dalam pembuatan KTP yang dilayangkan ke Disdukcapil tidak pernah berhasil. Maklumlah karena penduduk yang tinggal disekitar Sekolah MASTER dianggap tidak memiliki kejelasan sebagai warga dan umumnya warga pendatang. Diharapkan dari dinas terkait mau membantu warga terminal dalam kemudahan pembuatan KTP, karena Kartu Tanda Penduduk sangat penting dalam pengurusan AKTE anak, Jamkesmas untuk warga miskin dan untuk syarat pengurusan Jampersal.

- e) Untuk Yayasan Bina Insan Mandiri, dalam segi letak strategis yang bertempat diantara Terminal Terpadu Depok, Stasiun Depok Baru, dan ITC merupakan pusat keramaian sehingga kurang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan anak rentan akan polusi udara dan polusi suara sehingga mengganggu kesehatan anak didik. Mungkin dari segi bangunan yang dibuat lebih tinggi dan ruang yang kedap suara sehingga menjadi lebih baik.
- f) Hendaknya Lembaga Swadaya masyarakat seperti Sekolah MASTER ini dapat menjamur tidak hanya di Depok tetapi ada di setiap daerah di Indonesia. Tidak mementingkan materi saja tetapi lebih mengutamakan ketulusan, niat yang kuat dan mengedepankan pendidikan yang berkualitas demi mencerdaskan anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

I Buku

- Adi Isbandi, Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* . Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar*. (Edisi Revisi). Jakarta : PT Rineka Cipta
- (1990). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- (2002). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asori S. Karni. (1999). *Civil Society Dan Umat, Sintesa Diskursi Rumah Demokrasi*. Jakarta : Logos
- Basrowi. (2006). *Keberpihakan Pemerintah Kupang terhadap Pendidikan*, (Laporan Penelitian). Lampung : Universitas Lampung
- Culla, Adi Suryadi. (2006). *Rekonstruksi Cibvil Society (Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia)*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah .Jakarta.
- Diamond, Larry. (2003). *Developing Democracy toward consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Diamond, Larry (peny). (1994). *Revolusi Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ernes Gellner. (1995). *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung : Mizan.
- Etizion, Amitai. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*. Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia Pers

- Freire, Paulo. (2000). *Education For Critical Consciousness*. New York. Continuum
- Gulö, W. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo
- Hasan, Fuad. (1995). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hendropuspito, O.C. (1989). *Sosiologi sistematis*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Hasbullah. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hikam, AS, Muhammad. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES
----- (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Islamy, Irfan (2004), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembaruan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Ikatan Alumni ITB.
- Koster, Wayan. (2004). *Restrukturisasi Penyelenggaraan Pendidikan: Studi Kapasitas Sekolah dalam Rangka Desentralisasi*, dalam [http //www. Depdiknas.go.id /jurnal/26/ restrukturisasi penyelenggaraan wayan koster.htm](http://www.depdiknas.go.id/jurnal/26/restrukturisasi%20penyelenggaraan%20wayan%20koster.htm)
- Lubis, S.B. Hari & Martani Husein. (1987). *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan makro*. Depok: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia (PAU-IS-UI).
- Martindale, Donn. (1966). *Institution, Organization, and Mass Society*. New York: University of Minnesota.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial Prespektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Ditperta Departemen Agama RI.
- Moertopo, Ali. (1982). *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CLLS.
- Moleong, Lexi J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad AS Hikam. (1999). *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neera Chandoke. (2001). *Benturan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Istawa.

- Neuman, W. Laurence. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn & Bacon.
- Sedarmayanti. (2000). *Retrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sen, Amartja. (1999). *Development As Freedom*. New York : Anchorbook.
- Siagian, Sondang P. (1995). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihombing, Umberto.(1999). *Pendidikan Luar Sekolah, Manajemen Strategi, Konsep, Kiat dan Pelaksanaan*. Jakarta: PD Mahkota.
- Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana, H.D. (2000). *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Fatah Production.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Suharto, Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial* (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta.
- _____ . (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyadi, Dedy.(2003). *Pengantar Ilmu Komunikasi* .Bengkulu: FISIP UNIB.
- Todaro, Michael P, dan Stephene. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, (Edisi 9, Jilid 1 (Haris Munandar, Penerjemah). Jakarta : Erlangga.
- Uphoff, Norman T.(1986). *Local Institutional Development: An analytical sourcebook with Cases*. West hartford Connecticut: Kumarian Press
- Wiradi, Gunawan .(2000). *Reformasi Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: INSIST Press

II Skripsi/Tesis

- Christiyani, Asri. (2011). *Pengembangan Kelembagaan Lokal Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Non Formal Di Kota Depok*. Jakarta: LA

- Hermanto, Ardiego. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Berbasis Komunitas*. Depok: Universitas Indonesia
- Maulidyansyah. (2002). *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Depok: UI
- Saharuddin. (2001). *Nilai Kultur Inti Dan Institusi Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Syani, Abdul. (2001). *Fungsi Norma dan Nilai Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*. Lampung: UNILA

III Jurnal/Artikel

- BELAJAR DAN BEKERJA BERSAMA MASYARAKAT "Panduan Bagi Fasilitator Perubahan Sosial Perhimpunan Untuk Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan" SUSDEC Perhimpunan Untuk Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Jl. Nuri IV No 8 Sambeng, Mangkubumen, Surakarta Phone: 0271-712049 Email:susdec@lptp.or.id
- Departemen Sosial RI, 2004. *Kehidupan Sosial Budaya Komunitas adat terpencil*, Hasan, Hurbertus, Drs. (1995). *Kemampuan Administratif Bappeda Tk. II. Dalam Peran Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Dati Tk. II Bandung)*. Jakarta : Fakultas Pascasarjana Bidang Studi Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Madjid, Noercholish, 1996, Menuju Masyarakat Madani, Dalam Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan, no.2/vii/1996
- Prastyowati, Sri. 2004. Peran LSM jaRI dalam penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta. B2P3KS.
- Raharjo, Purnomo. Ganesa Vol.II.No.7. Desember. Yogyakarta.
- Simanjuntak, Tumpal M.S. (2001). *Perbedaan antara Organisasi (Organization) dengan Kelembagaan*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan BKM/UPK Proyek penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: 22-23 Mei 2001
- Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003

Tim Dosen IKIP.(1981). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. IKIP Semarang Press. Semarang.

Wapada, Harian. (2005). *Alokasi Anggaran Pendidikan*. 10 Mei 2005

Publikasi Elektronik

Departemen Sosial RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. <http://depsos.go.id>

Kasim, firmansyah.2001. *Pendidikan HAM di Indonesia*, dalam <http://senyum89.Multiply.com/reviews/item/3>

Koster, Wayan.2004. *Restrukturisasi Penyelenggaraan Pendidikan: Studi Kapasitas Sekolah dalam Rangka Desentralisasi*, dalam [http //www.Depdiknas.go.id /jurnal/26/ restrukturisasi penyelenggaraan wayan koster.htm](http://www.Depdiknas.go.id/jurnal/26/restrukturisasi%20penyelenggaraan%20wayan%20koster.htm)

Mahkamah Konstitusi. (2005). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Toyamah, Nina dan Syaikh Usman. 2000. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, dalam [http://www.smeru.or.id/report/field/alokasianggaranpendidikan/ alokasianggaranpendidikan/atm](http://www.smeru.or.id/report/field/alokasianggaranpendidikan/alokasianggaranpendidikan/atm).

UNDP/UNESCO.2008. *Produk Domestik Bruto Negara-Negara Asia Tenggara*

Vidhyandika, Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Fungsi Dan Peranan Lembaga Pendidikan. (2009). <http://meetabied.wordpress.com/2009/10/30/fungsi-dan-peranan-lembaga-pendidikan/>

Priyono, Edy.2005. *Pembiayaan pendidikan di Era Otonomi daerah: Masalah dan Prospek*, dalam <http://www.akademika.or.id/arsip/pembiayaan%20pendidikan-Edy%20Priyono.pdf>

Program PKSA baru untuk Anak Jalanan. (2010). <http://hileud.com/pksa-baru-sentuh-5119-anak-jalanan.html>, (20 April 2011)

Disdik Depok Temukan PKBM Ilegal.(2011).7 Juli 2012 [http://www.arsip.net/id/link.php?lh=B1FRUgwEC1YF,7 Juli 2012\)](http://www.arsip.net/id/link.php?lh=B1FRUgwEC1YF,7%20Juli%202012)

Sekolah Alternatif bagi kaum miskin.(2005).<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/02/lapsus03.htm>.7 Juli 2012

Sekolah Master.(2011).

Sakti, Andarini Susi. (2011).

http://susisaktiandarini.blogspot.com/2008_09_01_archive.html (24-02-2011)

Sunandar, Adi. (2012) Sebanyak 1400 Siswa Di 25 PKBM Akan Mengikuti Ujian Paket C. 2011).<http://www.depok.go.id/02/07/2012/pendidikan-kota-depok-sebanyak-1400-siswa-di-25-pkbm-mengikuti-ujian-paket-c>

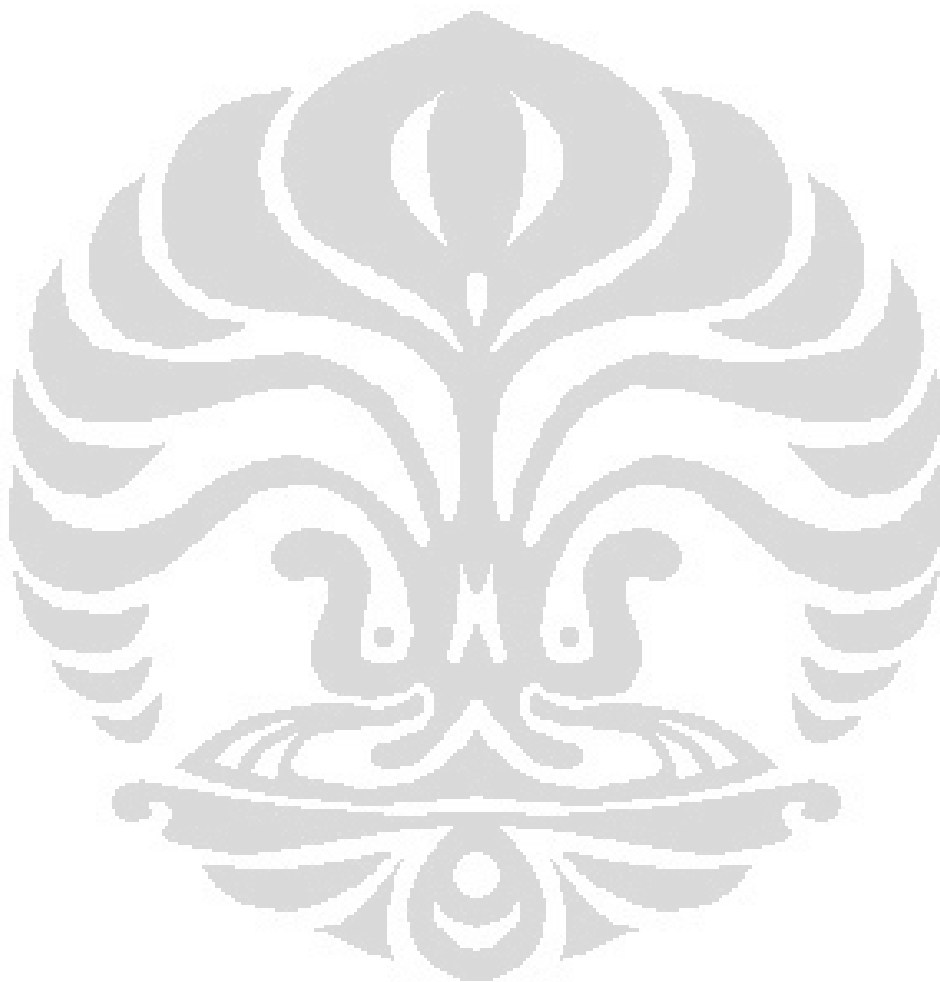
Pendidikan Gratis Hanya Janji.(2012).<http://www.analisa-daily.com/news.07/06/2012//pendidikan-gratis-hanya-janji>

Camat Pancoran Mas Di Sekolah Master.(2012).<http://panmas.depok.go.id/02/07/2012>.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	xvi
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	xix
Lampiran 3	Dokumentasi Hasil Pengamatan	xxxv



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini pedoman wawancara dan yang akan digunakan mengacu pada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dalam pedoman wawancara pertanyaan-pertanyaan yang disusun hanya bersifat pertanyaan kunci yang akan dikembangkan lebih jauh dalam proses wawancara pertanyaan-pertanyaan yang disusun hanya bersifat pertanyaan kunci yang akan dikembangkan lebih jauh dalam proses wawancara, terutama pada hal-hal yang dianggap menarik untuk didalami. Adapun beberapa pertanyaan yang dijadikan pedoman wawancara, dalam penelitian ini adalah:

1. Awal Yayasan Bina Insan Mandiri seperti apa?
2. Fasilitasnya seperti apa, prasarana dan sarana?
3. Kapan ada bangunan (jadwal rutin ditahun berapa)?
4. Kegiatan belajar-mengajar (Jadwal Rutin)?

Empat pertanyaan tersebut akan dibagi kedalam dua pertanyaan secara mendalam sebagai berikut:

a) Deskripsi Proses Pelembagaan Terjadi di PKBM YABIM

(Informan: Pendiri PKBM, Masyarakat sekitar PKBM YABIM, Guru/Tutor relawan)

- Pendiri PKBM
 1. Apa yang melatar belakangi berdirinya PKBM YABIM ini?
 2. Bagaimana kondisi awal masyarakat sekitar Terminal Depok?
 3. Coba dideskripsikan bangunan awal YABIM terbentuk hingga sekarang ini ?
 4. Bagaimana respon dari masyarakat awal terbentuknya PKBM ini?
 5. Bagaimana pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat Terminal?
 6. Bentuk dan kegiatan nilai dan kegiatan yang ada pada PKBM YABIM seperti apa?
 7. Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membantu kelancaran kegiatan serta upaya pemenuhan kebutuhan tersebut?

8. Gambaran struktur organisasi dan tata kerja personil?
 9. Bagaimana kepemimpinan yang dijalankan pada PKBM YABIM ini sehingga tetap berjalan hingga sekarang?
 10. Mekanisme kerja (perdalam dalam pengambilan keputusan, aturan main, hingga reorganisasi)?
 11. Kekuatan seperti apa sehingga PKBM YABIM eksis hingga sekarang ini?
 12. Apa faktor-faktor yang menghambat perkembangan PKBM YABIM ini?
 13. Apa faktor-faktor yang mendukung berdirinya PKBM YABIM hingga sekarang ini?
 - Tutor
 1. Prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh peserta didik PKBM YABIM?
 2. Bagaimana dengan sistem pengajaran pada awal YABIM terbentuk hingga sekarang ini (baik dari segi jadwal pengajaran, proses belajar-mengajarnya seperti apa)?
 3. Apakah ada peningkatan dari kelulusan peserta didik, seberapa besar?
 - Masyarakat
 1. Bagaimana awal terbentuknya PKBM YABIM?
 2. Bagaimana kondisi awal bangunan PKBM YABIM hingga sekarang?
 3. Perubahan apa yang dirasakan dengan hadirnya PKBM YABIM terhadap masyarakat?
- b) Deskripsikan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan PKBM
1. Apa peran PEMDA dalam proses pelebagaan PKBM YABIM?
 2. Kontribusi apa saja yang sudah selama ini diberikan oleh PEMDA untuk PKBM YABIM?
 3. Bagaiman output dari hadirnya PKBM YABIM terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar Terminal dan terlebih dibidang pendidikan?

Lampiran2 Kutipan Wawancara

<i>Pertanyaan</i>	<i>Informan</i>	<i>Uraian</i>
1	2	3
Apa yang melatar belakangi berdirinya PKBM YABIM	NR Pendiri PKBM YABIM	Nahh,, disaat saya melihat seperti itu,,, orang maen judi bisa, mabok-mabokan bisa, tapi anak kok ngga di urusin, terlantar, anak-anak nya jadi pengamen, saya melihatnya kayak gitu loh,,, jadi saya prihatinlah melihat seperti itu, ,,apalagi rumah-rumah ibadat dijadikan klo malem tuhh org distu mabook tuuhh,,, kalo pagi-pagi tuuh bersihin kondom, kemana-mana. Ketika orang tuanya mabok anaknya kan jadi terlantar ngga disekolahin gitu loh jadi dampaknya penyakit social yang suka melamun itu adakan namanya pasang duit 10.000 dapet duit 2,5 juta.
Bagaimana kondisi awal masyarakat Terminal Depok		Masyarakat terminal yang suka mabok-mabokan, main judi, banyaknya tempat maksiat sehingga ada keinginan saya untuk memperbaiki perilaku mereka karena juga masyarakat udah mulai resah semua, cuman disatu sisi banyak yg diuntungkan oknum-

		oknum. Jadi kalo semua orang punya kepentingan disini terutama orang-orang yang apa yang mata pencariannya itu perkaitannya dengan penjarangan ujung-ujungnya perut semua jadi ini tetap bertahan karena banyak yang diuntungkan, terutama ini kan komunitas marginal
Coba dideskripsikan bangunan awal YABIM terbentuk hingga sekarang ini		Tahun 2000, tahun 2000 awal disini Mushola masih kecil, jadi saya izin mendirikan mushola untuk keamanan. Masih aja barang hilang, barang yang hilang saya di tagih kan oleh masyarakat disitu tapi mereka nggak berani sama saya. Kalau barang orang hilang saya ganti, orang berantam saya tanganni dulu saya dilempari melulu lama-lama banyak perubahan-perubahan awalnya ku ajak orang orang yang minta makan sama saya nggak tau nya mahasiswa, tahun 20004 setau saya Sebelumnya saya tinggal diseberang,, baru gudang, saya lupa tahunnya,,lalu ada kelas TK kantor dulu kelas itu,,,baru saung,,lalu sablon,,,lalu didirikan ruang akademis,,lalu pada tahun 2008 saya bikin kelas kontainer.
Latar Belakang terbentuknya PKBM di Kota Depok	YM (Pendiri Ats-tsiqah)	Dari sejarahnya, SMP terbuka ini ada sejak tahun 1980-an. Di tingkat Nasional udah mulai di launching cuman untuk khusus di Depok, khusus di SMP 10 itu tahun 2000an, tapi yang mengelola

		<p>disebut TKB regular karena inisiatif dari guru-guru SMP 10, itu inisiatif dari oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mulai 2004 ditandai dengan namanya kalo ditingkat pusat ada namanya yayasan sekolah rakyat. Mereka yang mengelola sekolah terbuka nama TKB nya TKB Mandiri. SMPN 10 mulai menerima TKB Mandiri itu tahun 2003/2004. Yang pertama terminal, yang kedua itu TKB Mandiri Ats Tsiqah. Kalo ditanya TKB itu ada dua, TKB Regular (TKB yang dibentuk oleh induk itu sendiri) ada tiga, TKB pengasinan, TKB Rangkapan Jaya dan TKB Bedahan dan TKB Mandiri (sebagian perannya diambil masyarakat), terminal, Al-kalam, Al- tsiqah. Jadi total TKB yang menginduk di SMPN 10 itu ada 8 TKB. TKB regular ada 3 dan TKB Mandiri ada 5 (Al kolam, Bina Mulia, Al Atas/dua-duanya di terminal, kemudianAts-tsiqah,Al-sihat)</p>
		<p>saya bersama teman saya termasuk pak Rohim merintislah,,,karena kalo dicari-cari ditingkat</p>

		<p>nasional belon ada SMA terbuka, justru ditingkat nasional belon ada. tapi kalo ditanya SMP terbuka ibu cari di Depdiknas ada d lt 16 ged E,Klo SMA terbuka mereka belon ada, SMA terbuka pertama kali ada di Depok, itu Juli 2007, awalnya kita coba SMK terbuka</p>
<p>Bagaimana awal terbentuknya PKBM YABIM</p>	<p>MAR (Warga Terminal Depok) Dari tahun 1985</p>	<p>iya lama, ini dulu kebon, sawah, sebelum ada terminal. Ini dulu empang, tempat ternak ikan, terus disebelahnya (di depan rumah MAR) dulu kebon, sebelahnya kebon, sebelahnya kebon, sebelahnya lagi kebon, disini ada penduduk (bersebelahan dengan rumah MAR dan merembet sampai jalan raya Arif Rahman Hakim), nah saya disini mba, lalu digusur, nah itu sampai disitu aja ngga sampai disini, sebelah sono tanaman padi.</p>
		<p>iya sebelum Yabim dibangun ya, penyewaan motor saya udah lama banget mba.</p>
		<p>ohh, itu kayak gini mba dulu tanah orang, sama warga sini dibuat gubuk buat semacam perkumpulan</p>

		<p>kayak diterminal ada tuh lapo tuak-tuak gitu, tapi bukan tempat maksiat. Tiba-tiba Pak Rohim ntah gimana, tuh yang saya dengar ya, dapet sumbangan tanah untuk diwakafkan yang saya dengar. Akhirnya die dipindahkan. Dikasih uang ke rohiman awalnya tanah kosong itu, bukan maksiat. Ngga ada cewek malam mba yang maksiat</p>
		<p>iya awalnya kecil itu mushola,langgar. Lama-lama dibesarin.</p>
		<p>baru kalo ITC, tahun 2004-2005, 2005-an lah,, kalo terminalnya tahun 1998/1999,, Iya dulu rumah asli saya disitu mba, itu stasiun udah berapa kali pindah mba dari stasiun kecil pindah kemari nih, disini nih nyebrang rel, pindah lagi kekiri nyebrang lagi ke kanan pindah lagi ke tempat awal,, Kalo pasar kemiri semenjak saya SMP udah ada mba sekitar 1986 lah mba. Masih duluan berdiri Ramayana mba (pas di sebelah pasar Kemiri) tadinya itu sawah,, terasa hidup ya, itu sekitar tahun 1990 jadi, eeh iya</p>

		1990 rame 1990 kebawah mah sepi mati depok
Manfaat apa yang dirasakan dengan hadirnya PKBM YABIM		Manfaat hadirnya Yabim dilingkungan warga ini apa ya pak, karna yang saya tau Pak Rohim mengadvokasi orang-orang yang berurusan dengan hokum, kesehatan
		kalo untuk warga disiniya kalo saya boleh jujur, yang saya rasain cumin 15% aja, ini kalo hujan gede disini banjir. Saya udah bilang ke Pak Rohim. Enyak saya udah bilang, dia nya cumin jawab iya-iya saja. Sedangkan air yang dari atas kalo hujan air pada kesini, air dari Yabim tadinya ngga kayak gini. Sekarang ini limbah buangnya dari die, coba mba suarain deh.
	MUR (Warga Terminal Depok) Dari tahun 2006	bukan hanya sekolah aja kak, kemaren waktu bapak saya sakit aja saya minta tolong ke Pak Rohim, bapak saya kena serangan jantung. Adik saya juga pernah jatuh dari atap kereta belum lama tuh kejadian adik saya, ntar nih 40 hari ntar tanggal 7 minta tolongnya ama Pak Rohim dibantu pake mobil

		ambulans
	SC (Siswa kelas 2 SMA PKBM YABIM)	Kakak saya juga ditolong Jamkesmasnya, juga kalo kita ngga punya duit buat makan ama Pak Rohim suka dibantu dikasi beras
	DN (Staf Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial)	Kemaren sebelum ada anak ngamen , ojek payung minta-minta ya macem-macem belum lagi anak jalanan yang sering ditemui dilampu merah. Dengan adanya yayasan ini ngga keluar ngga ditemui dilampu merah itu dah bagus sekali gitu loh
	SM (warga Terminal Depok) Dari tahun 2006	Anak jalanan bias sekolah, orang yang kesusahan biasa ditolong gratis dibuat sampe orang lahiran, juga kematian. Orangnya juga ngga mandang dikenal pasti ditolong.”
Adakah perubahan dari yang awal terbentuk dengan PKBM YABIM yang sekarang	SOP (Tutor SD) Dari tahun 2003	Iyya kalo dulu iyya sama kayak sekarang, apa yaakalo dulu, yaa kalo sekarang kan banyak anak Punk, ada anak kecil jalanan, kalo dulu warga belajarnya pulang kerumah jarang yang tidur disini,,mungkin sekarang udah punya tempat. Tempat untuk tidur mereka kalo dulu mah pulang

		kerumah, kalo dulu anak Punk mah ngga ada
	SC (Siswa kelas 2 SMA PKBM YABIM)	Perubahan nya banyak, jumlah orang yang sekolah tambah banyak, kelasnya juga banyak jg, biasanya digilir khn ka ya kabiasanya SD ma sebagian SMP nya pagi dan sebagian SMP nya siang dan SMA ada yang siang dan yang sore
Bagaimana Respon dari masyarakat	MUS (Koordinator PKBM YABIM) Dari tahun 2004	Yang saya liat pandangan masyarakat kurang karena kalo bicara anak jalanan, sekolah berarti ada waktu yang tersisa berkurang untuk mencari uang, awal-awal agak suit bahkan ada yang bilang aneh, sekolah apaan yang begini, karena api kita tetap lanjut, karena kan banyak yang lulus terus kondisi ekonomi yang kurang ditambah denga mdia
	SOP (Tutor SD) Dari tahun 2003	Iyya alhamdulillah ya mendukung, pro lah dengan kita. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan untuk kebaikan kepada mereka. Jadi mereka mendukunglah. Kan kita kita memotivasi dan memberikan ilmu, iyya walaupun ilmunya sedikit
Bagaimana pendekatan kepada masyarakat dan warga belajar	MUS (Koordinator PKBM YABIM)	banyaklah cara pendekatannya kalau berbicara

	<p>Dari tahun 2004</p>	<p>masyarakat terminal kan banyak preman-premannya terus dinas terkai. Masyarakat terminalnya kita dekatan. Jadi rasa respeknya terrhadap lembaganya terhadap lembaga berbeda-beda itu tergantung dinamika yang udah ada pada masyarakat. Jangankan pada lembaga , di dalam satu keluarga saja terdapat berbagai macam dinamika.</p> <p>kalo menurut saya sih lebih kepada penyadaran kepada orang tua, iya itu secara tertulis iya itu sebagai media saja mba, pengobatan secara gratis, pendidikan gratis, social, <i>care</i>-nya yayasan ya <i>care</i> beneran emang ngga dibuat-buat</p>
	<p>SOP (Tutor SD) Dari tahun 2003</p>	<p>Iyya lebih ke kakak-adik, karena ya itu pndekatan yang baik, kalo saya memeberikan pengajaran sesuai dengan kemauan mereka, kalo mereka mau, memang ingin belajar disini tetapi daya belajar nya kurang minat, iyya saya mencoba bertanya ke dia maunya apa misalnya ini music, iya oke nanti kk ajarin music. Tetapi kalo udak kk ajarin music warga belajar ini harus tetap belajar. Ada warga</p>

		belajar yang ketika di ajarin dia ngga semangat, iyya saya ajak untuk kemusik tapi tetep belajar yang terpenting
Nilai yang ditanamkan PKBM YABIM	EK (Koordinator PKBM YABIM 2005)	„,ibarat mutiara, anak-anak ini yang sebagian besar tidak punya biaya untuk sekolah, bahkan untuk transport. Mereka adalah mutiara yang masih terpendam dalam lumpur, kotor, dan belum dilihat orang. Oleh karena itu mereka dibina, kita latih, ibarat mutiara kita bersihkan lagi dari lumpur, dipoles, disusun jadi perhiasan yang bernilai tinggi
	MUS (Koordinator PKBM YABIM) Dari tahun 2004	Nilai kemanusiaannya, sapa pun disini adalah manusia selayaknya kita tempatkan nilai-nilai kemanusiaanya „,nilai kemandirian, seperti visi-misi yayasan, nilai-nilai kreativitas, nilai-nilai bagaimana dengan keterbatasan mereka bisa melanjutkan pendidikan dan bisa hidup seperti orang lain
Bagaimana PKBM YABIM dikenal luas oleh massyarakat	MAR (Warga Terminal Depok) dari tahun 1985	ya, namanya dari mulut ke mulut mba, iya gimana ya, namanya juga gratis siapa yang ngga mau
	SOP (Tutor SD)	kalo dulu ada wali murid,ada pihak-pihak lain yang

	<p>Dari tahun 2003</p>	<p>ikut membantu mempromosikan sekolah gratis ini. mengajak kaum duafa, anak jalanan untuk bersekolah disini gitu</p>
	<p>MUS (Koordinator PKBM YABIM) Dari tahun 2004</p>	<p>bukan untuk anak jalanan saja tapi juga untuk anak biasa yang orang tuanya kurang mampu,,,dari mulut ke mulut, bawa teman, <i>modeling</i> dari temen-temen kita yang udah lulus, <i>modeling</i> temen-temen kita yang udah kerja, temen-temen kita yang udah kuliah, makin banyak. Lalu ada liputan dari media. Media datang kesini karena ada sesuatu yang unik. ,, iya, kayak dari citaya. Semenjak ada perijazahhan baru mulai rame. Apalagi aktu zaan krisis moneter tahun 1998/1999 gimana supaya bisa. Bukan utuk anak jalanan saja api juga untuk anak biasa yang orang tuanya kurang mampu semakin-ama semain baya ya dari mulut ke mulut, bawa teman, disini juga ada ya yang kayak moeling dari teman-teman kita yang sudah lulus, odelin teman-teman kita yang suah kerja, teman-tean kita yang sudah kuliah, maah semakin bayak. Lalu ada media juga. Kita juga suka</p>

		ada liputan dari media. Media datang kemari karena ada sesuatu yang unik di Terminal.
Bagaimana PKBM YABIM ini dapat diakui	NR (Pendiri PKBM YABIM)	saya mengurus legal tahun 2004 sampai 2005 terus ada perubahan tahun 2006
	MUS (Koordinator PKBM YABIM) Dari tahun 2004	2005 adanya pengakuan eksternal sebagai yayasan ka ada izin sekolah , dan adanya akte yayasan itu dah kita mulai secara sistematis.
	NZ (Staf Pelaksana, Dinas Pendidikan Kota Depok)	kalo Dinas Pendidikan hanya izin operasionalnya saja,, kalo PKBM kan masuknya nonformal,ngga pakai menginduk ke negeri itu sekolah terbuka, kalo terbuka masuknya ke formal. Kalo YABIM ada sekolah formalnya kalo ke formalnya bukan ke PNFI.
Bagaimana PKBM ini dapat ditaati oleh warga binaan		Kalau di sini enak, beda, tertib banget, misalnya kita dilarang bawa handphone, ngga boleh Pakai Pakaian yang gantung, ngga boleh bawa alat elektronik, gitu pokoknya, peraturannya bagus banget
Bagaiman aturan-aturan yang diberikan oleh PKBM YABIM kepada peserta didik?	MUS (Koordinator PKBM YABIM) Dari tahun 2004	Awalnya ngga, kemudian dimusyawarahkan akhirnya disepakatin untuk berpakaian sopan seperti

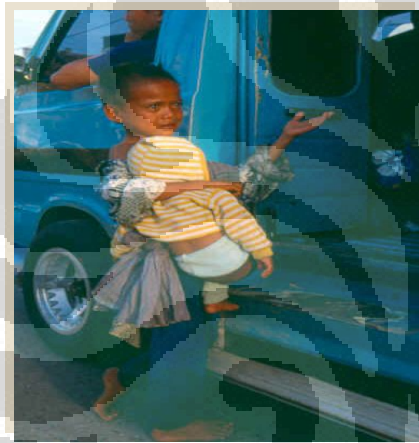
		jilbab untuk yang muslim itu tahun 2008, apalagi melihat kondisi yayasan yang rentan terhadap pelecehan dan unsur negative lingkungan, banyaknya anak Punk yang tinggal dan numpang makan iya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan
	SOP (Tutor SD) Dari tahun 2003	ada juga larangan ketika warga belajar bolos, terus melawan guru, ngga mendengarkan tutorya, berantem dengan temannya, atau tawuran, mereka kita beri sanksi. Kalo saya dulu di SD saya beri hafalan, giamna supaya sanksi ini berupa pembelajaran bagi mereka, iyya udah saya tanamkan seperti itu, kadang juga ada sanksinya olah raga lah seperti lari dilapangan seperti itu
Bagaimana sistem kepemimpinan PKBM YABIM?	MUS (Koordinator PKBM YABIM) Dari tahun 2004	ya tahun 2005 kita sudah mulai secara sistematis kebijakan-kebijakan itu ada ketika diadakan rapat kecil seperti musyawarah. Pak Rohim sebagai dewan pendiri. Pak Nur Rohim sebagai dewan pendiri dianggap yang biasa merangkap ketua, ketua itu yang yang operasional dengan yang urusin semua

		<p>pokonya macem-macem dah tapi tetep kalo PKBM beda lagi</p> <p>Kalo yayasan –dewan pendiri/pembina</p> <p>Yayasan- ekonomi, social/kesehtan,pendidikan, keagamaan</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kita tidak mempersulit orang, ini berbicara masalah melayani 2. Didukung oleh tim yang solit yang artinya berangkat dari orang-orang yang tinggal disitu juga
		<p>Hambatan: hambatan eksternal: kerjasama dari lembaga-lembaga pemerintah misalnya untuk ngurusin KTP, AKTE, JAMKESMAS, kadang kurang kooperatif, birokrasi dan lain-lain</p> <p>Internal: dari dalam diri kita, keikhlasan, saling memahami darimana kita dari segi SDM, permasalahan dana dampaknya terlihat dari jalannya kegiatan yayasan.</p>

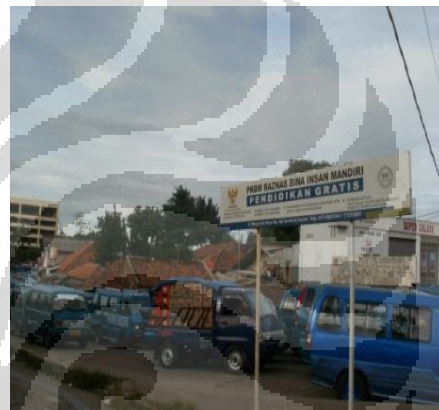
<p>Bagaiman peran dari Dinas Pendidikan</p>	<p>NZ (Staf Pelaksana Pendidikan Non Formal)</p>	<p>iyya pertahun, kalo Dinas Pendidikan kan sebagai pemantau dan fasilitator,kalo PKBM kan milik masyarakat kalo kontribusi, iyya banyaklah. Biasanya kalo pemerintah mengalokasikan dana untuk paket A, Paket B,Paket C,, Rutin, kalo memang, kalo APBD Depok takut berbenturan, makanya diberikan dari APBD Provinsi dan dari pusat</p>
	<p>DN (Staf Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial)</p>	<p>Kita sudah mempunyai kesepakatan seperti ada orang terlantar, yang sakit jadi penanganannya itu dari YABIM ke Dinas Sosial lalu ditangani ke RSJ/RSUD untuk penanganannya. Jadi menurut saya YABIM terbantu dan Dinas Sosial juga terbantu. Apalagi banyak anak-anak yang terlantar jadi mo kita bawa kemana kan di Depok belum ada Rumah Singgah yam au tidak mau kita bawa ke YABIM</p>

Lampiran 3 Dokumentasi Hasil Pengamatan

Dokumentasi kegiatan ini berisikan foto-foto yang didokumentasi selama peneliti berada di sana. Peneliti melihat dan mendokumentasi setiap aktivitas yang ada di sekolah MASTER, dari kegiatan belajar-mengajar, advokasi kebutuhan warga binaan, berdiskusi dengan aparat pemerintah, dan rapat yang dilakukan untuk evaluasi program

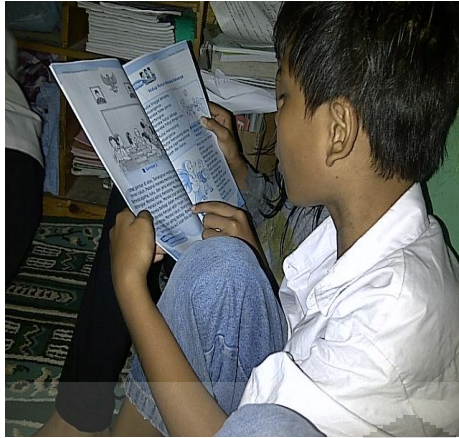


Gambar 1



Gambar2

Jika dilihat dari lokasi Sekolah MASTER yang berada ditengah-tengah Gedung ITC, Stasiun Depok dan Terminal sangat cocok bagi anak kurang mampu dan anak jalanan untuk dapat mengenyam pendidikan walau mereka masih harus ke jalan bekerja untuk mencari uang. Pada gambar 1 si anak mengaku setiap pulang sekolah dia harus keliling Terminal dan lampu merah untuk memintaminta.



Gambar 3



Gambar 4

Anak jalanan hasil tangkapan dari Satpol PP yang dibawa oleh Dinas Sosial ke YABIM untuk tinggal sementara dan dibina serta diberi pendidikan. (Gambar 3). Terlihat perbedaan antara anak jalanan dengan anak yang kurang mampu. Kebiasaan di jalan dan kurangnya kasih sayang membuat anak berperilaku kurang santun walaupun masi di dalam kelas berbeda dengan anak yang masih mendapat perhatian orang tua. Biasanya anak yang berasal dari keluarga kurang mampu masih menggunakan pakaian seragam seadanya, mandi dari rumah dan rapi. Keluhan dari tutor yang mengajar adalah kebanyakan dari anak jalanan jarang mandi dan suka buat onar di ruang kelas (Gambar 4).



Gambar 5

Gambar 6

Anak binaan setelah selesai mendapatkan pendidikannya, mereka diwajibkan untuk sholat (Gambar 5), dan makan secara teratur (Gambar 6). Setelah itulah anak bebas melakukan aktifitas yang lain, YABIM tidak memaksa anak untuk melarang ke jalan tetapi perlahan-lahan menarik anak untuk tidak ke jalan dengan memberikan pelatihan agar waktu mereka dihabiskan untuk mengasah potensi mereka



Gambar 7

Gambar 6

Struktur kepengurusan YABIM tergolong rapi, dimana setiap program-program pencapaian baik dibidang pendidikan, sosial, hukum dan yang lainnya selalu dievaluasi melalui rapat. Jika ada suatu permasalahan kecil di bidang tertentu biasanya dirapatkan dengan pengurus inti. Ketika permasalahan itu melibatkan bidang-bidang pengurus yang lain, baru dimusyawarahkan dengan semua pengurus dengan agenda yang terencana dan melibatkan ketua yayasan (Gambar 8).



Gambar 9

Gambar 10

Pelayanan di bidang kesehatan

Pelayanan dibidang hukum



Gambar 11

Gambar 12

Berbagai penghargaan yang telah di raih Yayasan Bina Insan Mandiri.



Gambar 13



Gambar 14

Dalam perjalanan Yayasan Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari campur tangan instansi-instansi terkait. Peran dari Pemerintah Daerah tidak dipungkiri ikut andil dalam mendukung pencapaian Pak Nur Rohim dalam mensejahterakan masyarakat Terminal. Diskusi langsung dengan Kasubdit Dinas Sosial Depok dan Sat Pol PP dalam penanganan anak jalanan (Gambar 13)

Siswa sekolah MASTER yang terlibat tawuran dengan sekolah lain. Bersama tutor Sekolah MASTER mengadvokasi anak agar tidak dihukum berat karena anak yang disinyalirkan sering melakukan tawuran akan diberi hukuman kurungan ke kantor polisi Pancoran Mas. Tetapi karena petugas mengenal baik YABIM apalagi anak yang terjaring akan mengikuti ujian nasional sehingga mereka mendapat hukuman mendidik yaitu membersihkan stasiun Depok Baru dari sampah (Gambar 14).



Gambar 15

Gambar 16

Peneliti ingin mengetahui langsung manfaat (ouput) YABIM selama ini bagi warga terminal. Dari info nara sumber yang diwawancarai, bahwa mereka percaya YABIM selama ini telah merubah perilaku si anak, dan anak dianggap lebih layak untuk dibina di YABIM sementara waktu karena faktor kenyamanan keluarga yang membuat si anak suka kabur. Sese kali si anak mau datang ke rumah dan mengaku anaknya berubah menjadi lebih santun berperilaku dan mau sholat berbeda ketika dulu dia suka kabur dan bergaul di jalan(Gambar 15). Seorang pemulung mengaku suka mendapat bantuan sosial dari Pak Rohim dan selama ini dia merasa terbantu karena barang hasil mulung dijual ke UKM nya YABIM dengan harga yang memuaskan dan sangat membantu kebutuhannya sehari-hari (Gambar 16).